

KESULTANAN
PALEMBANG
DARUSSALAM

Sejarah dan Warisan Budayanya



Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.
Dr. Eko Crys Endrayadi, M. Hum





KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

SEJARAH DAN WARISAN BUDAYANYA

KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

SEJARAH DAN WARISAN
BUDAYANYA

Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.
Dr. Eko Crys Endrayadi, M. Hum

Diterbitkan oleh:



**Kesultanan Palembang Darussalam – Sejarah Dan Warisan
Budayanya**

Copyright Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.

Dr. Eko Crys Endrayadi, M. Hum, 2016

Peneliti: Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.

Dr. Eko Crys Endrayadi, M. Hum

Asisten Penulis: Andi Hariyanto

Koleksi Foto: Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D. , Dr. Eko

Crys Endrayadi, M. Hum, Dokumen

Cetakan Pertama April 2016

ISBN: ~~978-602-9030-26-6~~

~~929.2~~

NA

Nawiyanto, dkk

s

Sejarah -- Jember: Jember University Press, 2016

xv, 185 hlm, 23 cm

1. SEJARAH

I. Judul

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari penerbit

Diterbitkan pertama kali oleh Jember University Press dan

Penerbit Tarutama Nusantara

Pewajah Isi dan Kover: Dzikri Abdi Setia

Daftar Isi

DAFTAR ISI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	3
Lingkup dan Permasalahan.....	7
Metode.....	8
Organisasi penulisan	11
BAB 2 PALEMBANG MASA PRA KESULTANAN	13
Kerajaan Sriwijaya.....	15
Kerajaan Suwarnabhumi.....	21
BAB 3 KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM	25
Masa Pembentukan	27
Masa Kebangkitan dan Kejayaan.....	35
Masa Berakhirnya Kesultanan dan Pengaruhnya	42
BAB 4 STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT	47
Struktur Pemerintahan	49
Struktur Masyarakat	54
Karakter Masyarakat	60
BAB 5 PEREKONOMIAN	67
Penduduk Palembang	70
Pertanian, Perikanan, dan Kerajinan	73
Perdagangan.....	77
Perdagangan Timah.....	80
Perdagangan Lada.....	82
BAB 6 PERTAHANAN DAN KEAMANAN	85

Sistem Pertahanan	87
Benteng Pertahanan	93
Aparat Pertahanan dan Keamanan	101
Fungsi Keluarga	105
BAB 7 BANGUNAN BERSEJARAH	109
Masjid	111
Masjid Agung Palembang.....	111
Masjid Merogan	115
Masjid Suro	116
Benteng Kuto Besak	117
Benteng Kuto Gawang	120
Keraton Beringin Janggut.....	122
Keraton Kuto Kecil.....	122
Makam-Makam Sultan Palembang	123
Kompleks Makam Gede ing Suro.	125
Makam Nyi Geding Pembayun.	126
Makam Candi Angsoko.....	126
Kompleks Makam Candi Laras	126
Kompleks Makam Sabo Kingking.....	126
Kompleks Makam Sako Tigo (OKI).....	128
Kompleks Makam Candi Walang.....	128
Kompleks Makam Kebon Gede.....	129
Makam Sultan Agung.....	129
Kompleks Makam Kawah Tengkerep.....	129
Kompleks Makam Susuhunan Ratu Machmud Badaruddin	131
Rumah Limas	132
BAB 8 SENI DAN BUDAYA MASYARAKAT PALEMBANG	139
Busana (Fashion)	141
Kuliner Khas Palembang	155
Adat Menerima Tamu	160
Bahasa dan Sastra	162
Seni Tari.....	165

DAFTAR PUSTAKA.....	173
GLOSARIUM.....	180
INDEKS.....	182
BIODATA PENULIS	186

KATA PENGANTAR

Buku ini hadir berasal dari hasil penelitian yang dilakukan Tim Peneliti sejak bulan Agustus 2015 hingga Februari 2016. Sebagai dokumentasi sejarah, kehadiran buku ini merupakan upaya ke arah penyusunan gambaran sejarah yang lebih utuh mengenai Kesultanan Palembang Darussalam dan warisan sejarahnya. Hal ini dipandang mempunyai makna penting mengingat tulisan-tulisan yang sudah ada mengenai Kesultanan Palembang masih bersifat fragmentaris, serta menonjolkan aspek-aspek tertentu secara terpisah.

Gambaran yang lebih utuh dipandang akan mampu memberi pemahaman yang lebih baik tentang keberadaan dan peranan yang dimainkan Kesultanan Palembang Darussalam pada masa lalu dan warisan yang ditinggalkannya.

Identitas kota, budaya dan karakter masyarakat Palembang yang masih tampak hingga sekarang ini merupakan produk dari proses sejarah yang panjang. Kejadian-kejadian dan proses sejarah pada masa Kesultanan Palembang Darussalam merupakan faktor penting yang ikut berpengaruh dalam pembentukan identitas budaya dan perkembangan masyarakat Palembang.

Tim Peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak R. Abdul Kahar Muzakir, Direktur Utama PT Tarutama Nusantara (TTN) Jember, yang telah mendanai kegiatan penelitian ini.

Kehadiran buku ini merupakan ungkapan dan bukti nyata begitu besarnya minat dan perhatian Beliau terhadap warisan sejarah bangsa, khususnya sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, yang telah memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah Indonesia, termasuk dalam melawan imperialisme dan kolonialisme Barat.

Sebagai sosok pribadi yang secara genealogis mempunyai hubungan darah dengan Sultan Mahmud Badaruddin II, minat Beliau terhadap penulisan sejarah Kesultanan Palembang dan warisannya dapat dipandang sebagai ungkapan rasa memiliki dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas masa lalu leluhurnya. Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang telah Beliau berikan kepada Tim Peneliti.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga Tim Peneliti sampaikan kepada Bapak Andi Hariyanto untuk semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan untuk kelancaran penelitian ini, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan, khususnya selama pengumpulan bahan-bahan penulisan di Palembang.

Terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan: 1) Bapak Puji Winardi (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta); 2) Dr. Farida (Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya); 3) Bapak Yanuar Rozanof, yang telah memandu dan membuka akses bagi tim dalam pengumpulan data penelitian di Palembang sehingga kegiatan berjalan lancar dan sangat menyenangkan; 4) Ir. Taupik Gunawan (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan).

Terima kasih juga disampaikan atas bantuan yang tim peneliti terima dari Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja dan Bapak Ali Hanafiah (Kepala Museum Sultan Mahmud Badarrudin II di Palembang) atas kesediaan untuk berbagi informasi dan wawasan tentang sejarah dan budaya Palembang. Tim juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat kami sebut satu persatu

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pemangku kepentingan

khususnya mereka yang menaruh perhatian terhadap pelestarian sejarah dan warisan budaya Kesultanan Palembang Darussalam. Kritik dan masukan dari sidang pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Jember, Februari 2016

Tim Penulis



Bab 1

Pendahuluan

Latar Belakang

Keberadaan negara dan masyarakat Indonesia telah mendapatkan akar-akar sejarah dan sendi-sendinya sejak masa sebelum penjajahan Barat atas wilayah Nusantara. Masa pra-kolonial yang meliputi kurun waktu yang cukup panjang telah memperlihatkan pendirian dan pasang-surut berbagai kerajaan yang menguasai sebagian atau bahkan seluruh wilayah Nusantara. Sejarah telah mencatat berbagai kerajaan Hindu-Budha yang muncul di Nusantara seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan, Kerajaan Kalingga dan Mataram Hindhu di Jawa Tengah, Kerajaan Medang, Singasari, Jenggala, Kediri, dan Majapahit di Jawa Timur, serta Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Masuknya Islam telah memunculkan berbagai kerajaan Islam di Jawa seperti Demak, Pajang, Mataram, Banten dan Cirebon, sedangkan di Sumatera misalnya Kerajaan Aceh dan Palembang. Masa kejayaan kerajaan-kerajaan tradisional di wilayah Nusantara pada masa lalu umumnya dikaitkan dengan masa pemerintahan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur dan Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di Sumatera (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990).

Banyak tulisan telah dihasilkan mengenai kerajaan-kerajaan besar di Nusantara baik oleh ilmuwan asing maupun ilmuwan Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah membahas secara mendalam mengenai Kerajaan Majapahit dan berbagai aspeknya, misalnya yang banyak dilakukan oleh R.B. Slamet Muljana (2011). Demikian juga, berbagai tulisan mengenai Kerajaan Sriwijaya telah diterbitkan sejumlah pakar, di antaranya yang penting untuk disebut adalah George Coedes (1992) dan R.B. Slamet Muljana (2006). Selain kedua kerajaan besar yang merepresentasikan kejayaan masa lalu Indonesia, kajian-kajian mengenai Kerajaan Mataram dan kedua pecahannya, yakni

Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta juga telah banyak dilakukan.

Kajian mendalam yang dilakukan sejumlah ahli secara terpisah mengenai Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, misalnya oleh M.C. Ricklefs (2002) dengan karya berjudul *Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi*, Vincent Houben (2002) dengan karya *Keraton dan Kompeni*, Darsiti Soeratman (1989) dengan karya *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta*, dan George D. Larson (1990) dengan kajian *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta*. Karya-karya ini dan sejumlah karya lain yang telah dihasilkan misalnya oleh Moedjanto (1987) membuktikan betapa pentingnya kedudukan dan peranan kedua kraton dalam perkembangan sejarah Indonesia. Besarnya perhatian yang telah diberikan dalam dokumentasi sejarah atas kerajaan Mataram Islam dan penerusnya tidak terlepas dari eksistensi dan peran yang mereka mainkan pada masa kolonial Belanda, masa perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia dan bahkan sebagian terus berlanjut hingga dewasa ini. Hal ini sangat kentara terlihat dalam kasus Kesultanan Yogyakarta sehingga kemudian mendapat status khusus sebagai sebuah daerah istimewa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tulisan-tulisan mengenai Kesultanan Palembang Darussalam di Sumatera relatif masih terbatas, manakala dibandingkan dengan tulisan-tulisan mengenai Kerajaan Mataram dan keempat pecahannya, yakni Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Sedikitnya tulisan tentang Kesultanan Palembang tidak terlepas dari fakta bahwa keberadaan kesultanan ini secara politis telah berakhir setelah dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1824. Tentu saja nasib yang dialaminya berbeda dengan pecahan-pecahan Kerajaan Mataram yang secara politis ataupun kultural tetap bertahan hingga saat ini. Likuidasi Kesultanan Palembang

secara politis jelas mengindikasikan bahwa pemerintah kolonial Belanda memandang keberadaannya sebagai ancaman yang membahayakan tatanan dan kekuasaan kolonial. Bukti sejarah berupa pertempuran melawan kekuasaan kolonial memang membuktikan patriotisme dan heroisme Kesultanan Palembang tidak bisa dikatakan kecil. Kesultanan Palembang Darussalam termasuk kekuatan politik yang sejak awal menunjukkan sikap anti kolonial yang sangat kuat baik terhadap kekuasaan Inggris maupun Belanda. Kesultanan Palembang terbukti telah melahirkan figur pejuang yang kemudian pada masa kemerdekaan mendapatkan pengakuan secara resmi atas jasanya dalam perjuangan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional, yakni Sultan Mahmud Badaruddin II. Atas jasa-jasanya tersebut, tokoh pahlawan ini bahkan kemudian ditampilkan lukisannya untuk menghiasi uang kertas yang diterbitkan Bank Indonesia.

Terlepas dari kedua penghargaan tersebut, keberadaan Kesultanan Palembang bisa dikatakan belum mendapatkan perhatian dan representasi secara memadai dalam dokumentasi dan publikasi sejarah. Memang beberapa publikasi telah memberi sumbangan berharga tentang keberadaan dan peranan Kesultanan Palembang dalam sejarah, khususnya dalam kaitan dengan perlawanan terhadap kekuasaan asing, misalnya yang dihasilkan oleh Johan Hanafiah (1986) mengenai Perang Palembang dan (1989) tentang upaya Palembang mempertahankan kedaulatan politiknya. Kontribusi berharga juga telah diberikan oleh Rahim (1998) tentang pejabat agama di Kesultanan Palembang, dan Mestika Zed (2003) yang berjudul *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. Beberapa tulisan lain menyoroti berbagai aspek historis dari kebudayaan dan masyarakat Palembang pada masa Kesultanan Palembang, masa kolonial Belanda, maupun masa kemerdekaan,

termasuk di antaranya karya Mahmud (2007) tentang *Sejarah Palembang*, dan karya Jumhari (2010) tentang *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab dan Cina di Palembang dari Masa Kesultanan Palembang hingga Reformasi*.

Karya-karya tersebut dapat dipastikan belum menggambarkan secara utuh keberadaan dan peranan Kesultanan Palembang Darussalam. Ada bagian-bagian dari masa lalunya yang belum dieksplorasi dan dijadikan bahan dalam membangun kisah sejarah Kesultanan Palembang secara lebih utuh. Hal ini tentu saja akan merugikan karena Kesultanan Palembang dan peranan yang dimainkannya belum tergambarkan secara memadai dalam penulisan sejarah dan memori kolektif bangsa. Bagian-bagian tersebut kalau dibiarkan lambat laun akan dilupakan. Apalagi secara politis Kesultanan Palembang memang tidak lagi eksis. Hilangnya kedaulatan politik sejak masa kolonial Belanda memang membawa kerugian besar bagi kelangsungan Kesultanan Palembang sebagai otoritas politik dan kultural. Kerugian tersebut akan bertambah besar ketika dokumentasi dan publikasi mengenai Kesultanan Palembang tidak dilakukan secara memadai dan terus-menerus. Memang sebagian kisah mengenai Kesultanan Palembang masih terekam dalam catatan-catatan yang disimpan oleh keturunan keluarga dan kerabat Kesultanan Palembang. Akan tetapi, catatan-catatan tersebut tidak banyak bisa diakses oleh publik dan masih merupakan bahan mentah, sehingga masih menampilkan sosok “kerangka tanpa daging”, atau belum membentuk “kisah sejarah yang utuh”.

Dalam konteks tersebut pendokumentasian sejarah Kesultanan Palembang menjadi kebutuhan penting agar salah satu kekayaan sejarah bangsa tidak hilang dari kenangan dan dilupakan. Pendokumentasian sejarah Kesultanan Palembang dipandang sebagai kebutuhan penting karena bangsa Indonesia perlu mengetahui dan belajar dari masa lalunya baik yang pahit maupun yang manis, kegagalan maupun kesuksesan pada masa

lalu. Hanya dengan cara demikian, bangsa Indonesia dapat menimba kearifan sejarah untuk menghadapi tantangan-tantangan yang menghadang pada masa kini dan menjadikannya sebagai reservoir kearifan dan pelajaran kehidupan. Hal demikian ini dirasa sangat vital sebagai bekal dan sarana untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah dibangun dengan pengorbanan besar dari para pejuang, bukan hanya dalam bentuk harta benda, melainkan juga berupa tetesan darah, keringat dan air mata bahkan hingga merengang nyawa.

Lingkup dan Permasalahan

Lingkup kajian ini meliputi Palembang sebagai sebuah satuan politik maupun sosio-kultural. Sebagai satuan politik Palembang dimaknai sebagai pusat kekuasaan dan wilayah pengaruhnya dengan Kerajaan Sriwijaya sebagai akar sejarahnya hingga masa Kesultanan Palembang Darussalam. Penghapusan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1824 oleh Pemerintah kolonial Belanda membuat keberadaan Palembang sebagai entitas politik yang otonom berakhir. Akan tetapi, sebagai sebuah satuan sosio-kultural, eksistensi Palembang tidak berakhir, melainkan terus berlangsung karena melekat dengan keberadaan masyarakat Palembang sendiri.

Fokus utama kajian terutama adalah Kesultanan Palembang Darussalam dan warisan sosio-kultural yang dipahatkannya pada masyarakat Palembang yang masih berlangsung hingga saat ini. Secara khusus kajian tentang sejarah dan budaya Palembang ini dimaksudkan terutama untuk mendokumentasikan keberadaan dan peranan Kesultanan Palembang dalam konteks perkembangan sejarah Indonesia. Pokok permasalahan

yang hendak dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang historis Kesultanan Palembang Darussalam?
2. Bagaimana tahap-tahap perkembangan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pusat kekuasaan politik Islam sejak masa pendirian hingga penghapusannya?
3. Seperti apakah struktur pemerintahan dan masyarakat Kesultanan Palembang, serta karakternya?
4. Bagaimana kehidupan perekonomian Palembang pada masa kesultanan sehingga menarik bangsa-bangsa lain untuk menguasainya?
5. Mengapa Kesultanan Palembang sulit ditaklukan oleh kekuatan imperialis Barat khususnya Belanda? Bagaimana sistem pertahanan dan keamanan kesultanan dibangun?
6. Warisan apakah yang ditinggalkan Kesultanan Palembang Darussalam baik dari segi bangunan maupun nilai-nilai budaya?
7. Bagaimana karakter masyarakat Palembang hadir dalam bentuk ekspresi seni dan budaya?

Pendokumentasian ini dilakukan dengan tujuan agar sejarah Kesultanan Palembang dan warisan sosio-kulturalnya dapat diketahui secara lebih luas dan tidak terhapus dari memori kolektif bangsa. Tujuan lainnya adalah untuk memaparkan kisah bangkit, perkembangan, dan keruntuhan Kesultanan Palembang Darussalam. Kisah demikian akan memberi inspirasi dan kearifan sejarah tentang bagaimana membangun bangsa dan menghindarkannya dari keruntuhan. Sejarah diakui merupakan sumber yang sangat berharga untuk mendapatkan kearifan (*wisdoms*) sebagai bekal mengarungi kehidupan karena menyediakan sarana belajar dan bercermin tentang kesuksesan dan kegagalan dari bangsa, negara, dan masyarakat pada masa lalu. Dengan cara demikian, kegagalan serupa dapat dihindari,

demikian pula kesuksesan dari masa lalu dapat ditiru dan diulangi melalui pembelajaran tentang strategi dan cara untuk mencapainya.

Metode

Penelitian tentang sejarah dan budaya dengan fokus Kesultanan Palembang Darussalam digarap dengan menggunakan metode sejarah karena subyek yang diteliti termasuk dalam wilayah kajian sejarah. Pintu masuk untuk membangun narasi dan penjelasan historiografis adalah sumber-sumber sejarah yang ditinggalkan dari masa lalu mengenai Palembang. Oleh karena itu, tahapan kerja penggarapan tulisan ini secara umum meliputi empat langkah pokok atau prosedur kerja dalam penelitian sejarah. Seperti dikemukakan Louis Gottschalk (1985), Metode sejarah pada dasarnya meliputi empat tahapan kerja, yaitu: 1) heuristik, yakni tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan penulisan subjek garap; 2) kritik sumber, yakni perlakuan secara kritis atas sumber-sumber yang terkumpul untuk menentukan otentisitas atau yang biasa disebut kritik eksternal, serta perlakuan secara kritis terhadap informasi sejarah untuk menentukan kredibilitasnya sehingga diperoleh informasi yang kredibel/dapat dipercaya sebagai fakta-fakta sejarah (kritik internal); 3) interpretasi, yakni mentransformasikan fakta-fakta sejarah untuk menyusun argumentasi historis, dan 4) historiografi, yakni penuangan argumentasi yang dibangun dalam wujud narasi atau konstruksi sejarah (Gottschalk, 1985). Model penulisan narasi mengambil bentuk deskriptif-analitis.

Data yang dihimpun dan dirujuk dalam penulisan ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang relevan untuk dijadikan bahan konsultasi dalam konteks penelitian ini adalah

tulisan-tulisan dari pelaku dan saksi sejarah, di antaranya karya Van Sevenhoven, pejabat Belanda yang bertugas di Palembang, dan reportase Tome Pires dalam karya *Suma Oriental*, serta laporan-laporan dan terbitan sezaman. Arsip-arsip yang dikumpulkan juga meliputi arsip tekstual (konvensional) berupa naskah teks terbitan Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel-artikel, laporan-laporan hasil penelitian baik yang terpublikasi maupun belum, serta bahan-bahan lain yang relevan dengan subyek yang diteliti. Bahan-bahan material sebagai sumber sejarah tersebut, dikumpulkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Sumatra Selatan (Palembang), Kantor Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II di Kompleks Benteng Kuto Besak. Setelah data sekunder terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis dokumen (*documentary analysis*) sebagai sarana untuk mengungkap informasi yang termuat dalam dokumen, laporan-laporan resmi, buku-buku mengenai berbagai aspek terkait sejarah Kesultanan Palembang yang dijadikan fokus penelitian.

Guna memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, maka dilakukan observasi ke lapangan. Observasi dilakukan dengan mengunjungi situs-situs bersejarah yang ditinggalkan Kesultanan Palembang Darussalam khususnya dalam kompleks bangunan kraton (benteng) dan makam kesultanan. Di samping itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pewaris dan pelaku budaya Palembang untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan dalam dokumen-dokumen sehingga perlu digali dengan cara lain. Wawancara dilakukan secara bebas dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk dijadikan pegangan. Hal

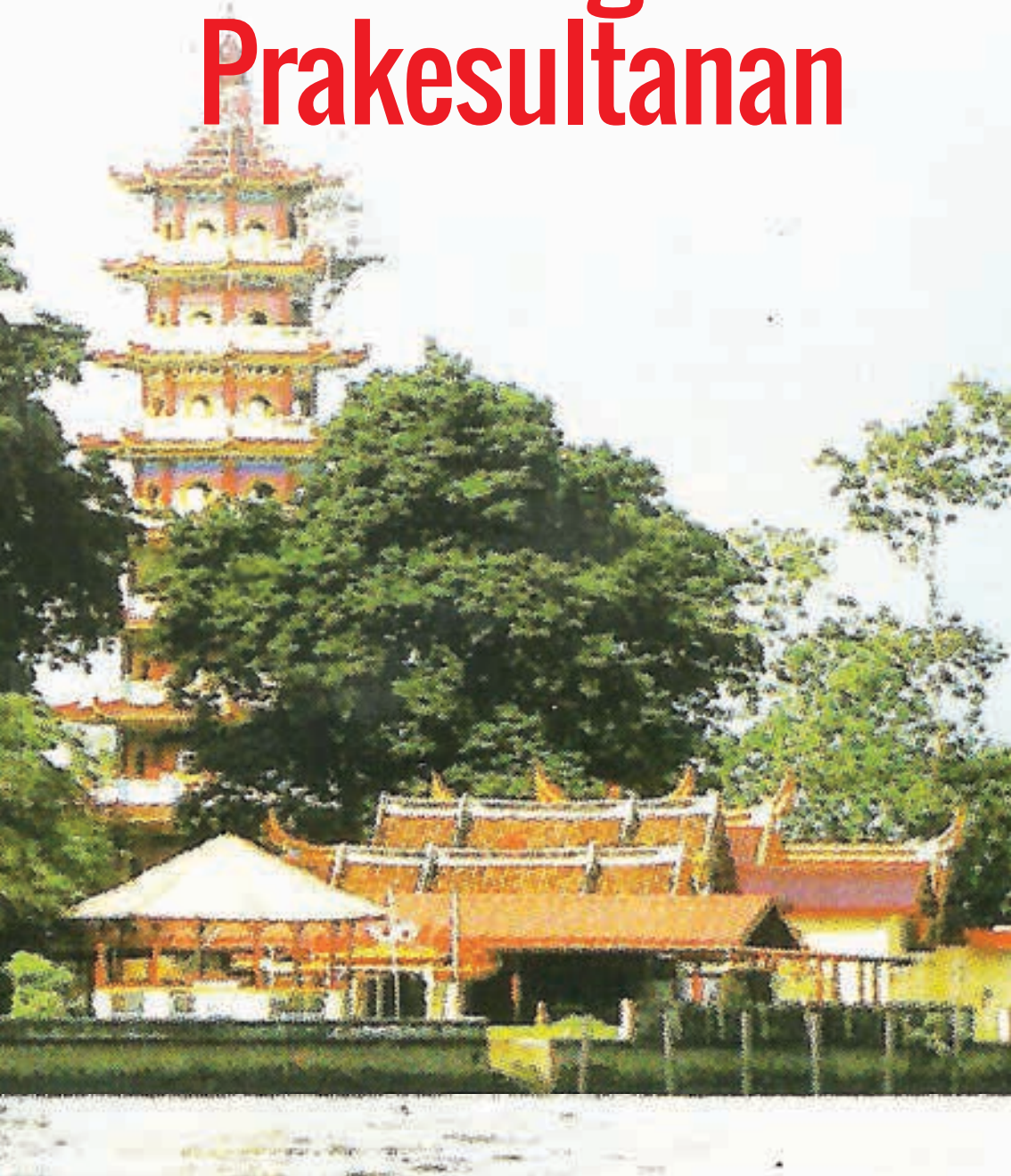
ini untuk memberikan kesempatan yang luas kepada responden yang diwawancarai untuk memberikan jawaban secara panjang lebar. Dengan melakukan wawancara didapatkan sumber pembanding dan sekaligus sebagai sumber pelengkap untuk memperkaya sumber-sumber tertulis.

Organisasi penulisan

Buku ini terdiri atas tujuh bab. Setelah uraian pendahuluan yang tersaji dalam Bab 1, disusul Bab 2 yang memaparkan fondasi sejarah wilayah Kesultanan Palembang dengan fokus Kerajaan Sriwijaya dan Suwarnabhumi. Pada Bab 3 disajikan bahasan tentang Kesultanan Palembang sebagai pusat kekuasaan politik dengan menyajikan fase-fase perkembangannya sejak masa pembentukan hingga masa keruntuhannya. Bab 4 berisi uraian tentang struktur pemerintahan dan masyarakat Kesultanan Palembang Darussalam. Pada Bab 5 disajikan bahasan tentang kehidupan ekonomi pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dengan perhatian khusus pada pertanian, perdagangan dan pertambangan. Bab 6 menyajikan ulasan tentang sistem pertahanan dan keamanan kesultanan untuk memahami kekuatan dan kelemahannya. Bab 7 berisi bahasan mengenai bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi bukti eksistensi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebagian bangunan-bangunan ini masih hadir hingga dewasa ini dan merepresentasikan kekhasan Palembang. Pada bab 8 sebagai uraian penutup disajikan bahasan seni dan budaya masyarakat Palembang dengan fokus khusus pada busana, kuliner, adat-istiadat, dan seni tari.

Bab 2

Palembang Masa Prakesultanan



Palembang merupakan salah satu kawasan di wilayah Nusantara yang secara historis memainkan peranan yang sangat penting. Kawasan ini memperlihatkan perkembangan sejarah yang sangat panjang dan menjadi tempat munculnya salah satu pusat peradaban besar dan tua di Nusantara. Sebelum terbentuknya Kesultanan Palembang Darussalam, di kawasan ini telah muncul kerajaan besar yang mempengaruhi jalannya sejarah di kawasan Asia Tenggara, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Suwarnabhumi. Kedua kerajaan bukan hanya memainkan peran penting dalam sejarah politik di kawasan ini, melainkan juga dalam bidang pelayaran dan perdagangan yang melibatkan kaum dagang dari berbagai bangsa.

Kerajaan Sriwijaya

Pada masa kejayaannya yang berlangsung pada abad ke-7 hingga abad ke-9, Kerajaan Sriwijaya digambarkan sebagai salah satu kerajaan maritim terpenting di Asia Tenggara (Zed, 2003:4). Berbagai peninggalan sejarah telah memberi bukti tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Setidaknya telah ditemukan sepuluh prasasti peninggalan Sriwijaya, yakni Prasasti Kedukan Bukit di Palembang, Prasasti Talang Tua di Palembang, Prasasti Kota Kapur di Sebelah Barat Pulau Bangka, Prasasti Karang Birahi di Jambi, Prasasti Palas Pasemah di Lampung, Prasasti Boom Baru di Palembang, Prasasti Tulang Bawang, Prasasti Bungkuk, dan Prasasti Ligor di Semenanjung Malaya (Mahmud, 2008:20). Temuan-temuan arkeologis yang didapatkan para ahli sejarah kuno seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Talang Tuwo, Prasasti Karang Brahi dan Prasasti Kota Kapur mengantarkan pada keyakinan kuat bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berlokasi di pantai timur Sumatera Selatan

atau wilayah Palembang sekarang ini (Muljana, 1981:65-66).

Pada masa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang besar dan makmur. Kebesaran dan kemakmuran Sriwijaya tergambar jelas dalam kesaksian seorang penulis Arab, Ibnu Rustah, yang menyatakan: “tidak ada negara yang sekaya dan lebih berkuasa serta mendapat upeti dari mana-mana selain Sriwijaya” (Mahmud, 2008:14). Seorang penulis Cina yang lama tinggal di Sriwijaya, I-Tsing menggambarkan Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ketujuh menikmati kemakmuran yang sangat tinggi. “Rakyat memberikan sajian bunga teratai emas kepada arca Budha; dalam upacara agama tampak perabotan dan arca-arca serba emas. Rakyat dari semua lapisan berlomba memberi sedekah kepada para pendeta” (Muljana, 1981:81). Ibukota Sriwijaya, Palembang, digambarkan sebagai sebuah kota yang sangat kaya, menjadi pusat imperium komersial yang menguasai kawasan Nusantara (Furnivall, 1967:2).

Kebesaran Palembang pada masa Kerajaan Sriwijaya tidak terlepas dari peranan yang dimainkannya dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang politik, misalnya, Kerajaan Sriwijaya mempunyai wilayah pengaruh yang sangat luas. Pada masa kejayaannya, wilayah Kerajaan Sriwijaya meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Semenanjung Malaka hingga Thailand Selatan (Supriyanto, 2013:1-2). Luasnya wilayah kekuasaan sekaligus menjadi sumber pemasukan ekonomi yang sangat penting bagi istana. Sebagai pusat kekuasaan, secara rutin Sriwijaya menerima upeti yang wajib dikirimkan oleh negara-negara bawahannya dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Terdapat beraneka ragam upeti yang diserahkan, misalnya dalam bentuk hasil bumi, perak, emas, dan barang-barang berharga lainnya. Dari negara-negara bawahan di pantai timur Semenanjung Malaka, misalnya, penguasa Sriwijaya mendapat upeti berupa emas, perak dan barang-barang porselin. Kiriman-kiriman upeti setiap tahun membuat penguasa Sriwijaya menjadi

kaya raya dan berkelimpahan (Muljana, 1981:81).

Wilayah pengaruh kekuasaan politik Sriwijaya yang luas dimungkinkan oleh keunggulan dalam bidang militer yang dimilikinya untuk melakukan politik ekspansi dan mempertahankan hegemoni. Keunggulannya terletak terutama pada kekuatan armada laut yang besar, yang mengantarkan Sriwijaya mendapat julukan kerajaan maritim besar yang menguasai Nusantara. Jumlah pasukan yang dimiliki Sriwijaya pada tahun 682 telah mencapai sekitar 20.000 orang (Muljana, 1981:80). Perkiraan ini hampir sama dengan informasi yang tertera dalam Prasasti Kedukan Bukit. Disebutkan bahwa dalam perjalanan dari Minanga Temuan menuju ke Palembang Raja membawa 20.000 pasukan dan 200 peti melalui jalur sungai, disertai pula 1.312 pasukan jalan darat (Mahmud, 2008:62). Jumlah pasukan Sriwijaya dapat diduga terus meningkat seiring dengan penaklukan dan perkembangan wilayah pengaruh kekuasaannya. Kemampuan militer yang unggul memungkinkan Kerajaan Sriwijaya menundukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Sebelum tahun 686, Kerajaan Sriwijaya telah menundukkan daerah-daerah seperti Bangka, Melayu, dan Tulang Bawang (Muljana, 1981:75).

Penaklukan atas Kerajaan Melayu mempunyai arti strategis bagi Sriwijaya. Hanya dengan jalan ini Kerajaan Sriwijaya dapat menguasai sepenuhnya lalu lintas perdagangan dan pelayaran yang sangat ramai di Selat Malaka. Dengan penaklukan ini, Melayu tetap berfungsi sebagai pelabuhan, akan tetapi dengan status sebagai milik Kerajaan Sriwijaya. Sebagai taklukan Kerajaan Melayu juga tidak lagi mempunyai hak untuk mengirim utusan ke Cina. Utusan Kerajaan Melayu ke Cina tercatat hanya pada tahun 644, pada periode berikutnya digantikan utusan dari Kerajaan Sriwijaya, misalnya tercatat berlangsung dari tahun 670 hingga 673 (Muljana, 1981:68-69). Setelah menaklukan Melayu sebagai pintu selatan Selat Malaka, Kerajaan Sriwijaya

bermaksud menaklukkan Kedah, yang merupakan pintu utara lalu lintas pelayaran yang berlangsung di Selat Malaka. Dengan menguasai pintu selatan dan pintu utara, Kerajaan Sriwijaya secara penuh memegang kekuasaan atas lalu lintas pelayaran di Selat Malaka (Muljana, 1981:74-75).

Tidak berhenti di situ saja, politik ekspansionis Sriwijaya berlanjut dan diarahkan ke Jawa. Penguasaan atas Jawa juga dinilai penting karena terdapat pusat-pusat kekuasaan yang dapat membahayakan posisi Sriwijaya. Oleh karena itu, pada tahun 686 Sriwijaya mengirim ekspedisi militer untuk memaksakan kekuasaan politiknya atas wilayah Jawa. Ekspedisi militer ini meraih sukses dan Kerajaan Tarumanegara yang berpusat di Jawa Barat berhasil ditaklukan. Kerajaan Tarumanegara kemudian ditempatkan sebagai kerajaan bawahan Sriwijaya hingga tahun 926. Penaklukan Tarumanegara oleh Sriwijaya diperkuat oleh tidak adanya lagi berita tentang utusan-utusan Tarumanegara yang berkunjung ke negeri Cina karena sebagai negara bawahan Tarumanegara kehilangan hak untuk melakukan hal itu, dan digantikan oleh Sriwijaya (Muljana, 1981:75-79).

Di bidang ekonomi, peranan Palembang pada masa Kerajaan Sriwijaya adalah sebagai pemegang kendali jalur perdagangan maritim yang membentang antara Timur Tengah, Afrika bagian timur, dan India, hingga Cina (Mahmud, 2007:7). Tidak berlebihan bila Palembang pernah digambarkan sebagai penguasa jaringan lalu-lintas kapal-kapal “antar Asia”. Palembang pada masa Sriwijaya adalah penghubung antara pusat-pusat perniagaan trans-Asia yang berkembang pada masa itu (Zed, 2003:33). Sebagai penguasa perdagangan dan pelayaran maritim, Penguasa Kerajaan Sriwijaya tidak hanya bergantung pada kapal-kapal dan para pedagang asing yang datang ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah Sriwijaya, melainkan juga secara aktif terlibat dalam pengiriman kapal-kapal dagang ke negara-negara lain dan negara bawahan (Muljana, 1981:81).

Hal ini sudah barang tentu tidak terlepas dari lokasi geopolitik Palembang yang sangat strategis. Kekuasaan yang begitu dominan atas bidang pelayaran dan perdagangan maritim di Selat Malaka membuat Kerajaan Sriwijaya mempunyai sumber pemasukan yang besar. Pemasukan tidak hanya berasal dari cukai yang dikenakan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, tetapi juga dari perdagangan. Aktivitas pelayaran dan perdagangan yang tergantung musim membuat kapal-kapal singgah selama beberapa waktu sambil menunggu angin yang baik. Selama masa menunggu, para pedagang melakukan bongkar muat barang perdagangan. Kedah dan Melayu merupakan kota dagang yang sangat ramai. Berbagai macam komoditas menjadi barang perdagangan penting di tempat ini, di antaranya adalah tulang penyu, gading, batu berharga, mutiara, kayu-kayuan, cendana, gaharu, laka, damar, ratus, setinggi, serta aneka bahan rempah-rempah seperti lada dan pala. Barang-barang perdagangan ini dibeli para pedagang asing dengan emas dan perak atau dengan cara ditukar barang-barang lain, termasuk barang porselen, kain katun, kain sutera, kain brokat, gula atau beras (Muljana, 1981:80-81).

Secara kultural, Kerajaan Sriwijaya telah tampil sebagai pusat pengajaran agama Budha di Asia Tenggara. Beberapa bukti sejarah dapat dikemukakan untuk menunjukkan peranan Sriwijaya dalam hal ini. Ibukota Sriwijaya telah menjadi pusat untuk mempelajari agama Budha. Mereka yang datang belajar di tempat ini tidak hanya berasal dari masyarakat setempat, melainkan juga berasal dari luar negeri seperti Cina dan India. Ribuan bhiksu dijumpai di ibukota kerajaan dan banyak sekali vihara Budha dibangun (Mahmud, 2008:13). Seorang tokoh besar pembaharuan agama Budha di Tibet, Atisha, disebutkan pernah mengenyam pendidikan keagamaan selama dua belas tahun (1011-1023 M) di ibukota Sriwijaya yang berlokasi di tepian Sungai Musi (Vlekke, 2008:47). Palembang bahkan



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Situs Makam-Makam Raja Sriwijaya di Bukit Siguntang.

digambarkan sarjana Cina, I Tsing sebagai kota tujuan peziarah Budha di seluruh kawasan Asia. Puncak kejayaan Sriwijaya sebagai pusat pengetahuan agama Budha terjadi pada masa pemerintahan Datuk Cuda Wani Warman dan Datuk Mara Wijaya Tungga Warman pada akhir abad kesepuluh (Mahmud, 2008:12-13).

Selain menjadi pusat pendalaman agama Budha, peranan kultural Kerajaan Sriwijaya juga tampak dalam kaitan dengan kesusastraan Melayu. Prasasti Kedukan Bukit yang berbahasa Melayu Kuno menjadi bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memberikan sumbangan penting dalam penyebaran Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini menjadi cikal-bakal bahasa resmi di dua negara, yakni Bahasa Indonesia yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Melayu yang menjai bahasa resmi di Malaysia. Semua mahasiswa asing yang belajar di Kerajaan Sriwijaya diwajibkan untuk mengikuti pelajaran Bahasa Melayu terlebih dahulu. Sarjana Cina, I Tsing memperkirakan bahwa terdapat sekitar 150.000 mahasiswa,

baik asing maupun domestik yang belajar di Kerajaan Sriwijaya. Banyak mahasiswa asing datang dari India dan Cina (Mahmud, 2008:13-14).

Kerajaan Suwarnabhumi

Sriwijaya sebagai pusat kekuasaan yang merdeka diperkirakan berakhir pada tahun 775. Pada tahun ini Sriwijaya berada di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra dari Jawa (Muljana, 1981:91). Namun demikian, sebagai sebuah negara bawahan, keberadaan Sriwijaya dengan pusatnya di Palembang tetap ada. Eksistensi Sriwijaya terus berlanjut hingga terbentuknya kerajaan baru pada tahun 853 yang dalam bahasa Cina disebut *San-fo-tsi* dengan Jambi sebagai ibukota (Muljana, 1981:89,179). Hal ini diperkuat oleh sumber-sumber Cina yang menyatakan bahwa Kerajaan *San-fo-tsi* terletak di muara Sungai Batang Hari di pantai timur Sumatera Selatan dan raja bermukim di *Chan-pi* (Jambi). Pada tahun yang sama sumber Cina mencatat datangnya utusan yang datang dari Kerajaan *San-fo-tsi* atau Suwarnadwipa, yang juga disebut Suwarnabhumi. Palembang atau Sriwijaya adalah negara bawahan Suwarnabhumi, yang didirikan oleh Balaputradewa setelah tersingkir dari Jawa menyusul kealahannya dalam perang melawan Rakai Pikatan (Muljana, 1981:180-182).

Berdasarkan sumber sejarah Cina yang ditulis Chou Ku-fei, Kerajaan Suwarnabhumi mempunyai 15 negara bawahan. Palembang adalah salah satunya, sedangkan negara-negara bawahan lainnya adalah Pahang, Trengganu, Langkasuka, Kelantan, Kuala Brang, Cerating, Paka, Tambralingga, Grahi, Sunda, Muara Kampe, Lamuri, Srilangka (Muljana, 1981:189). Pemindehan pusat kekuasaan dari Palembang ke Jambi didasari

pertimbangan lokasi Jambi dinilai lebih strategis dibanding Palembang dalam konteks penguasaan lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka (Muljana, 1981:186). Pergeseran penguasa Suwarnabhumi dari Wangsa Syailendra ke Wangsa Malayapura tidak mengubah posisi penting Jambi sebagai ibukota kerajaan.

Di bawah raja-raja Wangsa Malayapura, masa Kerajaan Suwarnabhumi, digambarkan oleh seorang penulis Cina Chou Ku-fei, sebagai era kemajuan yang pesat. Suwarnabhumi dinyatakan sebagai negara yang menjadi tempat persinggahan perahu-perahu asing dalam lalu lintas pelayaran dan perdagangan yang membentang dari negara-negara di kawasan Asia barat ke negeri Cina di bagian Timur dan sebaliknya, termasuk yang berasal dari Jawa. Tatkala singgah di pelabuhan Suwarnabhumi, kapal-kapal asing mengunggah beraneka macam produk setempat seperti tulang penyus, kapur barus, kayu gaharu, cendana, lada, cengkeh, kardamom, damar, mutiara, setinggi, minyak wangi, bunga gardenia, dan sejumlah produk lain. Produk-produk ini dibeli dengan cara menukar dengan beraneka ragam barang terutama adalah emas, perak, besi, porselin, kain sutra, kain brokat, beras, gula, daging, ikan kering, dan akar-akaran (Muljana, 1981:226)

Raja Kertanegara yang berkuasa di Singasari melihat Kerajaan Suwarnabhumi yang makmur dan kuat sebagai saingan dan ancaman. Oleh karena itu, dikirimlah ekspedisi militer Singasari untuk menaklukkan Suwarnabhumi, yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Menyusul terjadinya kekacauan politik di Jawa yang melibatkan Singasari dan Kediri, serta pendirian Majapahit, membuat Suwarnabhumi untuk sementara terlepas dari cengkeraman Jawa. Penarikan pasukan Singasari memberi kesempatan bagi penguasa Suwarnabhumi untuk bangkit. Keleluasaan ini tidak berlangsung lama menyusul keberhasilan konsolidasi kekuasaan Majapahit, yang diikuti

dengan politik ekspansionis yang dijalankan Mahapatih Gadjah Mada. Penaklukan oleh pasukan Majapahit segera diikuti dengan pembagian Suwarnabhumi menjadi tiga bagian, yaitu Dharmasraya, Jambi, dan Palembang (Muljana, 1981:308).

Upaya-upaya untuk melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit berakibat pengiriman pasukan Majapahit untuk melakukan penumpasan terhadap kekuatan pemberontak pada tahun 1397 yang diikuti dengan pengusiran Parameswara dari Palembang. Untuk menegaskan kekuasaannya, penguasa Majapahit, Raja Wikramawardhana, mengangkat seorang wakil yang ditugasi untuk mengawasi urusan perdagangan di Palembang. Akan tetapi, wakil penguasa Majapahit tersebut rupanya tidak begitu mampu menguasai keadaan sepenuhnya. Dalam situasi tersebut muncul perompak-perompak Cina, yang dibantu kelompok-kelompok perompak dari Pulau Sulu (Filipina), menyerbu Palembang di bawah pimpinan Liang Tau-ming. Dengan ribuan pengikutnya dari Kanton dan Fukien, Liang Tau-ming berhasil melumpuhkan benteng-benteng pertahanan yang dipergunakan untuk melindungi Palembang, sehingga kemudian mampu menguasai Palembang selama beberapa waktu (Muljana, 1981:311-312).

Dihadapkan pada tekanan kekuasaan para perompak Cina, banyak orang Palembang kemudian memutuskan untuk pindah ke tempat lain yang dianggap lebih aman. Sebagian orang Palembang menyelamatkan diri dengan pindah ke Semenanjung Malaya. Sebagian lainnya pergi ke berbagai tempat di Jawa, seperti Kudus, Jepara, Demak. Ada pula yang menyingkir ke pedalaman Palembang untuk mengisolasi diri dengan mendirikan kubu-kubu (benteng), sehingga kemudian dikenal sebagai orang kubu dan orang Palembang pada masa kemerdekaan biasa menyebut mereka sebagai “suku anak dalam” (Mahmud, 2008:33-34).

Bab 3

Kesultanan Palembang Darussalam



Masa Pembentukan

Asal usul nama Palembang mempunyai beberapa versi. Salah satu versi mengaitkan Palembang dengan kata dalam bahasa Jawa, *limbang*, yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lain. Pemisahan dilakukan dengan bantuan alat berupa keranjang kecil untuk mengayak tanah ber kandungan logam atau biji di aliran sungai. *Pa* adalah kata depan yang dipakai orang Jawa untuk menunjuk suatu tempat berlangsungnya usaha atau keadaan. Versi ini terkait erat dengan peran Palembang pada masa lalu sebagai tempat mencuci emas dan biji timah. Versi lain menghubungkan Palembang dengan kata *lemba*, yang berarti tanah yang dihanyutkan air ke tepi (Van Sevenhoven, 1971:12). Kedua versi ini secara jelas mengindikasikan pentingnya air sebagai elemen lanskap lingkungan Palembang.

Hal tersebut tidaklah terlalu berlebihan karena dalam berbagai sumber sejarah, Palembang sering dilukiskan sebagai tempat yang banyak airnya. Dengan kondisi demikian, tanah kering lebih sulit untuk dijumpai. Dalam penggambarannya tentang Sumatera, seorang penulis Inggris, William Marsden, menuliskan bahwa Palembang berada di dataran yang banyak dijumpai rawa-rawa, dengan letak beberapa mil di atas delta sungai. Dituliskan pula lebih jauh:

“Palembang selalu digenangi air sungai, terutama ketika air pasang sehingga tak memungkinkan untuk membangun jalan.... Hampir seluruh perhubungan dilakukan dengan perahu. Perahu-perahu yang berjumlah ratusan meluncur di sungai ke segala penjuru” (Marsden, 2008:333).



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Rumah Rakit di Sungai Musi Palembang.

Rakyat digambarkan hidup dalam rumah-rumah rakit terbuat dari kayu yang diikatkan dengan tali-tali pada tiang-tiang. Pada saat air sungai mengalami arus pasang, rumah-rumah rakit tersebut akan terapung. Bila ingin pindah ke tempat lain, penduduk tinggal mencabut tiangnya dan mereka akan pindah bersama-sama dengan rumahnya tanpa mengalami kesulitan sama sekali (Hanafiah, 1995:102-103). Aktivitas kehidupan masyarakat Kerajaan Sriwijaya maupun Kesultanan Palembang Darussalam terkait erat dengan jaringan sungai dan perairan ketimbang dengan daratan (Supriyanto, 2013:3).

Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya menempatkan wilayah Palembang dalam bayang-bayang ancaman pusat-pusat kekuasaan politik lain di sekitarnya yang lebih kuat. Selama beberapa abad pusat-pusat kekuasaan politik di Jawa secara bergantian berusaha menempatkan Palembang sebagai wilayah bawahannya. Upaya-upaya untuk melepaskan diri dari hegemoni kerajaan-kerajaan di Jawa memunculkan respons

berupa pengiriman ekspedisi-ekspedisi militer kerajaan Jawa ke Palembang. Ekspedisi militer berlangsung berulang-kali, misalnya terjadi pada tahun 1275 pada masa Kertanegara berkuasa di Singasari, tahun 1350 dan 1397 pada masa Kerajaan Majapahit (Hanafiah, 1995:113).

Pada masa akhir Kerajaan Majapahit, penguasaan wilayah Palembang berada di tangan Ario Dillah atau yang juga sering disebut dengan nama Ario Damar (1455-1486). Dia adalah salah seorang keturunan Prabu Brawijaya V yang bertahta di Majapahit. Ario Dillah dengan demikian bertindak sebagai wakil penguasa Majapahit di Palembang. Ario Dillah mendapat hadiah Putri Champa, istri Prabu Brawijaya yang menganut Islam. Pada saat dihadiahkan kepada Ario Dillah, Putri tengah dalam keadaan hamil. Anak tersebut setelah lahir dinamai Raden Fatah, yang nantinya menjadi pendiri Kesultanan Demak (Hanafiah, 1996:3-5).

Setelah melewati masa kecil di Palembang, tatkala menanjak dewasa Raden Fatah pergi ke Majapahit bersama dengan Raden Kusen, saudaranya. Keduanya lantas membuka pemukiman di Desa Bintoro, yang menjadi cikal-bakal Kesultanan Demak. Atas dukungan Sunan Ampel, yang juga mertuanya, Raden Fatah mengangkat diri sebagai Sultan Demak. Kekuatan militer Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa terus tumbuh dengan pesat sehingga akhirnya mampu menaklukkan Kerajaan Majapahit. Dengan dimasukkannya Majapahit di bawah kekuasaan Kesultanan Demak, Raden Fatah kemudian bergelar Senopati Jimbun Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panata Gama. Gelar ini sekaligus menegaskan betapa pentingnya Palembang bagi penguasa Demak yang pertama itu. Sebagai wakil Kesultanan Demak di Palembang adalah Pati Unus, anak sultan sendiri. Dia dikirim ke Palembang pada tahun 1528 untuk menggantikan Ario Dillah yang meninggal dunia (Mahmud, 2007:35-36).

Palembang pada paruh pertama abad ke-16 dilukiskan oleh Tome Pires, seorang petualang dari Portugis, sebagai negeri terbaik bawahan Demak. Palembang mempunyai hubungan perdagangan dengan Malaka, dengan transaksi jual-beli berskala besar dengan Pahang. Palembang mempunyai jung dan kargo dalam jumlah besar. Setiap tahun antara sepuluh hingga dua belas jung tiba di Malaka, penuh dengan muatan beras dan sayur-mayur. Komoditas dagang lain juga banyak dimuat, seperti misalnya kapas, rotan, emas, besi, lilin, madu, daging, serta bawang merah dan bawang putih dalam jumlah yang sangat besar, bahkan juga kemenyan hitam (Pires, 2015:219-220).

Kemelut perebutan kekuasaan di Demak antara Hadiwijaya dan Arya Penangsang berakhir dengan kemenangan Hadiwijaya. Setelah memenangkan perebutan kekuasaan, Hadiwijaya kemudian mendirikan Kerajaan Pajang. Sebagian pengikut Arya Penangsang yang tidak mau menyerah memutuskan untuk menyingkir ke Palembang di bawah pimpinan Ki Gede ing Suro, yang kemudian menjadi penguasa Palembang dari tahun 1587 hingga 1604. Dia digantikan oleh Ki Mas Dipati, yang memerintah Palembang pada kurun waktu 1604-1609 (Hanafiah, 1995:138, 147). Pada periode 1609-1627 Kesultanan Palembang diperintah oleh Made ing Suko (1609-1627), yang diteruskan oleh pemerintahan Pangeran Madi Alit (1627-1629), Pangeran Seda ing Pura (1629-1636), Pangeran Seda ing Kenayan (1636-1650), serta Ratu Sinuhun atau Pangeran Seda Ing Pasarean (1651-1552), dan Pangeran Seda ing Rejek (1652-1659) (Hanafiah, 1995:147). Berikut ini nama-nama para penguasa Palembang dari masa akhir Majapahit dan selama masa Kesultanan Palembang Darussalam.

Para Penguasa Palembang 1455-1823

NO	NAMA PENGUASA	PERIODE
1	Ario Dillah/Ario Damar	1455-1486
2	Pangeran Sedo Ing Lautan	? - 1528
3	Ki Gede ing Suro Tuo	1528-1545
4	Ki Gede ing Suro Mudo	1546-1575
5	Ki Mas Adipati	1575-1587
6	Pangeran Madi ing Angsoko	1588-1623
7	Pangeran Madi Alit	1623-1624
8	Pangeran Seda in Pura	1624-1630
9	Pangeran Seda ing Kenayan	1630-1642
10	Pangeran Seda Ing Pasarean	1642-1643
11	Pangeran Mangkurat Seda ing Rejek	1643-1659
12	Kiai Mas Hindi (Sultan Abdurrahman)	1662-1706
13	Sultan Muhammad (Ratu) Mansyur Jayo ing Lago	1706-1718
14	Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno	1718-1727
15	Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo	1727-1756
16	Sultan Ahmad Najamuddin I	1756-1774
17	Sultan Muhammad Bahauddin	1774-1803
18	Sultan Mahmud Badaruddin II	1803-1821
19	Sultan Husin Dhiauddin/ Sultan Ahmad Najamuddin II (adik Mahmud Badaruddin II)	1812-1813
20	Sultan Ahmad Najamuddin III (putra Mahmud Badaruddin II)	1819-1821
21	Sultan Ahmad Najamuddin IV (putra Sultan Ahmad Najamuddin II)	1821-1823

SUMBER: SOETADJI (1996:27-30)

Padamasapemerintahan Pangeran Seda ing Rejek, Palembang berusaha menjalin hubungan dengan Mataram. Hal ini dilakukan seiring dengan munculnya kesulitan-kesulitan sehubungan



SUMBER: MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II, REPRO DOKUMENTASI TIM PENELITI 2016.

Lukisan Keraton Kuto Gawang.

dengan kehadiran VOC di Palembang. Sejak tahun 1655 VOC telah menempatkan perwakilan dagang di Palembang dengan menunjuk Anthonij Boeij. Tindakan-tindakan Boeij khususnya penahanan jung Cina dan perampasan lada yang dimuat, serta pembakaran kapal di Pulau Kembaro telah menyulut amarah Pangeran Seda ing Rejek. Meskipun Boeij kemudian digantikan oleh Cornelis Ockersz, ketidakharmonisan hubungan antara VOC dan penguasa Palembang tidak mereda. Kunjungan Ockersz yang kedua dengan Kapal Jacatra pada tanggal 25 Juni 1658 menyulut terjadinya bentrokan dan tembak-menembak akibat tindakan Ockersz menahan beberapa kapal, termasuk salah satunya milik putera mahkota Mataram (Hanafiah, 1995:179-181). Situasi yang memanas memang telah dicoba diredakan melalui perdamaian, namun hal ini tampaknya hanya terjadi di permukaan. Dendam dan amarah ternyata belum menghilang, terbukti pada tanggal 22 Agustus 1658 Kapal Jacatra dan De Watcher diserbu. Ockersz dan para pengikutnya terbunuh, jumlahnya mencapai 42 orang, sedangkan 28 orang

lainnya disandera, dan sisanya sebanyak 24 orang meloloskan diri ke Jambi (Hanafiah, 1995:182).

Akibat insiden tersebut, VOC menyerbu dan membakar Keraton Kuto Gawang. Pembakaran dilakukan pasukan Belanda di bawah pimpinan Laksamana John van der Laen dan John Truytman terjadi pada 24 November 1659 (Soetadji, 1996:9). Serbuan dan pembakaran dimaksudkan Belanda sebagai tindakan membalas dendam atas serangan yang dilakukan terhadap dua kapal yacht Belanda, Jacatra dan Watchman, serta pembunuhan atas semua awak kapalnya. Ekspedisi militer Belanda melibatkan sejumlah kapal, termasuk Orange sebagai kapal komando, ditopang dengan kapal Postilion, Molucco, Arms of Batavia, dan Charles. Di samping itu, terdapat pula tiga kapal *galleots*, yakni Appletree, Hour Batavia, dan Hammebiel. Serbuan mengikutsertakan pula kapal-kapal *chaloops*, yakni Crab, Tronk, dan Flying Dear, dengan 600 awak pelaut dan 700 tentara darat. Dalam perjalanan di Sungai Musi, armada berjumpa dengan kapal-kapal *yacht*, Bloemendahl, Koukerk,



SUMBER: DIORAMA MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG, DOKUMENTASI TIM PENELITI 2016.

Pembakaran Keraton Kuto Gawang Pada 1659.

dan Cat, dua kapal *chaloop* lainnya, Cony dan Koelong (Soetadji, 1996:64-65).

Penguasa Kesultanan Palembang dan pasukannya berusaha keras melakukan perlawanan. Pertahanan ditambah dengan membuat benteng dari tanah di tepi Sungai Musi dan hilir Pulau Kembaro, untuk memperkuat benteng yang sudah ada, yakni Benteng Bamagangan, Benteng Martapura dan Benteng Menapura. Benteng-benteng tersebut dilengkapi dengan senjata meriam. Pada Benteng Pulau Kembaro dipasang 14 buah meriam, sedangkan pada Benteng Bamagangan diperkuat dengan 24 buah meriam. Sementara itu, Benteng Menapura diperkuat dengan 9 buah meriam (Hanafiah, 1996:90). Di sepanjang sungai di antara benteng-benteng dipasang tonggak-tonggak berlapis, sebagian tonggak melintang di tengah sungai dimana di pasang rakit-rakit dengan bahan yang mudah terbakar untuk menghancurkan kapal-kapal lawan.

Meledaknya Benteng Bamagangan tanpa diketahui sebabnya telah meruntuhkan moral prajurit Palembang, ditambah lagi dengan meledaknya granat-granat tangan yang menimbulkan kebakaran pada rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Ancaman kobaran api dan pasukan Belanda memaksa pasukan Palembang mengundurkan diri. Hal ini menciptakan keleluasaan bagi Belanda untuk membakar ludes seluruh kota dan Keraton Kuta Gawang pada 24 November 1659 (Soetadji, 1995:9, Hanafiah, 1995:187). Dari peperangan dengan Palembang ini, pasukan Belanda menyita 75 buah meriam berukuran besar, 150 meriam berukuran kecil terbuat dari bahan perunggu, dan 295 bedil laras panjang, serta sejumlah amunisi. Serangan ini pula telah membuat Pangeran Seda ing Rejek terpaksa meninggalkan istananya, melarikan diri ke daerah Indralaya selama beberapa tahun hingga meninggal dunia di Sakatiga (Hanafiah, 1995:188).

Masa Kebangkitan dan Kejayaan

Berangkat dari puing-puing kehancuran, Ki Mas Hindi berusaha bangkit dan membangun kembali Kesultanan Palembang. Mempertimbangkan posisinya yang masih lemah, Ki Mas Hindi mengambil sikap moderat baik terhadap Belanda maupun Mataram. Untuk mendapatkan dukungan Mataram, Ki Mas Hindi mengirim utusan ke Mataram beberapa kali meskipun disambut dengan dingin oleh penguasa Mataram. Jalan moderat juga diambil dalam hubungan dengan Belanda. Beberapa kontrak dengan Belanda disepakati dengan harapan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam kontrak tahun 1662, misalnya, Belanda diijinkan oleh pihak kesultanan untuk membangun loji di Sungai Alur, berseberangan dengan Keraton Palembang yang dipindahkan dari lokasi lama ke Beringin Janggut (Hanafiah, 1995:191-193).

Setelah posisinya lebih kuat, Ki Mas Hindi mengangkat diri sebagai penguasa Palembang Darussalam dengan bergelar Sultan Abdurrahman. Gelar ini dipakainya sejak tahun 1675 dan hal ini menunjukkan keinginannya untuk menyamai Sultan Agung dari Mataram yang mendapatkan gelarnya dari penguasa Mekah pada 1641 (Soetadji, 1996:10). Pemakaian gelar “sultan” ini meletakkan sebuah tradisi baru di lingkungan Keraton Palembang karena gelar-gelar yang dipakai oleh para penguasa sebelumnya adalah Ki Gede, Tumenggung, Pangeran, dan Pangeran Tumenggung (Hanafiah, 1995:196). Gelar-gelar lama yang lebih sederhana ini semula dimaksudkan agar tidak melampaui gelar tertinggi yang berlaku di Mataram. Perubahan yang terjadi dengan pemakaian gelar sultan oleh Ki Mas Hindi dan bahkan kemudian gelar susuhunan atau sunan setelah menyerahkan tahta kepada pewarisnya secara eksplisit menunjukkan keinginannya untuk melepaskan diri dari bayang-

bayang dan keterikatan ideologis maupun politis dengan Kerajaan Mataram di Tanah Jawa (Hanafiah, 1996:37).

Bahkan lebih jauh lagi, guna menandingi kebesaran sultan Mataram, Sultan Abdurrahman memaklumkan diri sebagai pemimpin umat Islam dengan bergelar Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam. Hal ini sekaligus berarti bahwa agama Islam menjadi agama resmi Kesultanan Palembang Darussalam. Masa pemerintahan Sultan Abdurrahman relatif tenang dan panjang, yakni berlangsung dari tahun 1662 sampai 1706 (Soetadji, 1996:38-39). Pada masa bawah pemerintahannya, ajaran-ajaran Islam mulai meresap dan menjadi acuan dasar dalam penataan struktur Kesultanan Palembang Darussalam, termasuk dalam sistem peradilan yang didasarkan pada Al-qur'an (Abdullah, 1987:202). Melalui perkawinan politik dengan seorang putri dari penguasa Bangka, Sultan Abdurrahman akhirnya mendapatkan warisan Kepulauan Bangka (Hanafiah, 1995:169). Masa pemerintahan Sultan Abdurrahman yang relatif tenang dan berlangsung lebih dari 40 tahun membawa Palembang pada kemajuan dan kemakmuran yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat kesultanan (Soetadji, 1996:10).

Palembang menjadi ibukota Kasultanan Palembang Darussalam dari tahun 1553 hingga 1814 (Zed, 2003:28). Masa kejayaan Kesultanan Palembang berlangsung pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa kejayaannya ini Palembang tampil sebagai poros penting dalam jaringan perdagangan di perairan Malaka dan pantai utara Jawa. Penulis Inggris, Marsden, menggambarkan pelabuhan Palembang merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Banyak kapal berkunjung di pelabuhan ini, dari Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi. Beragam komoditas dagang dibawa oleh kapal-kapal tersebut masuk ke Palembang seperti beras, garam, dan bahan pakaian. Orang-orang Belanda mengumpulkan lada dan timah dari Palembang sesuai dengan kontrak antara VOC dengan Sultan Palembang. Pengangkutan lada dan timah dari



SUMBER: DOKUMEN YKPD, 2016

Stempel Kesultanan Palembang Darussalam.

Palembang masing-masing kurang lebih mencapai 2 juta pon (Marsden, 2008:330).

Palembang sekaligus muncul sebagai kawasan yang dinamis dalam perkembangan Islam. Beberapa ulama besar bereputasi internasional muncul dari Palembang, di antaranya yang paling menonjol adalah Syeikh Abdussomad al-Palimbani, seorang ulama keturunan Arab dengan pengaruh besar di Keraton Palembang dan Dunia Melayu (Jumhari, 2010:5-6). Syeikh Abdussomad al-Palimbani aktif mengembangkan agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803). Dia menerjemahkan karyanya yang berjudul *Sair al-Salikin* dan *Hidayat al-Salikin*. Karya-karyanya ini masih banyak mendapat apresiasi dan dibaca hingga dewasa ini di negara-negara Asia Tenggara terutama di Filipina Selatan, Thailand Selatan, Brunai, Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Selain itu, Al-Palimbani juga dipandang berjasa dalam menginspirasi semangat patriotisme dan perlawanan melawan penjajah lewat korespondensi yang dijalinnya dengan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta dan Pangeran Mangkunegara di Surakarta (Harun, 1995:48-49)

Tokoh-tokoh ulama besar Palembang lainnya yang berperan penting sebagai penasihat sultan, misalnya Kyai Haji Kiagus Khotib Komad pada masa Sultan Abdurrahman dan Tuan Fakih Jamaluddin pada masa Sultan Muhammad Mansyur (Mahmud, 2008:104-105). Kiagus Khotib Komad adalah seorang ahli tafsir Alquran dan Fikih, sedangkan Tuan Fakih Jalaludin mengajar ilmu Alquran dan ilmu Ushuluddin. Ulama ini memainkan peran penting dalam kegiatan dakwah hingga masa pemerintahan Sultan Mahmud Jayo Wikramo (Harun, 1995:48). Kaum ulama memang mempunyai kedudukan istimewa dalam Kesultanan Palembang Darussalam. Tempat pemakaman para ulama yang berdekatan dengan makam sultan memberikan bukti tentang kedudukan istimewa kaum ulama dalam di Keraton Palembang (Mahmud, 2008:104-105).

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I Kota Palembang dibangun menjadi sebuah kota modern. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penataan kampung-kampung dan jalan-jalan. Sultan Mahmud Badaruddin I juga meletakkan pembangunan bangunan-bangunan monumental Palembang abad ke-18, termasuk diantaranya Bangunan Kuto Lamo dan Kuto Besak pada tahun 1737, serta bangunan Masjid Agung Palembang (Soetadji, 1996:10-11). Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I, VOC memaksakan kontrak monopoli dalam perdagangan lada dan timah dari Kesultanan Palembang. Dengan pemberlakuan hak monopoli ini, para pedagang non-Belanda khususnya Inggris dan Portugis tertutup peluangnya untuk terlibat dalam perdagangan komoditas tersebut (Mahmud, 2008:48). Pemberian hak monopoli kepada

VOC merupakan bentuk kompromi taktis yang dilakukan untuk melonggarkan tekanan dari VOC, sehingga Sultan Mahmud Badaruddin I mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mempersatukan keluarga kesultanan yang terpecah-belah (Hanafiah, 1989:2).

Keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pusat politik menjadi lebih kuat tatkala di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (1774-1803). Selama memegang tampuk kekuasaan, Sultan Muhammad Bahauddin I berhasil membangun armada laut untuk mengamankan perdagangan maritim di jalur Selat Malaka dan menegakkan kekuasaan Palembang atas Bangka dan Belitung. Sultan juga membangun benteng pertahanan di Muntok, serta melanjutkan pembangunan Kuto Besak yang telah diawali oleh kakeknya, Sultan Mahmud Badaruddin I. Capaian lainnya adalah diselesaikannya sengketa perbatasan dengan Lampung dan kerawanan-kerawanan yang sering terjadi wilayah lalu lintas perdagangan dan penanaman lada. Kekayaan dan kemakmuran Palembang tambah meningkat berkat aktivitas perdagangan yang dilakukannya dengan pedagang-pedagang asing lain. Bukan itu saja, di bawah Sultan Muhammad Bahauddin, Kesultanan Palembang menjadi pusat sastra agama Islam yang terkemuka di Nusantara berkat pengembangan syiar Islam melalui sastra Melayu, dan mengambil-alih peran yang sebelumnya dimainkan oleh Aceh yang tengah mengalami kemerosotan (Hanafiah, 1989:110-111).

Setelah Sultan Muhammad Bahauddin meninggal dunia, kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam diserahkan kepada puteranya yang bernama Pangeran Ratu yang kemudian bergelar Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin II. Sultan yang pada masa kecilnya bernama Raden Hasan ini dinobatkan sebagai sultan pada tahun 1803 Masehi (1218 H) dan pada tahun 1819 juga memakai gelar Kholifatul Mukminin (Nato



SUMBER: KOLEKSI SULTAN MAHMUD BADARUDDIN III PRABU DIRADJA, REPRO DOKUMENTASI
TIM PENELITI, 2016

Sultan Mahmud Badaruddin II

Dirajo, 1984:1).

Sultan Mahmud Badaruddin II dikenal sebagai figur penguasa Palembang yang mempunyai keunggulan menonjol. Seorang penulis Belanda, W.L. de Sturler melukiskan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai “seorang pemimpin yang memiliki kepribadian yang kuat, ksatria, pemberani, jantan, cepat bertindak, cekatan, memanfaatkan waktu yang tepat, teguh pendirian” (dalam Nato Dirajo, 1984:3). Mahmud Badaruddin II dari Palembang ini juga digambarkan sebagai seorang penguasa

yang pandai dalam berdiplomasi, cerdik dan berwibawa, terdidik dan ahli dalam strategi perang. Badaruddin II juga diakui sebagai seorang organisator yang sangat ulung, serta ahli sastra yang produktif (Nato Dirajo, 1984:3; Mahmud, 2008:58). Kualitas yang dimiliki dalam bidang sastra tampak dari karya-karya yang dihasilkannya, misalnya *Hikayat Martalaya*, *Syair Nuri*, *Pantun Sultan Badaruddin*, dan *Syair Perang Menteng* (Mahmud, 2008:55). Menurut Drewes, *Syair Nuri* dan *Pantun* ditulis oleh Sultan Mahmud Badaruddin II ketika menjalani kehidupan di tempat pengasingannya di Ternate (Rahim, 1998:95).

Di antara semua kualitas yang dimilikinya, Sultan Mahmud Badaruddin II lebih luas dikenal pada masa kemerdekaan sebagai sosok pemimpin-pejuang yang sangat gigih dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Tidak mengherankan, seorang penulis Barat, H.A. Lovell menggambarkan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai “seekor harimau yang tak dapat dijinakkan” (Nato Dirajo, 1984:3). Hal ini tampak jelas dari serangkaian pertempuran yang dilakukannya



SUMBER: KOLEKSI MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II, REPRO DOKUMENTASI TIM PENELITI 2016

Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II Dibawa ke Kapal Menuju ke Tempat Pengasingan.

dalam perang Palembang melawan kekuatan asing, yakni pada tahun 1812 melawan pasukan Inggris dan pada tahun 1819, serta pada tahun 1821 melawan pasukan pemerintah kolonial Belanda. Sudah sepantasnya bahwa di kemudian hari pada masa kemerdekaan, Sultan Mahmud Badaruddin II mendapat anugerah penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu Pahlawan Kemerdekaan Nasional yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 63/TK/1984 (Data dan Informasi, 1987:79; Nawiyanto dan Endrayadi, 2015:14).

Masa Berakhirnya Kesultanan dan Pengaruhnya

Masa berakhirnya Kesultanan Palembang tidak terpisahkan dari keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Badaruddin II untuk menghentikan perlawanannya. Dengan kekuatan militer yang sangat besar di bawah pimpinan Jenderal Mayor Hendrik Markus Baron De Kock. Belanda mencoba membalas kekalahannya dan berusaha mengakhiri perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II. Pengerahan kekuatan militer secara besar-besaran tidak menjamin penaklukan Palembang berlangsung dengan mudah karena pihak Kesultanan Palembang juga telah mempersiapkan diri dengan memperkuat benteng pertahanan, persenjataan, maupun komando dan personelya (Hanafiah, 1986:127-129).

Ketegangan antara kedua belah pihak mulai meningkat sejak 9 Juni 1821. Kontak-kontak senjata dan pertempuran yang pecah pada pada hari-hari berikutnya memperlihatkan Palembang tidak mudah ditundukkan, bahkan Belanda berada di posisi yang sulit karena banyak jatuh korban di pihaknya.

Pihak Belanda pun kemudian menggunakan muslihat berupa serangan mendadak pada hari Minggu. Hal ini tidak diduga oleh pihak Palembang akan dilakukan pihak Belanda mengingat adanya kesepakatan penghentian pertempuran pada hari Jumat dan Minggu sebagai bentuk penghormatan kedua belah pihak. Dengan menggunakan muslihat ini dan upaya habis-habisan, pasukan Belanda akhirnya berhasil menguasai Benteng Manguntama dan mengunci posisi Palembang. Peringatan pun dilayangkan Belanda kepada Sultan Mahmud Badaruddin II dengan pilihan menghentikan perlawanan atau menghadapi pembumihangusan keraton, Kota Palembang dan rakyatnya (Hanafiah, 1986:144-145).

Dihadapkan pada pilihan yang dilematis tersebut, akhirnya Sultan Mahmud Badaruddin II menerima pilihan berkorban demi keselamatan rakyatnya. Pilihan ini membuatnya harus menyerahkan kekuasaan kepada keponakannya, Prabu Anom (Sultan Najamuddin IV) dan ayahnya, Husin Dhiauddin (Susuhunan Ahmad Najamuddin II), serta menerima hukuman berupa pengasingan dirinya di Ternate pada tahun 1821, dan menjalani hidup jauh dari rakyat dan para pendukungnya. Dalam masa pengasingannya, Sultan Mahmud Badaruddin II diikuti oleh keempat istrinya, yakni Ratu Anom Kosima, Mas Ayu Ratu Ulu, Mas Ayu Ratu Ilir, dan Ratu Alit (Nato Dirajo, 1984:6). Sultan Badaruddin II meninggal di Ternate pada 26 November 1852 setelah kurang lebih selama 32 tahun hidup di pengasingan dan dimakamkan di Ternate (Nato Dirajo, 1984:6).

Pada tahun 1864 pemerintah kolonial memulangkan sebanyak 18 putera-puteri Sultan Mahmud Badaruddin II dari Ternate ke Palembang. Mereka yang dipulangkan di antaranya adalah Pangeran Prabu Wijayo Husin, Pangeran Prabu Menggalo Umar, Pangeran Prabu Wikramo Abdurrahman, Pangeran Prabu Nato Menggalo, Pangeran Kesumo Syekh, Pangeran Kesumo Dimekayo Hanan, Pangeran Suto Wijayo

Usman, Pengeran Suto Kramo Akil, dan Pangeran Putra Dinato Ali (Nato Dirajo, 1984:8). Pemulangan mereka bukan berarti berakhirnya tindakan pengasingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda terhadap keturunan Sultan Mahmud Badaruddin II dan para pengikutnya yang setia.

Sikap anti Belanda yang terus mereka tunjukkan di Palembang dengan penggalangan rencana perlawanan membuat Residen Tobias memerintahkan kembali penangkapan sejumlah keturunan Sultan Mahmud Badaruddin II. Selanjutnya, mereka dibuang ke berbagai tempat di Hindia Belanda. Raden Haji Syarif Abdullah, misalnya, dibuang ke Tondano, sedangkan Raden Muhammad Munzir, Raden Hasan, Raden Muhammad Amin, Raden Muhsin, Raden Manan dibuang ke Manado. Sebagian lainnya dibuang ke Ternate diantaranya Raden Abdul Karim, Raden Abdul Majid, Raden Nangcik, Raden Muhammad Akib, Raden Hasan, Raden Muhammad Ali, Raden Adnan, dan Raden Husin diasingkan ke Ternate. Raden Muhammad Napis, Raden Abdurrahman, Raden Nak, Raden Muhammad Mansur, dan Raden Amja dibuang ke Ambon. Ada pula keturunan sultan Palembang dan pengikutnya yang dibuang ke Kupang dan Rote (Nato Dirajo, 1984:8a-8c). Pembuangan-pembuangan tersebut menjadi faktor yang menjelaskan luasnya penyebaran orang-orang Palembang dan keturunan penguasa Kesultanan Palembang Darussalam khususnya Sultan Mahmud Badaruddin II di berbagai wilayah Hindia Belanda, dan keberadaan penyebaran mereka masih dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia hingga dewasa ini

Selain berpengaruh terhadap keluarga kesultanan, penaklukan militer Belanda atas Kesultanan Palembang Darussalam mempunyai pengaruh besar terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat Palembang. Secara politis Kesultanan Palembang Darussalam dihapus keberadaannya pada tahun 1824 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Penghapusan

ini dilakukan menyusul kekalahan Sultan Mahmud Badarudin II dalam perlawanannya terhadap kekuatan militer Belanda. Dengan dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam, bekas wilayahnya kemudian diintegrasikan ke dalam kekuasaan kolonial.

Kebijakan kolonial atas Palembang diletakkan oleh J.J. van Sevenhoven, yang bertindak sebagai penasihat Residen Belanda di Palembang. Kebijakan yang diperkenalkannya adalah sistem pemerintahan langsung atas Palembang yang sangat pragmatis sifatnya. Dalam sistem ini setiap daerah Palembang yang berhasil dikuasai Belanda diserahkan pengendaliannya kepada komandan militer, yang berkewajiban mengusahakan dengan cara apapun untuk mendapatkan kesediaan pemimpin-pemimpin pribumi bekerja sama. Para pemimpin pribumi ini berfungsi sebagai pendamping komandan militer Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan. Misalnya Residen Militer Kota Palembang, J.C. Rinjst, dalam menjalankan pemerintahan kolonial didampingi oleh Pangeran Kramajaya, menantu Sultan Mahmud Badaruddin II, yang berperan sebagai perdana menteri. Meskipun kekuasaan politiknya bersifat semu, keberadaan pendamping pribumi menjadi sarana penting bagi Belanda untuk meningkatkan legitimasi kekuasaannya di mata penduduk pribumi Palembang (Zed, 2003:48).

Pemerintah Kolonial Belanda membagi bekas wilayah Kesultanan Palembang Darussalam menjadi dua bagian, yakni Karesidenan Palembang dan Karesidenan Bangka-Belitung (Supriyanto, 2013:42). Pembentukan Karesidenan Palembang dilakukan pada 1 Juni 1824. Karesidenan ini dibatasi mulai dari laut melewati Sungai Mesuji hingga Matawolu dengan garis berkelak-kelok hingga mata air Danau Seroja. Garis tersebut berlanjut melalui Gunung Pungkau, Bukit Mandah dan Pematang Tigaman menuju Bukit Pasagi (Supriyanto, 2013:44).

Secara administratif Karesidenan Palembang dibagi menjadi

beberapa afdeling dengan masing-masing dipimpin oleh asisten residen. Secara terperinci wilayah Karesidenan Palembang terdiri dari empat afdeling, yakni: 1) Daerah Ibukota Palembang; 2) Afdeling Palembang Ilir, dengan Sekayu sebagai ibukota; 3) Afdeling Palembang Ulu, dengan Lahat sebagai ibukota; dan 4) Afdeling Ogan Ulu dan Komering, dengan ibukota Baturaja (Supriyanto, 2013:44-45). Wilayah afdeling dibagi-bagi menjadi beberapa onderafdeling, yakni wilayah administratif yang dikepalai oleh seorang kontrolir. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang kontrolir dibantu oleh beberapa demang atau kepala distrik, asisten demang, mantri polisi, mantri pajak dan mantri kesehatan (Supriyanto, 2013:45). Pemberlakuan administrasi kolonial menandai integrasi wilayah dan masyarakat Palembang dalam era kekuasaan imperialis Belanda.

Bab 4

Struktur Pemerintahan dan Masyarakat



Struktur Pemerintahan

Secara geografis wilayah Kesultanan Palembang meliputi daerah Batanghari Sembilan ditambah dengan daerah yang disebut Negeri Luar. Daerah Batanghari Sembilan meliputi daerah sembilan sungai utama di kawasan ini yang bermuara di Sungai Musi. Kesembilan sungai utama yang dimaksud adalah Sungai Banyuasin, Kikim, Kelingi, Lakitan, Lintang, Rawas, Lematang, Ogan dan Komering. Sementara itu, daerah Negeri Luar secara khusus merujuk pada Pulau Bangka dan Belitung (Rahim, 1998:11).

Dari sudut administrasi pemerintahan, wilayah Kesultanan Palembang Darussalam dibagi menjadi empat kawasan. Kawasan pertama adalah ibukota dengan istana atau keraton sebagai inti kesultanan. Di luar ibukota dikenal adanya tiga kawasan yang berbeda, yakni daerah *sikap*, daerah *kepungutan*, dan daerah *sindang* (Rahim, 1998:66). Keraton sebagai tempat kediaman sultan merupakan pusat pemerintahan ibukota. Sementara itu, daerah di luar ibukota membentuk struktur pemerintahan dengan pola yang berbeda. Secara sederhana dapat dibedakan antara pemerintahan untuk wilayah uluan dan wilayah iliran (Zed, 2003:34-35). Pusat kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam terletak di kawasan iliran dan penduduknya adalah kawula istana. Sementara itu, melewati kawasan *iliran* adalah wilayah *uluan* dan di kawasan ini orang-orang asing non-kawula bermukim (Hanafiah, 2008:27).

Ibukota Kesultanan Palembang Darussalam terletak di tepian Sungai Musi, sekitar 15 mil dari muara Sungang dan satu mil dari tempat menyatunya Sungai Ogan dan Sungai Komering dengan Musi. Mengingat ketiga sungai merupakan akses masuk ke daerah pedalaman, ibukota Palembang memiliki letak yang sangat strategis dalam kaitan dengan pengawasan

lalu lintas antara daerah luar dan pedalaman Palembang (Van Sevenhoven, 1971:13). Dua bangunan keraton utama mewakili eksistensi Kesultanan Palembang pada masa yang berbeda, yakni Keraton Lama atau Kuta Gawang dan Keraton Baru atau Kuto Besak. Bangunan keraton yang baru mempunyai ukuran lebih besar dan dikelilingi dengan tembok batu yang kuat (Hanafiah, 1989:6-12).

Di dekat keraton terdapat bangunan-bangunan rumah terbuat dari kayu, dikombinasikan dengan batu bata dan atap genting yang menjadi tempat tinggal para pangeran golongan rendah dan para pejabat istana. Di kedua tepian Sungai Musi dijumpai rumah-rumah rakit terbuat dari kayu dan bambu sebagai tempat tinggal penduduk ibukota, baik orang-orang pribumi maupun orang-orang asing seperti Cina, Arab, Eropa dan lainnya (Van Sevenhoven, 1971:14-15).

Dalam menjalankan pemerintahan kesultanan, sultan dibantu oleh pejabat-pejabat negara yang biasa disebut empat manca-negara, yakni Papatih (Pangeran Natadiraja), Pangeran Nata Agama, Tumenggung Karta, dan Pangeran Citra (De Roo de Faille, 1971:31-33). Papatih membantu sultan dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Papatih inilah yang mengawasi pengumpulan pendapatan kesultanan, menerima laporan semua urusan kerajaan, menyampaikan usulan terkait urusan pajak dan kerja wajib bagi sultan, menguasai alat-alat perlengkapan perang, memberikan nasehat dan pertimbangan kepada sultan terkait kebijakan yang dibuatnya. Sultan juga dibantu oleh adipati atau putera mahkota, yang memainkan peran sebagai penasihat langsung, wakil, dan pengganti sultan manakala sultan sendiri berhalangan (Van Sevenhoven, 1971:14-15).

Dalam kaitan dengan urusan di bidang keagamaan, sultan dibantu oleh Pengeran Nata Agama (penghulu), yang bertindak sebagai kepala alim-ulama. Pangeran Nata Agama menangani

perkawinan, perceraian, kematian, perwalian kelalaian dan berbagai urusan keagamaan lainnya (Van Sevenhoven, 1971:14-15). Sementara itu, Pangeran Citra bertindak sebagai kepala *pengalasan* atau hulubalang sultan yang disertai tugas melakukan penjagaan keamanan ibu kota, serta menjalankan eksekusi hukuman mati terhadap para terpidana (De Roo de Faille, 1971:32-33).

Selain keempat manca-negara, pembantu sultan lainnya adalah golongan pegawai yang dalam istilah setempat dinamakan *raban* atau *jenang*. Kedua istilah ini merujuk pada orang-orang yang diberi hak penguasaan atas dusun atau marga atas nama sultan. Dengan hak yang diperolehnya dari sultan tersebut, *raban* atau *jenang* adalah figur yang mempunyai otoritas untuk mengumpulkan berbagai hasil atau produk yang dihasilkan oleh marga atau dusun yang dikuasainya, menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di dalamnya. Dalam berbagai kasus yang rumit dan tidak ditemukan jalan penyelesaian, merekalah yang akan membawa persoalan tersebut kepada pepatih atau raja. Melalui *jenang* atau *raban* pulalah semua perintah raja disampaikan ke bawah kepada kepala-kepala marga atau dusun untuk kemudian ditindaklanjuti pelaksanaannya sebagaimana yang dikehendaki raja (Van Sevenhoven, 1971:14-15).

Posisi *jenang* dan *raban* tidak bersifat permanen. Sewaktu-waktu mereka bisa diberhentikan dan diganti oleh sultan dengan orang lain menurut kemauannya. Dapat juga terjadi bahwa pada saat terjadi penobatan raja baru, para *jenang* dan *raban* yang sebelumnya mendapat tanah/daerah untuk diperintah atas nama sultan, mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada raja yang baru. Mereka kemudian menerima kembali tanah-tanah tersebut dari raja yang baru, baik dalam ukuran yang sama atau kadang-kadang dikurangi karena diberikan kepada orang lain. Akan tetapi, pada umumnya raja diharapkan bertindak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, yakni anak laki-laki akan

menerima hak-haknya seperti yang telah didapatkan oleh orang tua mereka (De Roo de Faille, 1971:47).

Di wilayah yang diserahkan penguasaannya, tidak jarang para *jenang* dan *raban* mempunyai usaha dalam dunia perdagangan. Kegiatan ini dilakukan baik untuk diri pribadi maupun untuk atasan mereka. Kekuasaan para *jenang* dan *raban* ditopang oleh anggota keluarga maupun para pendukungnya. Kekuasaan mereka bertambah kuat dengan pemberian kekuasaan kehakiman oleh sultan kepada mereka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing (De Roo de Faille, 1971:39).

Daerah *kepungutan* juga dikenal sebagai wilayah *iliran*. Karakteristik utamayang tampak di kawasan ini adalah berlakunya kekuasaan sultan dan pejabat istana untuk melakukan pungutan pajak maupun layanan tenaga kerja. Mereka juga memegang hak istimewa untuk melakukan penguasaan secara eksklusif atas barang-barang tertentu yang ada dalam monopoli mereka (Zed, 2003:35). Di kawasan *iliran* masyarakatnya mempunyai orientasi yang kuat pada kegiatan di sektor perdagangan, bahkan beberapa penulis Barat khususnya Van 's-Gravenhage dan Van Rijn van Alkemade menggambarkan bahwa penduduk di kawasan ini "dilahirkan dengan bakat dagang" (Zed, 2003:36). Masyarakat di kawasan ini telah terintegrasi begitu erat dengan kegiatan-kegiatan dalam dunia perdagangan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan hal ini tidak terlepas dari peranan Sungai Musi sebagai lalu lintas perdagangan yang ramai.

Daerah *sindang* yang berarti perbatasan adalah kawasan yang biasa disebut masyarakat setempat sebagai kawasan *uluhan*. Wilayah *sindang* meliputi Pasemah, Rejang, Ampat Lawang, Kikim dan Kisam, sedangkan daerah yang terletak antara Lampung dan Palembang *iliran* termasuk kelompok *sindang merdeka*. Wilayah ini dikuasai oleh para pemimpin lokal atau yang biasa disebut *pasirah* dan bergelar *depati*. Para *depati*

bertindak sebagai kepala-kepala kelompok masyarakat kesukuan yang otonom. *Depati* bukan berposisi sebagai bawahan sultan. Kekuasaan sultan dalam bentuk pemberlakuan hak-hak untuk melakukan pungutan dan kerja wajib bagi istana secara langsung pada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah *sindang* secara praktis tidak berlaku. Masyarakat *sindang* diatur dengan perangkat hukum tersendiri, yang dinamakan Undang-Undang Sindang Merdeka (Zed, 2003:43-44). Dalam menggerakkan roda pemerintahannya di wilayah *sindang*, para *depati* dibantu oleh beberapa *proatin* (anak buah), *beginda*, dan *kria*. Tugas yang menjadi tanggung jawab pelaksanaannya di pundak mereka adalah menjalankan roda pemerintahan, peradilan dan memelihara adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat *sindang* (Farida, 2012:5).

Kelompok-kelompok kesukuan masyarakat *sindang* oleh sultan tidak dipandang sebagai kawula atau bawahan, melainkan sebagai mitra yang membentuk hubungan patron-klien. Sultan bertindak sebagai patron (pelindung) terhadap masyarakat *sindang* karena jasa mereka dalam menjaga keamanan daerah perbatasan (*sindang*). Sebagai bentuk imbal-balik, sultan memberi mereka perlindungan dan jaminan atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup seperti garam, kapas, dan barang lainnya. Pengakuan atas pola hubungan yang bersifat kemitraan tersebut terungkap dalam pemberian persembahan kepada sultan sebagai tanda hormat, bukan sebagai upeti dari bawahan (Zed, 2003:44).

Kelompok kesukuan dalam masyarakat *sindang* adalah kawan-kawan seperjuangan sultan, yang tunduk pada kepala-kepala mereka sendiri, dan tidak mempunyai kewajiban membayar upeti (De Roo de Faille, 1971:40). Mereka menganggap diri “sama sekali bebas dari Kerajaan Palembang”. Kunjungan yang mereka lakukan setiap tahun ke istana sultan di ibukota dipandang oleh kepala-kepala kelompok kesukuan masyarakat

sindang bukan sebagai tanda ketaklukan secara politik antara rakyat terhadap penguasa, melainkan lebih dimaknai sebagai “sebuah penghargaan yang ditujukan kepada adik perempuannya yang kaya” (Yass, 1984:10). Pola hubungan semacam inilah yang terbentuk antara sultan dengan kelompok-kelompok kesukuan dalam masyarakat di daerah *sindang*.

Struktur Masyarakat

Pada masa pemerintahan kesultanan, struktur masyarakat Palembang tersusun atas empat golongan, yakni raja atau sultan, golongan bangsawan, golongan rakyat, dan golongan budak (Hanafiah, 1995:172). Struktur ini berlaku khususnya bagi masyarakat pribumi baik yang tinggal di ibukota kesultanan maupun penduduk yang bermukim di daerah pedalaman. Sultan menempati posisi tertinggi atau puncak piramida dalam stratifikasi sosial masyarakat Palembang pada masa kesultanan. Posisi tertinggi ini dikaitkan dengan anggapan bahwa sultan adalah pengganti atau bayangan Allah di bumi dan kedudukannya setara dengan nabi, sebagaimana tergambar dalam *Kitab Sulalatus Salatin* atau yang juga dikenal sebagai *Sejarah Melayu*. Dengan kedudukan semacam itu, diyakini bahwa raja/sultan adalah figur yang sangat mulia dan memiliki berbagai macam kelebihan (Rahim, 1998:19-23).

Sebagai penguasa yang legitimasi kekuasaannya langsung bersumber dari Allah, sultan mempunyai kekuasaan yang besar. Bahkan, Van Sevenhoven (1971) menggambarkan sultan mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak. Memang, pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam ditopang dengan penetapan berbagai perangkat hukum yang tertuang dalam undang-undang atau piagam yang dikeluarkan

pihak sultan. Salah satu perangkat hukum yang paling dikenal luas adalah Undang-Undang Simbur Cahaya, yang konon disusun oleh Ratu Sinuhun dan kemudian pada masa kolonial dikompilasi dan dikodifikasi oleh J.F.R.S van den Bossche (Rahim, 1998:113-115). Namun dalam berbagai kasus, kehendak sultan bisa menjadi hukum, dan tidak ada satu pun orang dalam lingkungan kesultanan mempunyai kuasa untuk menentang atau menolaknya. Praktek semacam inilah yang kerap kali membuat orang-orang Barat sampai pada sebuah penilaian tentang berlakunya praktek absolutisme kekuasaan dalam Kesultanan Palembang Darussalam.

Gelar sultan didapatkan penguasa Palembang dari Dunia Arab, sedangkan pemakaian gelar susuhunan berakar dari tradisi Majapahit (Van Sevenhoven, 1971:21). Ki Mas Hindi adalah penguasa Palembang yang pertama kali menggunakan gelar sultan pada tahun 1675, sebagai langkah untuk mempertegas kesetaraan posisi Kesultanan Palembang dengan Kerajaan Mataram. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram telah terlebih dahulu menggunakan gelar sultan pada tahun 1641. Hal ini berarti Palembang bermaksud melepaskan diri dari bayang-bayang supremasi kekuasaan Mataram dan membangun sebuah tradisi baru. Pada masa sebelumnya raja-raja Palembang hanya menggunakan gelar yang mengesankan posisi lebih rendah seperti Ki Gede, Tumenggung, Pangeran, dan Pangeran Tumenggung (Hanafiah, 1995:195-196).

Sebagai penguasa tertinggi, sultan adalah satu-satunya pemilik atas tanah di seluruh wilayah kesultanan dan berkuasa untuk memberikan tanah tersebut kepada orang-orang yang dikehendaknya. Tidak mengherankan, sultan biasa mendapatkan layanan tenaga kerja dari rakyatnya baik untuk pekerjaan di ibukota maupun di wilayah luar ibu kota. Sultan juga mendapatkan penghasilan dalam jumlah besar dari berbagai sumber, di antaranya pajak perikanan, pemburuan satwa liar,

serta barang-barang berharga yang secara eksklusif menjadi hak raja seperti gading-gading gajah yang didapatkan di hutan-hutan, rotan semambu yang luar biasa indah, cula badak, batu gemala yang berkhasiat untuk pengobatan, serta satwa tertentu termasuk musang dan kucing candramawa (De Roo de Faille, 1971:43).

Golongan bangsawan atau yang juga biasa disebut golongan priyayi atau ningrat adalah keturunan para raja atau sultan. Status priyayi umumnya diperoleh karena faktor keturunan atau kelahiran. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus bisa terjadi bahwa status priyayi dapat diperoleh karena anugerah yang diberikan oleh sultan kepada orang-orang yang dikehendaknya (Rahim, 1998:61-62). Golongan priyayi umumnya tidak mempunyai harta kekayaan yang dapat diberikan sebagai warisan kepada keturunan mereka. Kebanyakan golongan priyayi tersebut menopang kebutuhan hidup rumah tangga berkat dukungan material dari dusun-dusun atau marga yang dianugerahkan oleh sultan dan hak-hak yang kaum priyayi telah peroleh dapat dicabut kembali setiap saat oleh sultan. Sebagian golongan priyayi yang tidak mendapatkan anugerah dusun atau marga dari sultan menyandarkan hidup pada beragam kegiatan, termasuk di antaranya menjadi pembuat barang-barang emas dan perak, kerajinan tangan, dan berdagang (Van Sevenhoven, 1971:26).

Golongan priyayi sendiri mengenal adanya tiga tingkatan, yakni pangeran, raden, dan masagus. Golongan pangeran menempati tingkatan tertinggi dalam kepriyayian. Pangeran dalam konteks Palembang berarti yang memerintah. Mereka yang diberi gelar pangeran lazimnya adalah keturunan laki-laki sultan atau anak-anak dari pangeran. Gelar ini tidak diwariskan karena raja mempunyai kekuasaan untuk menahan atau sebaliknya, menganugerahkan kepada orang-orang yang dikehendaknya. Dalam perkembangannya gelar pangeran tidak

jarang juga diberikan kepada orang lain sesuai dengan kehendak sultan terutama kepada mereka yang menduduki jabatan (Van Sevenhoven, 1971:25).

Menurut ketentuan adat, gelar pangeran yang tertinggi adalah Pangeran Ratu dan biasanya diberikan kepada putera mahkota. Golongan raden diberikan kepada keturunan laki-laki dari hasil perkawinan seorang pangeran dengan anak perempuan dari seorang pangeran. Raden di sini mempunyai arti yang dijunjung atau dicintai. Golongan Masagus yang berarti berharga banyak umumnya diberikan kepada keturunan laki-laki dari perkawinan antara seorang pangeran dengan perempuan yang berasal dari golongan rakyat. Istri dan anak perempuan dari pangeran dan raden mendapat gelar raden ayu atau denayu, sedangkan gelar yang berlaku bagi istri dan anak perempuan dari masagus adalah masayu (Rahim, 1998:62).

Kelompok yang posisinya berada di bawah golongan priyayi adalah golongan rakyat. Golongan ini tidaklah mencakup sebuah kelompok yang homogen. Dalam golongan ini masih terdapat tiga tingkatan yang berbeda, yakni kemas, kiagus dan rakyat kebanyakan. Gelar kemas umumnya diberikan kepada anak laki-laki sebagai hasil perkawinan antara perempuan berstatus masayu dengan laki-laki berlatar-belakang rakyat biasa. Sementara itu, gelar kiagus lazimnya diberikan kepada anak laki-laki mantri dan keturunan dari raden tingkat rendah yang menikah dengan pasangan yang berlatar belakang rakyat kebanyakan (Rahim, 1998:62-63).

Rakyat Kesultanan Palembang biasa disebut *matagaꦮe*, khususnya rakyat yang tinggal di pedalaman. Konsep *matagaꦮe* mengacu pada pengertian bahwa setiap orang yang telah dianggap dewasa atau sudah kawin, dan mempunyai tempat tinggal sendiri secara otomatis mendapatkan status sebagai rakyat kesultanan. Diperolehnya status ini membawa konsekuensi bagi mereka, yakni kewajiban untuk menyerahkan

garwe (kerja) bagi kepentingan raja/sultan. Kewajiban ini adalah bentuk imbal balik atas anugerah hak yang telah diperolehnya dari raja untuk menempati dan mengerjakan tanah. Secara adat diyakini bahwa semua tanah di wilayah kesultanan adalah milik sultan (Zed, 2003:40-41).

Golongan rakyat jelata khususnya yang bermukim di wilayah ibukota kesultanan meliputi beberapa kelompok, yaitu orang Miji, orang Senan, serta orang yang menggadaikan diri dan para budak (Van Sevenhoven, 1971:27). Orang Miji, yang setara kedudukannya dengan *matagarwe* di wilayah pedalaman, dikenal sebagai sekelompok orang yang disertai tanggung-jawab melakukan berbagai pekerjaan tangan untuk sultan dan para priyayi, misalnya kerajinan, karya seni dan bahkan juga menyediakan sejumlah tenaga untuk berperang. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung-jawabnya, miji mempunyai beberapa pembantu yang disebut *alingan*. Sementara itu, orang Senan adalah orang-orang yang dipekerjakan secara eksklusif untuk sultan. Mereka umumnya menangani urusan pembuatan dan perbaikan perahu-perahu dan rumah milik kesultanan, selain disertai pula tanggung-jawab sebagai pendayung perahu sultan. Seperti halnya golongan Miji, orang Senan juga dibantu beberapa *alingan* (Rahim, 1998:63).

Rakyat mempunyai kewajiban pokok melakukan kerja bakti bagi kepentingan sultan baik di wilayah ibukota maupun di luar ibukota maupun untuk kepentingan umum. Layanan kerja bakti bagi kepentingan sultan kadang-kadang dapat berlangsung beberapa bulan. Selama menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka, rakyat yang terlibat harus membiayai diri sendiri dalam pemenuhan segala keperluan hidup. Mereka tidak menerima pembayaran karena dianggap telah memperoleh manfaat dari tanah sawah, kebun, maupun pekarangan yang secara adat diyakini sebagai milik sultan. Karena bekerja dalam waktu yang cukup lama dengan tanpa mendapat bayaran dan

pada sisi lain, masih harus menopang keperluan hidup selama menjalankan kerja bakti, akibatnya tidak jarang mereka terjerat dalam perangkap hutang. Selama hutang belum lunas, maka mereka harus merelakan diri untuk bekerja sebagai budak dari orang-orang yang telah memberi mereka pinjaman (De Roo de Faille, 1971:43-44).

Golongan budak mencakup orang-orang yang telah kehilangan kemerdekaan atau menggadaikan diri pada orang lain (Rahim, 1998:63). Dalam posisi mereka yang terikat dan tergantung pihak lain, Van Sevenhoven (1971:28) menggambarkan golongan budak tersebut sebagai “golongan yang paling celaka”. Gambaran semacam ini dapat dimengerti manakala melihat fakta bahwa pada masa itu orang-orang yang termasuk dalam kategori budak umumnya diperlakukan sebagai barang dagangan. Bahkan menurut Meilink-Roelofsz (1962:81-82), budak belian merupakan komoditas perdagangan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan budak telah berlangsung secara luas di bagian Barat Nusantara pada akhir abad kedelapan belas (Ricklefs, 2008:151). Dari Palembang, misalnya, budak belian diangkut ke Malaka sebagai barang dagangan bersama-sama dengan barang lain seperti beras, bawang merah, bawang putih, daging, rotan, madu, damar dan berbagai barang dagangan lainnya (Hanafiah, 1995:109). Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan gambaran yang diberikan oleh De Roo de Faille (1971:37) bahwa di Kesultanan Palembang banyak dijumpai perbudakan dan budak akibat terjerat lilitan hutang. Kehidupan para budak tersebut digambarkan berada di bawah tekanan hidup yang berat.

Hubungan raja (sultan) dengan rakyat tergambar dalam dua konsep pokok yang berlaku dalam tradisi politik Islam-Melayu, yakni “setia” dan “derhaka”. Konsep ini diletakkan fondasinya dalam kesepakatan antara Penguasa Palembang

dengan Demang Lebar Daun sebagai sebuah “kontrak suci” yang mengikat baik raja maupun rakyat. Pada satu sisi rakyat terikat pada kewajiban untuk senantiasa patuh, tunduk dan setia kepada raja. Pengingkaran atas kewajiban ini dianggap sebagai tindakan “derhaka” yang pantas dijatuhi hukuman oleh raja. Pada sisi lain, raja juga terikat pada kewajiban untuk bertindak adil dan melindungi rakyat. Raja harus mengekang diri dari rupa-rupa tindakan sewenang-wenang yang menzalimi dan memermalukan rakyat. Raja yang bertindak secara kejam dan sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya berarti telah melakukan tindakan “derhaka” terhadap rakyat, dan konsekuensinya, raja semacam ini tidak pantas lagi mendapatkan kepatuhan dan kesetiaan secara penuh dari rakyat yang menjadi kawulanya (Rahim, 1998:35-37).

Perbedaan antara raja/elite dengan rakyat tampak dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan tersebut terlihat misalnya dalam hal rumah. Rumah raja dan kaum elite berlokasi di daratan, sedangkan rumah golongan rakyat berada di kawasan perairan. Dari segi struktur, rumah orang kebanyakan berada di permukaan tanah. Rumah golongan elite mempunyai struktur tinggi, ditopang dengan tonggak/tiang. Sementara itu, dari segi bentuk rumah kaum elite bersifat menetap/permanen, berbeda dengan rumah-rumah golongan rakyat kebanyakan yang dapat dipindahkan (Hanafiah, 2008:26). Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan prinsip-prinsip kosmologis yang menekankan keselarasan alam semesta yang tampak dalam binarium oposisional dalam perbedaan kontrasif antara siang dan malam, tanah dan air, laki-laki dan perempuan, panas dan dingin, dan sebagainya.

Karakter Masyarakat

Selain membangun struktur pemerintahan dan tatanan politik, penguasa Kesultanan Palembang bermaksud mewujudkan masyarakat Islami di wilayah kekuasaannya. Hal ini misalnya dilakukan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II dengan mengeluarkan sejumlah fatwa untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku baik bagi pejabat maupun rakyat.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan, yakni:

1. Jadikanlah kedudukanmu untuk kebajikan dan berkatalah dengan teratur.
2. Dengarkan akan perkataan yang baik dari orang yang berbicara padamu
3. Jangan engkau beranikan seseorang berbuat zalim atas seseorang
4. Jangan engkau perlihatkan akan hartamu kepada orang lain.
5. Hendaklah engkau pikirkan akan jawabanmu
6. Jangan campuri perkataan yang batil
7. Jangan engkau banyakkan hajatmu kepada orang lain
8. Pelihara akan dirimu dari perbuatan dan perkataan yang menyalahi syariat.
9. Jangan engkau banyakkan isyarat dengan tanganmu dan jangan banyakkan berpaling ke belakang (Nato Dirajo, 1984:11).

Fatwa-fatwa tersebut tidak diragukan lagi ikut membentuk karakter masyarakat Palembang masa kesultanan. Beberapa karakter yang mengejawantahkan fatwa-fatwa Sultan Mahmud Badaruddin II dan menarik untuk digarisbawahi di sini berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dapat dijangkau, yakni keteguhan menjunjung syariat Islam, sikap terbuka terhadap pihak lain, serta penggunaan kedudukan demi kebaikan.



SUMBER: KOLEKSI MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II, DOKUMENTASI TIM PENELITI 2016
Lambang Kesultanan Palembang Darussalam.

Keterangan Gambar:

Bahan dari lambang kesultanan aslinya emas; Sinar Matahari berarti lambang kehidupan; Timbangan berarti dasar hukum dengan fondasi Al-quran, Terompet berarti walaupun dalam keadaan perang maupun damai akan dibunyikan sebagai tanda tetap semangat; Keris berarti senjata untuk bela diri yang harus dimiliki oleh semua orang; Bola dunia berbentuk kipas berarti bersikap baik kepada semua umat karena semua berasal dari ciptaan Tuhan; Huruf Arab pada lambang Kesultanan Palembang yang artinya wahai umat berbuatlah kebaikan; Bulan sabit berarti Mekah dan Madinah (Abusofyan, 19 Januari 2016)

Keteguhan dalam menjunjung syariat Islam merupakan karakter paling menonjol kesultanan dan masyarakat Palembang. Sistem pemerintahan Kesultanan Palembang dibangun berdasarkan pada tradisi politik Islam dan kesultanan mempunyai pejabat yang menjalankan otoritas untuk mengadili urusan keagamaan (Rahim, 1998:53-54). Keraton dijadikan sebagai pusat studi Islam dan sejumlah ulama terkemuka diangkat sebagai ulama keraton (Rahim, 1998:92). Masyarakat Palembang identik dengan Islam. Dengan kata lain, bukanlah orang Palembang kalau tidak memeluk Islam. Tingkah laku masyarakat kesultanan dikonstruksi berdasarkan ajaran dan norma-norma Islam sebagai fondasinya.

Dengan keteguhan untuk menjalankan syariat, kehendak dan semangat anti kafir secara kuat menjiwai penguasa dan masyarakat Palembang. Mereka yang digolongkan sebagai kafir pada masa kesultanan Palembang secara gamblang tergambar dalam *Syair Perang Menteng*, yang diyakini sebagai gubahan Sultan Mahmud Badaruddin II. Dalam syair ini, sebutan kafir secara eksplisit diberikan kepada Kompeni/Belanda. Seperti tertuang dalam Bait 33 *Syair Perang Menteng*: “Masuk **Kompeni kafir** Harabi/Anggur dimakannya dengan surabi/patutlah rupanya bagai labi-labi/Hampirlah akan memakan babi” (Woelders, 1996:165). Dalam bagian lain dari syair yang sama (Bait 237), sebutan kafir diarahkan pada orang Belanda. Seperti tampak dalam teks: “Benteng Pangeran Dipati Muda/dekat benteng paduka kakanda/lengkap sekalian alat ada/akan menahan **kafir holanda** (Woelders, 1996:194).

Kekafiran orang Belanda/Kompeni dalam *Syair Perang Menteng* lebih detil lagi diilustrasikan dengan berbagai praktek perilaku seperti: kebiasaan minum anggur, makan babi (Bait 33), minum arak dengan babi (Bait 74), menampilkan dusta (Bait 210), meninggalkan perintah syariat (Bait 214), tidak tahu dosa dan pahala (Bait 248). Ketidaksukaan terhadap orang-orang kafir

dalam masyarakat Palembang terungkap pula melalui citra atau gambaran negatif orang kafir bagai setan dan iblis: “Menteng itu seperti syaitan” (Bait 215). Ketidaksukaan terhadap kekafiran juga terasa dalam pilihan kata-kata yang dipakai di belakang kata kafir yang kuat nuansa negatifnya, seperti celaka, laknat, dan kelam (Woelders, 1996:177-187). Demikian pula, orang-orang pribumi yang mendukung Belanda dalam memerangi dan menaklukan Kesultanan Palembang digambarkan dengan penilaian yang begitu buruk. Dalam Bait 196, misalnya, diungkapkan dengan jelas: “Yang Turut Holanda kenalah gusar/dosanya itu terlalu besar/disalam syariat Sayyid al-basyar/patut dipancung ditengah pasar” (Woelders, 1996:196).

Dengan penggambaran tersebut, cukup jelas kiranya bahwa Belanda/Kompeni adalah pihak yang diposisikan Kesultanan Palembang sebagai musuh. Motif di balik permusuhan yang terjadi di antara keduanya bukan semata-mata terkait dengan persoalan syariat dan kehendak menolak kafir, namun bercampur pula dengan alasan ekonomi. Peperangan Palembang melawan Kompeni/Belanda adalah ungkapan penolakan Kesultanan Palembang terhadap pemaksaan hegemoni politik dan monopoli ekonomi dalam perdagangan lada dan timah Palembang yang diinginkan Belanda. Selain Belanda, pihak yang diposisikan sebagai musuh Kesultanan Palembang adalah Inggris. Kekuatan Inggris di bawah Kolonel Gillespie yang dikirim Raffles bahkan sempat mendesak Sultan Mahmud Badaruddin II mundur ke wilayah pedalaman dan Inggris mendudukkan Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai penguasa Kesultanan Palembang. Akibatnya, terjadilah dualisme dalam kepemimpinan di Kesultanan Palembang antara Sultan Ahmad Najamuddin II dan Sultan Mahmud Badaruddin II (Farida, 2012:8-9).

Di satu sisi terdapat Sultan Mahmud Badaruddin II yang didukung rakyat, sementara itu di sisi lain berkuasa pula Sultan Ahmad Najamuddin II yang didukung oleh Inggris. Dukungan

yang rakyat yang begitu kuat terhadap Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan buah dari praktek kekuasaan yang mencerminkan prinsip penggunaan kedudukan untuk kebaikan seperti yang difatwanya. Dalam mengambil keputusan yang vital bagi kepentingan kesultanan dan rakyat, sultan tidak melakukannya sendiri secara sepihak dan sewenang-wenang, melainkan melalui konsultasi dengan melibatkan pejabat kesultanan, para pasirah, dan pihak rakyat (De Roo de Faille, 1971:30). Hal ini sesuai fatwa sultan untuk tidak mengajari orang lain melakukan perbuatan zalim dan batil.

Ancaman yang sering datang dari kekuatan eksternal membuat masyarakat Palembang berkarakter sebagai pejuang. Musuh Palembang bukan hanya bangsa asing saja, melainkan juga pusat-pusat politik lain di Nusantara yang bermaksud menempatkan Palembang sebagai bawahan seperti Banten, Mataram, dan Jambi. Babak awal Kesultanan Palembang memperlihatkan bahwa para pendiri Kesultanan Palembang adalah orang-orang yang tidak mau menyerah kalah dalam konflik perebutan tahta Kesultanan Demak yang dimenangkan Jaka Tingkir sehingga memutuskan menyingkir dari Jawa Tengah ke Palembang (Hanafiah dan Soetadji, 1996:213-214; Hanafiah, 1987:1). Intervensi dan keinginan Kompeni menguasai perdagangan Palembang membangkitkan perlawanan Kesultanan Palembang di bawah Pangeran Seda ing Rajek pada tahun 1659 yang berujung pada pembakaran kota dan Keraton Kuta Gawang oleh Kompeni (Soetadji, 1995:9). Penghancuran ini tidak mengakhiri Kesultanan Palembang. Dengan karakter pejuang yang dimiliki, Kesultanan Palembang mampu bangkit kembali di bawah Ki Mas Hindi yang saat berkuasa bergelar Sultan Abdurrachman.

Pasang surut kekuatan internal Kesultanan Palembang dan dinamika ancaman eksternal memaksa Palembang untuk selalu bertindak secara taktis. Kemampuan demikian ini menentukan

nasib Kesultanan Palembang dalam mempertahankan eksistensinya sebagai pusat politik dan ekonomi dalam menghadapi ancaman-ancaman hegemoni dan dominasi kekuasaan-kekuatan di luarnya. Ketika menghadapi ancaman Banten yang dibuktikan dengan pengiriman ekspedisi militer ke Palembang pada tahun 1596, penguasa Palembang berusaha membangun aliansi dengan Mataram (Hanafiah, 1987:12-13). Akan tetapi, kedekatan Palembang dengan Mataram tidak disukai Kompeni yang membangun kedekatan dengan Banten. Dengan kemampuan Kompeni menaklukkan Malaka pada tahun 1641 dan mengalahkan armada laut Mataram pada tahun 1642, dan mempertimbangkan kemampuan militernya yang belum sebanding, Palembang dipaksa bertindak taktis dengan menerima persahabatan dengan Kompeni (Hanafiah, 1989:44-46).

Ketika Belanda mulai terdesak oleh kekuatan Inggris, Sultan Mahmud Badaruddin II memanfaatkan momentum tersebut untuk mengusir Belanda dari Palembang yang melahirkan Peristiwa Loji Sungai Aur pada tahun 1811 (Hanafiah, 1989:52). Peperangan yang dilakukan Sultan Mahmud Badaruddin II pada periode 1819-1821 yang berlangsung berulang kali melawan kolonialisme Belanda memperlihatkan secara nyata kuatnya karakter pejuang dalam masyarakat Palembang yang sulit untuk ditundukkan (Hanafiah, 1986:103-152). Bahkan, Sultan Ahmad Najamuddin IV yang semula bersikap lunak dan berkuasa di Kesultanan Palembang atas persetujuan Belanda, pada akhirnya juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Semangat perlawanan yang senantiasa menyala dan sering meletup di kalangan keluarga kesultanan dan para pendukungnya membuat pemerintah kolonial Belanda akhirnya menghapus eksistensi politik Kesultanan Palembang dengan maksud mencegah anasir-anasir yang membahayakan tatanan kolonial.



Bab 5

Perekonomian



Dalam konteks masyarakat tradisional, termasuk Kesultanan Palembang, terdapat kaitan erat antara penduduk dan kemakmuran. Para penguasa kerajaan tradisional di Nusantara menjadikan penduduk sebagai sumber penting dalam mewujudkan kemakmuran. Tanpa adanya penduduk, kekayaan yang alam yang melimpah tidak ada artinya bagi para penguasa karena mereka tidak mungkin mengeksploitasi sendiri secara langsung kekayaan alam yang dimiliki. Para penguasa memerlukan penduduk bukan hanya dalam kaitan dengan suplai tenaga untuk angkatan perang demi kepentingan pertahanan dan stabilitas kekuasaan, melainkan juga sebagai sumber penting untuk angkatan kerja yang diperlukan dalam rangka mengeksploitasi beragam kekayaan alam yang dimiliki demi kepentingan penguasa. Tidak mengherankan, ekspedisi-ekspedisi militer dalam rangka penaklukan politik antar pusat-pusat kekuasaan di Nusantara pada masa lalu seringkali diikuti dengan deportasi penduduk secara besar-besaran oleh pihak pemenang.

Oleh karena itu, sebelum menyajikan kehidupan sektor perekonomian Kesultanan Palembang, kiranya perlu disajikan terlebih dahulu keadaan penduduk Palembang. Mereka inilah yang berperan sebagai penggerak utama roda perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam baik dengan terjun dalam sektor pertanian, perikanan, pengambilan hasil hutan, pertambangan, kerajinan, serta perdagangan. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran yang dimainkan penduduk Kesultanan Palembang Darussalam dengan menjadikan sebagai sumber mata pencaharian hidup mereka.

Penduduk Palembang

Peran historis Palembang yang sangat panjang, sejak masa Kerajaan Sriwijaya, Suwarnabhumi, hingga Kesultanan Palembang Darussalam, serta besarnya potensi ekonomi yang dimilikinya, merupakan faktor penting terbentuknya Palembang sebagai wilayah dengan komposisi penduduk yang sangat heterogen. Kemajemukan penduduk Palembang terlihat jelas dari kehadiran berbagai kelompok etnis yang ikut membentuk masyarakat Palembang. Terdapat kurang lebih 20 etnis dijumpai di wilayah Palembang, yang bermukim di pusat kota, pinggiran kota, pedalaman maupun Bangka dan Belitung (Supriyanto, 2013:33). Wilayah ibukota Palembang merupakan kawasan padat dengan ragam etnis yang banyak. Sebagai ilustrasi, laporan kolonial pada tahun 1825 menyebutkan bahwa ibukota Palembang berpenduduk sebesar 29.457 jiwa, diantaranya terdapat 119 keluarga Arab, 184 keluarga Cina, 3.589 keluarga pribumi yang menghuni sekitar 40 hingga 50 kampung kota (Supriyanto, 2013:37).

Kelompok pribumi yang mendiami ibukota meliputi beragam etnis. Sebagian adalah orang-orang Jawa dan keturunannya, yang telah datang pada masa-masa sebelumnya sejak era Sriwijaya. Sebagian lainnya adalah orang-orang yang berasal dari Malaka dan kawasan di sekitarnya (Supriyanto, 2013:34). Kelompok-kelompok etnis pribumi yang mendiami ibukota Palembang ini berbeda dengan kelompok-kelompok yang mendiami wilayah pedalaman, yang sering disebut sebagai penduduk asli. Mereka yang bermukim di pedalaman juga terdiri dari bermacam-macam kelompok etnis, di antaranya adalah: 1) Orang Komering (mendiami wilayah aliran Sungai Komering); 2) Orang Lampung (mendiami wilayah Sungai Mesuji); 3) Orang Ogan (mendiami wilayah sekitar Sungai

Ogan); 4) Orang Pasemah (mendiami wilayah Pasemah dan sebagian wilayah Muara Dua dan Ampat Lawang); 5) Orang Ranau (di sekitar Danau Ranau); 6) Orang Rejang (di sekitar Musi Ulu dan Tebing Tinggi). Ada pula kelompok penduduk yang berlatar belakang Jambi (Supriyanto, 2013:40).

Berbeda dengan penduduk asli Palembang yang pemukimannya tersebar di berbagai tempat, kelompok etnis Cina pada masa Kesultanan Palembang bermukim di wilayah ibukota. Mereka tidak tinggal di daratan, melainkan bermukim di rumah-rumah rakit yang ada di sepanjang sungai. Secara kuantitatif, jumlah penduduk dalam kelompok etnis Cina menurut perkiraan Van Sevenhoven mencapai kisaran 800 jiwa (Jumhari, 2010:46-48).

Orang-orang Cina di Kesultanan Palembang pada umumnya menggeluti perdagangan barang pecah belah, sutra kasar, benang emas, panci besi, obat-obatan, teh, manisan, dan berbagai barang dagang lainnya. Orang-orang Cina juga menjadi penyuplai barang-barang perdagangan tersebut bagi pedagang-pedagang Palembang yang kemudian menjualnya di wilayah pedalaman Palembang (Rahim, 1998:60-61).

Sementara itu, kelompok etnis Arab di ibukota Palembang pada saat yang sama diperkirakan mencapai 500 jiwa. Mereka umumnya menggeluti profesi sebagai pedagang perantara. Orang-orang Arab ini dikenal sebagai pedagang kain linen terbesar. Sebagian di antara mereka bahkan ada yang memiliki kapal dan perahu sendiri (Rahim, 1998:60). Tidak seperti perlakuan yang diberikan kepada orang-orang dari kelompok etnis Cina, orang-orang Arab ini tinggal berkelompok dan diijinkan untuk membangun tempat tinggal dan gudang-gudang di darat. Orang-orang Arab di perkampungan Arab Palembang dikepalai oleh seorang pangeran, yang diangkat dari kalangan mereka sendiri (Rahim, 1998:60). Orang-orang Arab juga memperoleh perlakuan khusus dari pihak penguasa

Kesultanan Palembang karena dianggap mempunyai kelebihan dalam soal-soal keagamaan. Tatkala menghadap sultan mereka diperbolehkan duduk di kursi dekat sultan, sedangkan para pembantu sultan di keraton harus melakukan sembah hingga menyentuh lantai (Jumhari, 2010:46-48).

Data penduduk Palembang pada masa kesultanan sayangnya tidak bisa ditemukan sejauh ini. Tidak adanya pencatatan membuat kesulitan untuk mengetahui secara pasti besarnya jumlah penduduk Palembang. Tabel berikut menyuguhkan gambaran pertumbuhan penduduk Palembang pada masa setelah berakhirnya kekuasaan kesultanan. Tampak jelas dalam tabel bahwa penduduk Palembang secara terus mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan pesat dan menjelang pertengahan abad ke-19 penduduk Palembang telah mencapai lebih dari satu juta.

Pertumbuhan Penduduk Palembang, 1825-1864

TAHUN	JUMLAH
1825	239.093
1827	244.832
1829	248.648
1831	251.732
1833	254.600
1835	256.422
1837	366.011
1839	554.100
1841	607.230
1843	754.484
1847	854.555
1849	1.054.699
1851	1.154.771

1853	1.254.843
1855	1.354.915
1857	1.454.987
1859	1.555.058
1861	1.655.130
1863	1.755.202
1864	1.805.238

(SUMBER: SUPRIYANTO, 2013:35)

Pertanian, Perikanan, dan Kerajinan

Pertanian berkembang baik di berbagai wilayah Palembang berkat kondisi tanahnya yang subur. Van Sevenhoven melaporkan apa yang disaksikannya ketika berada di Kesultanan Palembang Darussalam bahwa tanah-tanah di sekitar ibukota kesultanan dan pedalaman menghasilkan banyak buah dan sayur-mayur dengan kualitas yang sangat baik. Tanaman-tanaman sayur dan buah ini tumbuh begitu subur, bahkan menurut Van Sevenhoven, pertumbuhannya jauh lebih sempurna dibandingkan dengan tanaman-tanaman serupa yang tumbuh di Jawa. Bukan itu saja, buah-buahan dan sayur-mayur yang dihasilkan di Palembang, menurut Van Sevenhoven (1971:53-54), “lebih empuk, mengandung lebih banyak air, lebih manis dan lebih enak”. Hal ini menjadi salah satu alasan pokok baginya untuk menyatakan bahwa Palembang akan menjadi salah satu tempat yang paling menyenangkan bagi orang-orang Eropa untuk tinggal dan menetap di Hindia Belanda.

Bukan hanya di wilayah sekitar ibukota, pedalaman Palembang juga dikatakan sebagai wilayah yang menghasilkan produk-produk yang penting bagi Belanda untuk menyuplai pasar di Eropa. William Marsden, seorang pegawai Inggris

yang pernah bertugas di Bengkulu, misalnya, melaporkan bahwa daerah pedalaman atau yang juga biasa disebut dataran tinggi Palembang merupakan kawasan yang sangat produktif. Pada lahan-lahan dataran tinggi ini terdapat banyak kebun-kebun lada yang diusahakan oleh penduduk (Marsden, 2008:330). Penulis Inggris lainnya, M.H. Court, secara lebih detil melaporkan pada tahun 1821 bahwa produk-produk pertanian seperti beras, kapas, lilin, gambir, dan lada dihasilkan di daerah aliran Sungai Musi. Daerah aliran Sungai Lematang memproduksi lada, beras, dan kapas, sedangkan di daerah aliran Sungai Ogan produk-produk yang dihasilkan adalah beras, lada, dan rotan. Sementara itu, daerah aliran Sungai Komering dan Sungai Banyuasin memberi produk pertanian berupa beras dan lada (Court, 1821:115-118; Rahim, 1998:58). Banyak produk-produk tersebut diusahakan penduduk Palembang secara tradisional dengan menggunakan sistem ladang berpindah (Supriyanto, 2013:31). Dalam konsep Barat, sistem yang demikian ini biasa disebut dengan istilah *swidden agriculture* atau *slash and burn agriculture*, sebagai praktek yang secara umum dijumpai di wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang masih relatif rendah (Peters dan Neuenschwander, 1988:2).

Pada masa Kesultanan Palembang, memang ada keharusan bagi penduduk untuk membudidayakan tanaman tertentu yang diinginkan oleh penguasa kesultanan. Salah satu tanaman penting yang diwajibkan bagi petani untuk menanam adalah lada. Hasil panen lada yang diperoleh petani selanjutnya dijual kepada sultan dengan harga yang telah ditetapkan sebagai ganti pajak yang harus mereka bayar (Supriyanto, 2013:58). Perlu dicatat bahwa di Palembang berlaku pandangan tanah adalah milik sultan, sedangkan rakyat hanyalah penunggu dan penerima manfaat dari tanah milik sultan tersebut. Konsekuensinya, rakyat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak terhadap sultan sebagai pemilik tanah yang sah (De

Roo de Faille, 1971:41-42). Melalui mekanisme ini penguasa Palembang dapat mengumpulkan lada yang sangat diminati pasar dan mendatangkan banyak keuntungan. Selain sebagai bentuk pembayaran pajak, sebagian lada dilepas oleh petani kepada sultan melalui para pembantunya untuk ditukar dengan barang-barang impor penting yang mereka perlukan seperti garam, bahan pakaian, dan candu yang peredarannya dimonopoli oleh sultan (Supriyanto, 2013:58; Marsden, 2008:330-332).

Perluasan penanaman lada di Palembang dan tempat-tempat lain di Pulau Sumatera seperti Pidie, Pasai, Indragiri, Kampar, Pariaman, Indrapura, Silebar, Jambi, dan Lampung tidak terpisah dari adanya peningkatan permintaan pasar. Sejak awal abad ke-15 permintaan Eropa akan lada mengalami peningkatan secara drastis dan pada abad ke-17 lada merupakan komoditas Nusantara yang paling digemari di Eropa. Pada tahun 1662 harga lada di Eropa sebesar empat real untuk setiap *pikul*. Harga lada yang mahal dan keterikatan untuk menjualnya pada VOC sesuai dengan kontrak yang ditandatangani pihak kesultanan Palembang menyebabkan para sultan Palembang mewajibkan penduduk menanam lada pada lahan yang mereka garap terutama di kawasan uluan, Bangka dan Belitung. Hasilnya adalah munculnya Kesultanan Palembang sebagai salah satu pusat produksi lada yang utama di wilayah Nusantara (Farida, 2009:13).

Sebagian penduduk Palembang juga menggeluti sektor perikanan. Berkembangnya sektor perikanan dalam masyarakat Palembang tidak terpisahkan dari fakta lingkungan wilayah ini yang banyak dialiri aliran sungai besar yang biasa disebut Batanghari Sembilan dengan Sungai Musi sebagai induknya. Sungai-sungai ini, dengan rawa-rawa maupun kawasan lautnya, mempunyai kandungan kekayaan ikan yang melimpah dan mampu memberikan penghidupan bagi penduduk Palembang. Beberapa jenis ikan yang banyak ditangkap di sungai-sungai

Palembang misalnya gurami, bager, tabakang, belida, gabus, udang, lais, dan beberapa jenis ikan lainnya (Van Sevenhoeven, 1971:63-64).

Tidak mengherankan, penangkapan ikan telah menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian penduduk dan ikan menjadi bahan makanan utama bagi penduduk Palembang. Bahkan produk ikan dari Kesultanan Palembang tidak hanya digunakan untuk konsumsi sendiri, melainkan juga sebagai barang perdagangan penting dari Palembang. Penduduk Sunsang di muara Sungai Musi, misalnya, dilaporkan menggantungkan hidup dari penangkapan ikan. Berbagai produk ikan dan udang dalam bentuk kering dan terasi dikirim sebagai barang perdagangan ke Jawa dan pulau-pulau lain di sekitarnya (Farida, 2009:14). Tabel berikut memberi gambaran tentang harga ikan air tawar di Palembang sebelum berakhirnya zaman kesultanan.

Harga ikan di Palembang pada tahun 1822

JENIS IKAN	JUMLAH	HARGA
Gurami besar	1 ekor	f. 1,00
Bager besar	1 ekor	f. 2,00
Belida besar	7 ekor	f. 2,12
Gabus besar	1 ekor	f. 0,07
Udang besar	30 ekor	f. 0,07
Lais	6 ekor	f. 0.07

SUMBER: VAN SEVENHOVEN (1971:63-64)

Selain kegiatan pertanian dan perikanan, sektor kerajinan juga merupakan kegiatan ekonomi yang penting bagi penduduk di Kesultanan Palembang Darussalam khususnya penduduk yang bermukim di wilayah ibukota. Kesultanan Palembang dikenal maju dalam pertukangan, ukir gading, pengolah besi,

emas, perak, dan tembaga (De Roo de Faille, 1971:35). Para pengrajin di Palembang terkenal kemahirannya dalam membuat barang-barang kerajinan yang sangat indah terbuat dari emas dan campuran logam lainnya. Mereka menghasilkan rangka dan batang keris, serta beragam barang perhiasan. Dengan mencampur emas dan tembaga para pengrajin Palembang memproduksi perlengkapan rumah tangga yang indah seperti kotak sirih, kotak rokok, sarung keris dan sebagainya. Melalui pencampuran beberapa macam logam dengan berbagai perbandingan, para pengrajin Palembang menghasilkan perhiasan yang bermutu tinggi dan indah, bahkan mereka juga mampu membuat perlengkapan senjata seperti senapan, meriam, dan amunisinya (Farida, 2009:15). Bukan hanya kaum laki-laki saja yang terlibat dalam proses produksi, kerajinan tangan juga dihasilkan kaum perempuan Palembang berupa kain sutera dan kain-kain katun bersulam benang emas dengan ragam bentuk hiasan dan bunga-bunga. Produk kerajinan kaum perempuan Palembang ini dikirim sebagai barang dagangan ke berbagai tempat (De Roo de Faille, 1971:36).

Perdagangan

Penghasilan kesultanan Palembang berasal dari berbagai sumber. Sebagian penghasilan kesultanan diperoleh dari bantuan *fexo*, yakni pedagang kaya yang mendapat kedudukan sebagai wakil sultan. Kedudukan ini diperoleh berkat kecakapan yang dimiliki seseorang sehingga dipercaya oleh sultan untuk ikut memerintah sebagian wilayah Kesultanan Palembang (De Roo de Faille, 1971:36). Namun, sumber penghasilan kesultanan yang lebih besar sesungguhnya berasal dari kegiatan perdagangan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sektor perdagangan merupakan

sektor terpenting pada masa kesultanan Palembang Darussalam. Perdagangan Kesultanan Palembang bukan hanya berlangsung dalam lingkup domestik, melainkan juga menjangkau pasar ekspor. Sektor perdagangan menjadi penopang kemakmuran kesultanan dan masyarakat.

Ramainya kegiatan perdagangan Palembang tergambar jelas laporan Sevenhoven (1971:11-21) dan Roo de la Faille (1971:11) mengenai pelabuhan Palembang. Disebutkan bahwa baik pada siang maupun malam hari aneka ragam perahu berlalu-lalang dengan muatan barang dagangan, dari pedagang eceran hingga pedagang besar Cina, Arab, dan Eropa. Seorang pegawai Inggris, Marsden menyebutkan bahwa terdapat beragam produk yang dihasilkan oleh wilayah Kesultanan Palembang termasuk damar merah, gambir, gading gajah, rotan dan beberapa produk hutan lainnya, namun lada dan timah merupakan produk terpenting. Perdagangan lada dan timah adalah sumber pendapatan terpenting bagi kesultanan (Marsden, 2008:333).



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENULIS, 2016

Perahu Dagang di Sungai Musi Dewasa ini.

Pola menonjol dalam sistem perdagangan pada masa kesultanan Palembang Darussalam adalah adanya monopoli yang terpusat di tangan pihak kesultanan. Dalam kaitan dengan wilayah pedalaman, misalnya, hubungan perdagangan istana kesultanan dengan kepala-kepala daerah/rakyat di pedalaman diwujudkan dalam pola kewajiban *tiban-tukon*. Dalam pola ini, sultan mengirim barang-barang dari Palembang yang dibutuhkan di wilayah pedalaman seperti garam, kain, dan barang-barang lainnya dengan harga yang telah ditetapkan. Barang-barang ini akan dibeli dengan cara ditukar dengan produk-produk wilayah pedalaman, misalnya lada, damar, kapas, dan beras (Rahim, 1998:278-279).

Tentu saja, sultan tidak menjalankan dan mengatur sendiri kegiatan perdagangan tersebut, melainkan menyerahkan pengurusannya kepada pejabat yang dipercayainya yang biasa disebut syahbandar. Tugas yang diberikan sultan Palembang kepada syahbandar meliputi mengurus bea keluar masuk kapal-kapal di pelabuhan, menjaga keamanan para pedagang dari gangguan para penjahat, memajukan pelayaran dan perdagangan. Syahbandar juga diberi wewenang untuk mengadili pedagang-pedagang yang melakukan pelanggaran di pelabuhan (Supriyanto, 2013:50). Dengan wewenang besar yang didapatkan dari pihak kesultanan, syahbandar sebaliknya mempunyai kewajiban untuk menanggung semua biaya perbekalan istana dan berbagai keperluan sultan lainnya (Marsden, 2008:333).

Perdagangan Palembang, baik untuk pasar domestik maupun ekspor, meliputi beragam barang. Barang-barang perdagangan yang dimasukkan ke Palembang di antaranya kain dari Eropa dan Jawa, sutera, benang emas, panci dan barang pecah-belah dari Cina, juga obat-obatan dan teh. Sementara itu, barang-barang yang diperdagangkan keluar meliputi produk-produk hutan seperti damar, rotan, getah, kayu laka, gading gajah, tanduk kerbau, sarang burung, dan berbagai produk lain. Pada tahun

1822 harga gading gajah per *pikul* bisa mencapai 200 gulden, sedangkan damar wangi untuk kualitas terbaik dijual di pasar Palembang dengan harga 50 gulden per *pikul*. Untuk harga jual rotan paling tinggi pada tahun 1822 mencapai 40 gulden per 100 ikat dan untuk bensoe kualitas terbaik dijual dengan harga 100 gulden per pikul (Van Sevenhoven, 1971:69-70).

Barang lainnya yang juga diperdagangkan keluar Palembang adalah hasil-hasil kerajinan. Ekspor barang kerajinan dari Palembang ke Siam diperkirakan mencapai 500 hingga 1000 ringgit Spanyol per tahun (Farida, 2009:14-15). Pada tahun 1822, misalnya, produk kerajinan Palembang meliputi antara lain benang layar, tikar, taplak sampang, taplak sutera, taplak bersulam emas, kotak kuning, kotak firi, periuk, dan barang pecah belah. Harga taplak sutera mencapai 20 gulden per helai, bahan untuk taplak bersulam emas dijual di pasaran dengan harga 44 gulden per helai (Van Sevenhoven, 1971:70-71). Namun, dari semua barang perdagangan yang dikirim keluar wilayah Kesultanan Palembang Darussalam yang paling penting secara ekonomi adalah timah dan lada. Perdagangan kedua barang ini sangat menonjol dari segi volume dan nilai dibanding barang-barang lain sehingga menarik dipaparkan secara khusus pada bagian berikut ini.

Perdagangan Timah

Pertambangan timah Kesultanan Palembang Darussalam terdapat di Pulau Bangka. Pulau ini merupakan pemasok timah terbesar di Asia (Hanafiah, 1989:111). Pada masa pemerintahan Sultan Muhamamad Bahauddin penambangan timah dilakukan lebih intensif. Hal ini dilakukan khususnya di Sungai Buluh, Tempilang, Biat, Bunut, Bendul, Rambat, Panji,

Layang, Sungai Liat, Cengal, Pangkal Pinang, Kobar, Balar, dan Tobali. Untuk keperluan intensifikasi penambangan, Sultan Muhammad Bahaudin merekrut pekerja-pekerja tambang dari Siam dan menyediakan rumah-rumah bagi mereka. Pengawasan terhadap para penambang dilakukan dengan menempatkan demang di wilayah penambangan (Supriyanto, 2013:52). Untuk memberantas penyelundupan timah dan berbagai gangguan keamanan lainnya di wilayah ini, sultan Palembang menempatkan beberapa orang menteri.

Timah memang merupakan komoditas yang sangat bernilai. Bahan ini sangat dibutuhkan Belanda untuk kegiatan industri di Negeri Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Belanda selalu berusaha membujuk sultan Palembang agar memberikan hak monopoli perdagangan timah kepada mereka. Sejak 1722 VOC sudah membeli timah milik Kesultanan untuk dikirim ke Eropa dan ingin mendapatkan hak monopoli dari Kesultanan Palembang. Volume penjualan timah Kesultanan Palembang kepada VOC pada periode 1730-1740 mencapai rata-rata 20.000 *pikul* per tahun (1 *pikul*=62,5kg) (Hanafiah, 1989:111). Timah merupakan komoditas yang sangat menguntungkan dan banyak diminati orang-orang Barat sehingga VOC menginginkan pasokan yang lebih besar, serta keterjaminannya melalui hak monopoli.

Tabel 5.3 Realisasi Penjualan Timah Kesultanan Palembang kepada VOC, Tahun 1750-1790

PERIODE	VOLUME (PIKUL)
1750-1760	15.000
1760-1770	22.000
1770-1780	18.000
1780-1790	15.000

SUMBER: HANAFIAH (1989:112)

Melalui kontrak yang ditandatangani pada tahun 1776, VOC mengharuskan sultan Palembang menyerahkan 30.000 pikul timah setiap tahun dengan harga 13,5 ringgit/pikul. Namun demikian, dalam prakteknya sultan Palembang tidak menyukai monopoli VOC tersebut sehingga kontrak tersebut tidak dengan sungguh-sungguh diupayakan realisasinya. Meskipun produksi timah Bangka diperkirakan antara 50.000 hingga 60.000 *pikul*, pasokan timah kepada VOC tidak pernah menyentuh besaran 30.000 *pikul*. Hal ini disebabkan oleh luasnya luasnya penyelundupan timah sebagaimana dikemukakan Paravicini (1755) dan Van Braam Houckgeest (1790). Volume timah yang diselundupkan terbilang besar, kurang lebih sama dengan timah yang diminta oleh VOC (Hanafiah, 1989:112). Memang bukan hanya Belanda, orang-orang Cina pun membutuhkan timah untuk diproses menjadi bahan pelapis kotak teh (Supriyanto, 2013:53-54) dan peralatan upacara keagamaan. Kanton merupakan pasar besar bagi timah dari Bangka. Menurut informasi perwakilan VOC di Kanton, volume pengiriman timah dengan jung-jung dari Palembang ke Kanton mencapai 20.000 *pikul* pada tahun 1767 dan 20.000 *pikul* pada tahun 1772. Sebanyak 30.000 *pikul* timah dikirim orang-orang Palembang ke Riau pada tahun 1783. Juga kapal-kapal Inggris dilaporkan mengimpor timah dari Bangka sebanyak 19.800 *pikul* pada tahun 1789 (Hanafiah, 1989:112-113).

Perdagangan Lada

Setelah timah, produk perdagangan Kesultanan Palembang Darussalam yang penting artinya adalah lada. Menurut laporan De Sturler, sultan membeli lada dari rakyat seharga satu ringgit

Spanyol dan menjualnya kepada VOC tujuh ringgit Spanyol (De Roo de Faille, 1971:49-50). Kontrak Belanda dengan Sultan Palembang pada tahun 1662 mengharuskan pihak kesultanan menyetorkan lada sebanyak 2.000 karung ke VOC di Batavia (Hanafiah, 1995:165). Pada tahun 1661 Belanda menjual sebanyak 116 ribu karung lada di pasar Eropa, yang dikumpulkan dari berbagai tempat di Hindia Belanda termasuk Banten, Aceh, Jambi dan beberapa lokasi lainnya (Van Leur, 1960:170-171). Pada tahun 1773 Kesultanan Palembang menjual lada sebanyak 6.721 *pikul* kepada pihak VOC. Volume penjualan lada turun menjadi 4.141 *pikul* pada tahun 1774, namun meningkat kembali menjadi 6.105 *pikul* pada tahun 1775 (Hanafiah, 1989:112).

Fluktuasi dalam penjualan lada kepada pihak VOC dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor iklim sudah barang tentu ikut mempengaruhi volume lada yang dapat dipanen. Faktor lain yang lebih penting adalah tingkat keseriusan pihak kesultanan untuk memenuhi kontraknya terhadap VOC. Hal ini ikut ditentukan oleh tingkat harga lada di “pasar gelap” atau di luar VOC. Perlu diketahui bukan hanya VOC yang tertarik perdagangan lada, melainkan juga ada pedagang-pedagang asing lainnya yang berminat mengumpulkan lada untuk dijual di pasar Eropa maupun Asia. Berdasarkan kontrak tahun 1776, Palembang diwajibkan menyetor 20,000 *pikul* lada (Hanafiah, 1989:112). Akan tetapi, harga lada di “pasar gelap” yang lebih tinggi membuat pihak kesultanan tidak terlalu serius memperhatikan kontrak perdagangan lada yang dilakukannya dengan VOC.

Pada tahun 1780-an proporsi penjualan lada kepada VOC kurang lebih hanya sepertiga dari angka produksi lada Palembang. Proporsinya terus menurun pada tahun-tahun berikutnya sehingga VOC mendesak pihak kesultanan agar dilakukan pembaharuan kontrak perdagangan lada. Upaya yang dilakukan VOC untuk meningkatkan perolehan lada

dari Palembang rupanya tidak berhasil. Pada tahun 1788 VOC hanya mendapatkan lada sebanyak 2.000 *pikul*, sedangkan pada saat yang sama penjualan lada dari Palembang ke Makao diperkirakan mencapai sebanyak 20.000 *pikul* per tahun (Hanafiah, 1989:114-115).

Penjualan lada kepada para pedagang di luar-VOC di pasar Riau dipandang lebih menguntungkan. Harga yang mereka peroleh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga monopoli yang ditetapkan VOC untuk lada mereka. Penjualan dilakukan baik kepada pedagang-pedagang Cina maupun Inggris. Dari Palembang lada diangkut dengan kapal-kapal milik Palembang maupun milik Riau. Riau sendiri adalah jalur penting penjualan lada yang ada dikuasai pedagang-pedagang Bugis dan belum ada di bawah pengaruh VOC. Di sini berlaku pola perdagangan bebas dimana berkumpul para pedagang Inggris, pedagang Cina dan pedagang setempat untuk menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan. Dari sini produk lada kemudian diekspor lebih lanjut ke Cina (Hanafiah, 1989:116). Sebagian lada yang berasal dari Palembang diangkut melalui jalur darat oleh orang-orang Cina maupun orang-orang Palembang sendiri ke Krui yang berlokasi di perbatasan Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Di tempat ini para pedagang Inggris siap untuk melakukan transaksi pembelian (Hanafiah, 1989:115).

Bab 6

Pertahanan dan Keamanan



Sistem Pertahanan

Sistem pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam disusun dengan menggunakan pertimbangan strategis yang matang dan seksama. Sebagai pusat kekuasaan dengan elemen sungai yang menonjol, kesultanan menyadari pentingnya penguasaan atas jalur-jalur air. Hal ini dipandang vital untuk mendukung kegiatan perdagangan yang menjadi andalan kesultanan, baik perdagangan produk pertanian khususnya lada dan hasil hutan maupun produk tambang terutama timah dari Pulau Bangka dan Belitung. Penguasaan atas jalur-jalur air memerlukan dukungan kapal-kapal dan perahu yang memadai dan handal. Untuk memenuhi kebutuhan akan alat-alat transportasi ini baik dalam konteks pertahanan maupun perdagangan, Kesultanan Palembang Darussalam mempekerjakan orang-orang Senan atau Snouw. Mereka dikenal luas sebagai pembuat perahu kesultanan yang sangat trampil (De Roo de Faille, 1971:44-45).

Di samping itu, kesultanan juga mempunyai kelompok dusun atau yang dikenal pula dengan sebutan "*sikap*" dengan tugas-tugas khusus untuk menopang kepentingan pertahanan. Kelompok dusun ini dibawahkan secara langsung oleh pamong sultan (Hanafiah, 1996:43) Dapat dikatakan bahwa sistem *sikap* merupakan elemen pertahanan yang alamiah dan handal sehingga kesultanan Palembang tidak mudah untuk ditaklukan oleh kekuatan lain. Dusun Muara Lakitan dan Dusun Madang, misalnya, mendapat tugas khusus mengadakan dan memelihara perahu-perahu pancalang. Tugas pemeliharaan jalur pelayaran antara Palembang dan Sunsang agar terbebas dari gangguan-gangguan dibebankan kepada Dusun Sunsang. Ada pula dusun yang dikenai kerja wajib bagi sultan sebagai pengayuh perahu-perahu maupun sebagai para penunjuk jalan atau yang secara lokal disebut *perpat* (Rahim, 1998:64).

Sejumlah sikap diberi hak penguasaan atas muara-muara sungai penting. Dusun Teluk Kijing dan Muara Danau menguasai Muara Abab, Penukal dan Batang Hari Leko, sedangkan Dusun Terusan menguasai muara Sungai Rawas, Dusun Muara Lakitan menguasai muara Sungai Lakitan, Dusun Muara Enim menguasai muara Sungai Enim, Dusun Pedamaran menguasai daerah danau-danau dan pintu masuk Lempuing di sebelah hilir Sungai Komerling (Laksana, 2013:43). Selain mendapatkan hak penguasaan, dusun-dusun tersebut juga bertugas mengawasi masuknya musuh dari luar. Dusun Belida, misalnya, diwajibkan menyediakan tenaga laskar pada waktu perang. Dalam kaitan ini, Radermacher melaporkan bahwa dalam situasi darurat para pimpinan daerah mempunyai kewajiban menyediakan sebagian bawahan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk dimobilisasi demi kepentingan perang. Demikian pula, para pangeran dan pembesar kesultanan dikenai kewajiban menyediakan sejumlah perahu untuk memperkuat armada laut dalam menghadapi situasi darurat (De Roo de Faille, 1971:38).

Dalam sistem pertahanannya, Kesultanan Palembang menerapkan sistem pertahanan semesta. Artinya, sistem pertahanan ini melibatkan rakyat Palembang di dalamnya, tidak hanya penduduk asli Palembang saja yang dilibatkan di dalamnya, melainkan juga kelompok-kelompok lain seperti Bugis, Arab dan Cina dan lainnya (Hanafiah, 1986:148). Sistem pertahanan Palembang juga mengandalkan pada penggunaan taktik perang gerilya. Taktik ini dilakukan dengan memanfaatkan elemen-elemen lingkungan alam berupa tebing, tanjung, semak dan hutan yang terdapat di sepanjang sungai-sungai yang letaknya strategis sebagai tempat untuk melakukan penyerangan terhadap kekuatan musuh. Baik pasukan kesultanan maupun laskar rakyat yang bermukim di sejumlah kelompok dusun senantiasa siap siaga dimobilisasi oleh pimpinan mereka kapanpun untuk menghadapi agresi musuh yang bermaksud

menguasai Palembang (Laksana, 2013:45).

Persaingan dalam perdagangan rempah-rempah dan timah yang berasal dari daerah Kesultanan Palembang tidak jarang memang menjurus pada pecahnya peperangan di antara mereka yang terlibat di dalamnya. Palembang sebagai bandar dagang yang ramai dan besar di Nusantara harus berhadapan pula dengan ambisi bangsa-bangsa asing untuk menguasai perdagangan tersebut. Motif dibalik peperangan tersebut pada umumnya adalah keinginan untuk mendapatkan hak monopoli dalam perdagangan rempah-rempah dan timah. Para penguasa Kesultanan Palembang sudah sejak lama menyadari bahaya yang timbul dari persaingan untuk mendapatkan hak monopoli sehingga usaha untuk mempertahankan wilayah kesultanan mendapat prioritas penting. Dalam konteks kepentingan pertahanan inilah di tempat-tempat yang dianggap strategis khususnya di sepanjang Sungai Musi mulai dari Sunsang hingga Muara Rawas dibangunlah sistem pertahanan berupa benteng-benteng dan ranjau-ranjau (Laksana, 2013:44-45).

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II sistem pertahanan Kesultanan Palembang lebih ditingkatkan karena ancaman bangsa-bangsa asing yang semakin besar. Baik Inggris maupun Belanda memperlihatkan hasratnya untuk menguasai perdagangan lada dan timah Palembang. Menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa asing tersebut, Sultan Mahmud Badaruddin II membangun sistem pertahanan berlapis. Sistem pertahanan yang dibangunnya mengintegrasikan pula elemen-elemen lingkungan dari dataran rendah dengan sungai-sungainya hingga pantai, selat dan perairan yang menghubungkan daratan dengan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Dapat dimengerti Kesultanan Palembang memperkuat baik matra pertahanan darat maupun laut. Kesultanan Palembang berkepentingan mempunyai matra pertahanan perairan yang tangguh agar dapat mengontrol perairan sungai dan selat, termasuk Selat Bangka,

Selat Karimata, Selat Gaspar, Selat Berhala dan Selat Sunda yang menghubungkannya dengan Selat Malaka, Laut Cina, Laut Jawa dan Samudera Indonesia (Hanafiah, 1986:8).

Ketangguhan sistem pertahanan Palembang juga diupayakan Sultan Mahmud Badaruddin II dengan meningkatkan sistem persenjataan yang dimiliki. Sultan Mahmud Badaruddin II rupanya menyadari fakta tentang keunggulan teknologi persenjataan bangsa-bangsa Barat sehingga dilakukan upaya-upaya untuk mengadopsinya sebagai penopang sistem pertahanan kesultanan. Sebagai misal, tatkala Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles, berusaha membangun kesepakatan terkait dengan hasrat untuk mendapatkan Pulau Bangka dan pengalihan kontrak-kontrak dagang Belanda yang telah kalah kepada Inggris, secara taktis Sultan Mahmud Badaruddin II memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan perlengkapan senjata bagi kesultanan. Setelah melalui serangkaian negosiasi yang alot akhirnya dicapai kesepakatan dan sebagai pengikat perjanjian, bersama surat yang dikirim Raffles melalui Kapten MacDonald, Kesultanan Palembang mendapatkan empat peti yang berisi 80 pucuk senapan, sepuluh keranjang selongsong yang bermuatan peluru dan mesiu (Hanafiah, 1989:59).

Fasilitas persenjataan Palembang terus ditingkatkan di bawah Sultan Mahmud Badaruddin II. Misalnya, tatkala berlangsung blokade Belanda atas lalu lintas perdagangan di Selat Bangka sebagai bagian dari persiapan serangan atas Palembang pada tahun 1821, Kesultanan Palembang terus berusaha meningkatkan kemampuan persenjataan yang dimilikinya dengan membeli dari para penyelundup. Kesultanan Palembang juga mengembangkan kemampuan memproduksi peluru dan bubuk mesiu sendiri. Kemampuan ini diperoleh pihak kesultanan dari seorang tawanan Muntinghe yang kemudian menyeberang dan memihak Palembang (Hanafiah, 1986:128).



SUMBER: KOLEKSI MUSEUM BADARUDDIN II, DOKUMENTASI TIM PENELITI 2016
Senjata Meriam.

Bahkan, kemampuan untuk membuat meriam dan senapan telah dikembangkan pula khususnya dengan bahan tembaga (Yayasan Kesultanan, 2002).

Digunakannya senjata-senjata modern buatan Barat tersebut, tidak lantas berarti bahwa senjata-senjata tradisional ditinggalkan dan dihapus dari daftar perlengkapan militer pasukan Kesultanan Palembang. Senjata-senjata tradisional seperti, tombak, pedang dan keris masih tetap dipergunakan pasukan Palembang. Adopsi senjata modern dan tradisional secara bersama-sama di Kesultanan Palembang tergambar jelas dalam Laporan Radermacher pada tahun 1778 terkait dengan kegiatan menghadap raja atau *seba*:

“... disampingnja duduklah diatas tanah enam orang jang memegang senapan dengan gagangnja kearah badannja, delapan pemanggul tombak, seorang jang memegang tameng dan seorang lagi memegang pedang,

dan djuga seorang jang memegang tempat pinang, tempat sirih, tempat air (water-gorgelet), sedang Radja sendiri berpakaian biasa sadja” (De Roo De Faille, 1971:33).

Dalam berbagai episode pertempuran jarak dekat, kelebatan keris, pedang dan tombak masih mencolok dan keduanya menjadi senjata andalan pasukan Palembang takala menghadapi bedil dan bayonet-bayonet pasukan Belanda. Hal tersebut tampak jelas dalam pertempuran yang berlangsung di Benteng Manguntama dalam Perang Palembang pada tahun 1821, yang digambarkan sebagai “pertempuran yang mengerikan dan mencekam” (Hanafiah, 1986:143). Demikian pula, senjata-senjata tradisional juga sering disebut dalam Syair Perang Menteng, yang merupakan ekspresi dalam bentuk puisi yang menggambarkan perang Palembang pada Juni-Desember 1819. Beberapa baitnya menyebutkan senjata-senjata tradisional dalam pertempuran melawan Belanda, misalnya:

*Haji Mengikut berlari-lari
Di dalam baris menyerbukan diri
Memarangkan pedang kanan dan kiri
Serdadu Belanda habislah lari*

*Loteng dikapak bersungguh hati
Dipukulnya tiada lagi berhenti
Datanglah Rangga Satyagati
Ditombaknya terus tukang tambur mati
(Woelders, 1996:165-166).*



SUMBER: MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II, DOKUMENTASI TIM PENELITI 2016

Senjata Tradisional Palembang.

Benteng Pertahanan

Kesultanan Palembang senantiasa berada di bawah ancaman kekuatan-kekuatan lain baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Letak Palembang yang strategis dan potensi sumberdaya alam yang melimpah membuat Kesultanan Palembang selalu menjadi incaran kekuatan-kekuatan asing dengan maksud

menaklukkan dan menguasainya. Ancaman-ancaman tersebut menjadi alasan utama bagi pihak kesultanan untuk melakukan pembangunan benteng-benteng pertahanan demi melindungi wilayah kekuasaan dan berbagai kepentingannya. Benteng-benteng pertahanan yang dibangun pada masa Kesultanan Palembang dapat ditemukan terutama di sepanjang aliran sungai yang menjadi urat nadi kehidupan wilayah ini. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari fungsi strategis sungai yang sangat penting sebagai jalur akses ke ibukota dan wilayah Kesultanan Palembang.

Tercatat setidaknya terdapat dua belas benteng pertahanan yang dibangun di sepanjang Sungai Musi. Benteng-benteng pertahanan tersebut ditempatkan di berbagai posisi mulai dari Sunsang hingga Muara Rawas di sebelah utara, di sebelah selatan sampai di hulu Sungai Ogan dan Sungai Komering (Hanafiah, 1986:8-9). Benteng-benteng kesultanan tersebut, yakni: 1. Benteng di Muara Sunsang; 2. Benteng di Selat Borang; 3. Benteng di Pulau Anyar; 4. Benteng Tambak Bayo (di Muara Plaju); 5. Benteng di Pulau Kembaro; 6. Benteng Martopuro; 7. Benteng Kuto Besar; 8. Benteng Kuto Lamo; 9. Benteng di Dusun Bailangu; 10. Benteng di Muara Rawas (Ujung Tanjung); 11. Benteng di Dusun Kurungan Nyawo (di dekat Dusun Muncak Kabau); 12. Benteng-benteng di sepanjang Sungai Musi. Secara umum konstruksi benteng kesultanan Palembang dibangun dengan berbagai bahan. Sebagian benteng dibangun dengan konstruksi tembok batu, sebagian lainnya berupa tanggul-tanggul. Ada pula benteng yang berupa pagar aur duri. Pada dinding-dinding benteng biasanya diberi lubang-lubang untuk tempat untuk melepas tembakan. Selain itu, pada sudut-sudut dinding bagian atas biasanya dilengkapi pula dengan tempat untuk melakukan pengintaian.

Ujian terhadap ketangguhan benteng pertahanan Palembang terjadi pada tahun 1659 dalam peristiwa serbuan VOC



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITIAN, 2016

Pulau Kembaro di Sungai Musi Palembang.

yang dipimpin Mayor J. van der Laen. Ekspedisi militer ini dimaksudkan VOC untuk membalas dendam terhadap Palembang atas terbunuhnya Cornelis Ockersz dan 42 orang Belanda lainnya, serta penahanan sejumlah orang Belanda yang melibatkan beberapa petinggi Palembang dan pasukannya, yakni Putri Ratu Emas, Tumenggung Bagus Kuning Pangkulu, Pangeran Mangkubumi Neming Kapal, dan Kiai Demang Kecek (Soetadji, 1996:9). Palembang telah mengantisipasi serbuan tersebut dengan memperkuat pertahanan sebelah kanan Sungai Musi dengan membangun benteng terbuat dari tanah yang diperkeras (*bolwerk*), serta memperlengkapi Benteng Pulau Kembaro, Benteng Bamagangan, dan Benteng Menapura dengan meriam yang secara keseluruhan berjumlah 47 buah. Selain itu, benteng pertahanan Sungai Musi diperkuat pula dengan tonggak berlapis tiga, rantai tebal, serta rakit-rakit besar yang mudah terbakar untuk menghadang dan menghancurkan kapal-kapal musuh yang menyerang (Hanafiah, 1996:90-91).

Suasana serbuan atas benteng pertahanan Palembang digambarkan oleh Wellan:

“...[Pasukan Palembang] menembakkan meriam secara gencar kepada armada, akibatnya menimbulkan kerusakan di pihak kita [VOC], sedangkan peluru-peluru meriam kita [VOC] hampir tidak mempunyai efek kepada tonggak-tonggak yang ditutup dengan tangkai-tangkai kayu” (dalam Hanafiah, 1996:91-92).

Wellan dengan begitu jelas menggambarkan adanya keraguan bahwa serbuan yang dilakukan pasukan VOC tersebut akan berakhir dengan cepat dan mudah mengingat kuatnya benteng pertahanan Palembang. Hanya dengan nasib baik yang memihak pada mereka, kemenangan bisa diraih.

Di antara kedua benteng-benteng yang dibangun, yang terbesar adalah Benteng Kuto Besak. Benteng ini mempunyai lokasi strategis dan bertempat di kawasan yang dikelilingi Sungai Musi di bagian selatan, Sungai Sekanak di bagian barat, dan Sungai Tengkuruk di bagian timur, dan Sungai Kapuran di bagian utara. Benteng ini dibangun oleh Sultan Muhammad Bahauddin. Ukuran bangunan mencapai 290 meter kali 180 meter. Pembangunan benteng dimulai pada 1780 dan selesai pada tahun 1797. Bangunan terbuat dari batu bata dengan perekat dari bahan batu kapur yang didatangkan dari pedalaman Sungai Ogan. Dinding benteng berukuran tebal 5 kaki dengan ketinggian dari tanah berkisar antara 22 hingga 24 kaki. Pada dindingnya dibangun tempat pengintaian dan lobang tembak, yang diperlengkapi dengan senjata meriam di atasnya yang berjumlah sebanyak 129 buah dari berbagai ukuran. Di sepanjang tembok tepian Sungai Musi dipasang pula meriam sebanyak 120 buah (Hanafiah, 1989:6-12). Benteng Kuto Besak diperkuat dengan dengan parit yang lebar di sekelilingnya (Laksana, 2013:45).

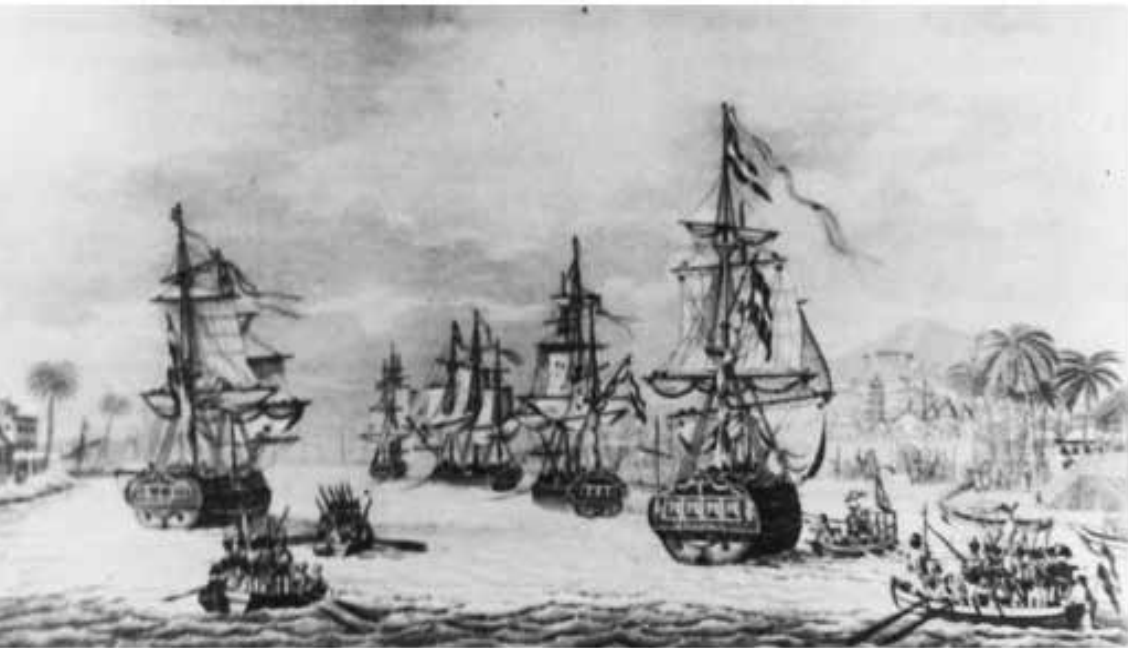


SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Benteng Kuto Besak.

Ketangguhan Benteng Kuto Besak diuji dalam pertempuran melawan pasukan Inggris pada tahun 1812 dan pertempuran melawan pasukan Belanda yang terjadi pada tahun 1819 dan 1821. Laporan yang dibuat A. Meis memberikan gambaran secara jelas tentang betapa sulit dan frustasinya pasukan Belanda untuk menembus pertahanan dan menaklukkan benteng ini dalam serangan yang dilakukan pada bulan Juni 1819. Berulang-kali serangan dilancarkan, namun tembakan korvet-korvet Belanda tidak mampu menjebol tembok benteng pertahanan Kuto Besak. Dalam sebuah serangan digambarkan:

“...tembakan-tembakan meriam yang dilancarkan dari kapal-kapal ke tembok kraton tidak membawa hasil yang diharapkan, karena tembok itu tingginya 27 kaki, lebarnya 7 kaki dan dibuat dari batu-batu bata, sedangkan korvet Eendragt hanya mempunyai meriam berukuran 4 pon dan korvet Ayak hanya mempunyai meriam panjang berukuran 8 pon” (dalam Hanafiah, 1989:16).



SUMBER: KOLEKSI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI, JAKARTA.

Ekspedisi Militer Belanda di Sungai Sungang Juni 1821 yang Dimenangkan Sultan Mahmud Badaruddin II.

Sumber sejarah setempat mencatat peluru-peluru Belanda hanya mampu melobangi tembok dengan kedalaman sejengkal. Tembakan meriam korvet Belanda yang gencar menghujani dengan tujuan menjebol benteng pertahanan Palembang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan Belanda. Justru sebaliknya, pasukan Belanda malahan kehabisan stok amunisi mereka dan lebih buruk lagi kehilangan sepertiga kekuatan pasukannya, sehingga akhirnya harus menanggung kekalahan dalam ekspedisi militer yang dilancarkannya (Hanafiah, 1989:16).

Kemenangan Sultan Badaruddin II dalam pertempuran melawan pasukan Belanda yang dikomandani Muntinghe mengharuskan Kesultanan Palembang mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menghadapi datangnya serangan balasan

yang lebih besar dari pihak Belanda. Strategi pertahanan yang diterapkan Sultan Mahmud Badaruddin II untuk menghadapi serangan balasan tersebut adalah dengan memusatkan pertahanan secara penuh di luar Palembang (Hanafiah, 1989:81). Persiapan pertahanan dilakukan pihak kesultanan dengan memasang meriam-meriam berbagai ukuran beserta amunisinya. Enam puluh lobang untuk melepaskan tembakan juga dipersiapkan mulai dari Sungsang hingga Pulau Kembaro. Tidak hanya itu, penguatan pertahanan lainnya dilakukan dengan menyiapkan rakit-rakit api dengan muatan berbagai bahan yang mudah terbakar yang siap diluncurkan setiap saat untuk menghalangi gerak maju kapal-kapal perang Belanda dan menghancurkannya (Farida, 2012a:2).

Beberapa benteng seperti Benteng Pulau Kembaro, Mangun Tapo dan Tambak Bayo diperkuat dengan tiang-tiang kayu yang dipancangkan dalam air. Di sebelah hilir di beberapa posisi, penguatan benteng-benteng dilakukan dengan pemasangan rantai besi dari satu tepi ke tepi lainnya untuk merintang gerakan kapal-kapal musuh (Laksana, 2013:45). Pada setiap benteng dipasang beberapa puluh meriam dengan ukuran berkisar antara 8 pon hingga 24 pon. Pada sisi darat dibangun pula pagar yang sangat kokoh dan menyamarkannya di balik pepohonan besar yang rimbun. Rawa-rawa dan anak-anak sungai yang ada di Palembang juga diintegrasikan sebagai bagian dari strategi perang, baik untuk kepentingan pertahanan maupun untuk melakukan penyerangan terhadap musuh (Farida, 2012a:2). Berbagai upaya untuk memperkuat pertahanan Palembang yang dilakukan Sultan Mahmud Badaruddin II diakui sendiri oleh pimpinan pasukan Belanda, J.C. Wolterbeek sebagai “pekerjaan raksasa dan fantastis” (Hanafiah, 1989:81).

Selain benteng pertahanan, persiapan perang juga dilakukan Sultan Badaruddin II dengan menunjuk Pangeran Ratu sebagai panglima. Putra-putranya yang lain atau orang-

orang kepercayaannya ditugasi memimpin benteng-benteng pertahanan yang penting. Pangeran Kramadiraja memimpin Benteng Tambakbaya yang diperlengkapi dengan 168 meriam dengan Sri Palembang yang berkaliber 24 pon sebagai penghulu meriam. Pangeran Ratu memimpin Benteng Martapura, yang bersebelahan dengan Benteng Tambakbaya. Pimpinan Benteng Kembaro diserahkan kepada Pangeran Suradilaga dan Benteng Manguntama dipercayakan kepada Pangeran Wirasentika. Benteng Kuto Besak diperlengkapi dengan 110 meriam, sedangkan benteng-benteng dari Kuto Besak ke Sungai Tengkuruk dipersenjatai dengan meriam-meriam berukuran sedang. Jumlah keseluruhan meriam mencapai 300 buah dengan beragam ukuran (Hanafiah, 1989:82).

Kuatnya benteng pertahanan Palembang benar-benar membuat Belanda sangat sulit untuk menaklukan Palembang. Belanda tidak mempunyai pilihan, selain mengerahkan seluruh kemampuan dan keunggulan militer, maupun kelihaiannya memainkan muslihat dan tipu daya. Selain mengerahkan kapal-kapal perang berukuran menengah dan kecil, kapal khusus didatangkan dari Negeri Belanda untuk mencabuti cerucup-cerucup kayu yang ditancapkan di dasar Sungai Musi karena hanya dengan cara ini pasukan Belanda bisa menerobos pertahanan Palembang. Tidak hanya itu, kekuatan pasukan Belanda dalam penaklukan Palembang pada tahun 1921 juga dilipatgandakan sepuluh-kali dibanding ekspedisi militer yang dikirimkan pada tahun 1819. Personel-personal militer tersebut sebagian besar didatangkan secara khusus dari beberapa kawasan Eropa dengan pertimbangan kondisi mereka lebih segar dan terlatih. Mereka direkrut dari kalangan orang-orang Perancis, Swiss, dan Jerman. Perekrutan dilakukan di Hardewijk (Belanda) dan Marseille (Perancis) (Hanafiah, 1989:95).

Aparat Pertahanan dan Keamanan

Berbagai ancaman yang datang dari kekuatan asing, pusat-pusat politik di sekitarnya, maupun gangguan keamanan internal dari para pelaku kejahatan menyadarkan para penguasa kesultanan tentang pentingnya aparat pertahanan dan keamanan yang tangguh dan bisa diandalkan. Hegemoni politik dan stabilitas masyarakat Kesultanan Palembang hanya bisa bertahan dan terjaga dengan baik apabila ditopang dengan aparat pertahanan dan keamanan yang memadai baik dalam jumlah maupun kemampuan. Tanpa aparat pertahanan dan keamanan yang memadai, Kesultanan Palembang tidak akan mampu menghadapi kekuatan-kekuatan politik lain yang ingin menjadikannya sebagai daerah bawahan khususnya bangsa-bangsa Barat yang mengincar hasil bumi dan kekayaan alam Palembang. Demikian pula, aparat keamanan yang memadai sangat penting bagi kesultanan untuk menciptakan rasa tenteram bagi masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitas-aktivitas kehidupan.

Sejauh ini, tidak ditemukan data sejarah yang dapat menyebutkan secara pasti tentang besarnya jumlah pasukan Kesultanan Palembang Darussalam. Data yang ada lebih merupakan angka perkiraan kasar. Di antaranya didapat sebuah keterangan bahwa dalam serbuan yang dilakukan Palembang terhadap Jambi pada bulan Desember tahun 1680 pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman, Palembang mengerahkan sebanyak 3.000 orang hulubalang. Serbuan ini melibatkan sekitar enam puluh kapal, dua puluh di antaranya ada di bawah komando Daeng Mangika, seorang Bugis (Hanafiah, 1995:207-208). Orang-orang Bugis di Kesultanan Palembang tergabung dalam pasukan ampilan atau pasukan perahu yang dipersenjatai dengan meriam-meriam kecil dan lela (Hanafiah, 1986:138).

Mereka ini dikenal sebagai pasukan dengan perlengkapan pakaian berupa baju zirah atau baju besi/rantai (Hanafiah, 1995:206).

Jumlah pasukan Palembang diperkirakan terus bertambah. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II, misalnya, dengan menghitung jumlah meriam kesultanan sebanyak 383 pucuk dan setiap pucuk meriam umumnya didukung dengan 40 orang pengikut, maka diperkirakan bahwa jumlah pasukan Palembang pada tahun 1821 berkisar antara 7.500 hingga 8.000 orang (Hanafiah, 1986:129). Pasukan ini, sebagaimana dikemukakan dalam laporan Radermacher (1842), bukan merupakan prajurit reguler, melainkan lebih menyerupai barisan sukarelawan. Mereka ini adalah para bawahan bersamasama dengan para pemimpin atau kepala-kepala daerah mereka yang siap dimobilisasi secara tradisional dalam sistem kesultanan untuk berperang ketika timbul ancaman berupa serangan musuh yang datang dari luar (Hanafiah, 1986:129).

Dalam kaitan dengan urusan keamanan, piagam yang dikeluarkan Raja Palembang mengatur tanggung-jawab para kepala rakyat/desa atau yang dalam istilah setempat dinamakan *proatin* untuk menangani urusan ini. *Proatin* bertugas menjalankan wewenang untuk menangkap dan memroses secara hukum para pelaku kejahatan baik dalam bentuk penipuan, pembunuhan, maupun kerusakan, serta menangkap orang-orang yang melarikan diri untuk menghindari dari jeratan hukum atas tindak kejahatan yang telah mereka lakukan. Apabila *proatin* tidak mampu menyelesaikan persoalan, maka kasus diteruskan kepada penguasa di Palembang untuk mendapatkan penyelesaian (Rahim, 1998:282-283).

Secara struktural urusan pertahanan dan keamanan Kesultanan Palembang Darussalam diserahkan kepada adipati, yang bergelar Pangeran Citra. Adipati adalah salah satu dari lima unsur utama yang menjalankan sistem pemerintahan kesultanan

yang dikenal dengan sebutan *Pancalang Lima*, di samping keempat lembaga lainnya, yakni sultan, pepatih, penghulu, dan jaksa negara (hakim). Adipati inilah yang memimpin kelompok prajurit atau hulu balang sultan, yang dalam istilah setempat disebut kelompok *pengalasan* (Rahim, 1998:67). Kelompok *pengalasan* mempunyai tugas sebagai pengawal keraton dan menjalankan pula tugas kepolisian di bawah komando Pangeran Citra (Hanafiah, 1995:171). Tugas lainnya dari kelompok pengalasan adalah menjalankan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana (De Roo de Faille, 1971:32-33). Adipati dipercaya sultan untuk menjalankan pemerintahan di daerah *sindang* atau daerah terluar Kesultanan Palembang. Adipati tidak dikenai beban pajak dan penyerahan upeti kepada sultan. Namun demikian, sebagai pemegang otoritas kekuasaan kesultanan di wilayah terluar, dia mempunyai kewajiban untuk melindungi perbatasan wilayah Kesultanan Palembang dari serangan pihak luar (Rahim, 1998:64-65).

Ilustrasi menarik mengenai peranan wilayah *sindang* sebagai basis kekuatan tenaga keprajuritan tampak jelas ditunjukkan oleh daerah Pasemah. Orang-orang Pasemah digambarkan bukan hanya sebatas sebagai bawahan sultan, bahkan mereka adalah kawan-kawan seperjuangan sultan. Mereka telah mengikatkan diri untuk menjalankan tugas penjagaan perbatasan (De Roo de Faille, 1971:40; Rahim, 1998:65). Mereka adalah orang-orang yang mempertahankan wilayah pedalaman Palembang dengan sangat gigih. Pasukan Belanda banyak menemui kesulitan untuk membuat mereka takluk di bawah kekuasaan kolonial. Meskipun pada suatu ketika berhasil dikalahkan, orang-orang Pasemah tidak lantas menyerah begitu saja. Setiap kali mendapatkan kesempatan, mereka selalu berusaha bangkit kembali dan menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlu waktu selama bertahun-tahun bagi Belanda dan hanya dengan pengorbanan yang tidak

kecil, kekuatan perlawanan yang dilancarkan oleh orang-orang Pasemah dapat dipatahkan (Yass, 1984:7-8).

Kemampuan pasukan Palembang dalam pertempuran juga diakui oleh Belanda. Hal ini terungkap dengan jelas dalam berbagai komentar yang diberikan oleh orang-orang Belanda yang terlibat dalam penyerangan terhadap Palembang. Panglima ekspedisi militer Belanda dalam penaklukan Palembang pada tahun 1821, Jenderal Mayor Hendrik Markus Baron de Kock, mencatat dalam buku hariannya bahwa keahlian pasukan Palembang dalam menembakkan meriam kearah tali-tali sauh kapal sangat merepotkan ekspedisi militer Belanda (Hanafiah, 1989:103). Kekuatan pasukan Palembang juga didukung oleh penguasaan yang baik atas medan pertempuran. Mereka sudah sangat mengenal dan akrab dengan lingkungan fisik Palembang. Apalagi dalam pertahanan Kesultanan Palembang, aspek lingkungan merupakan bagian dari strategi pertahanan mereka.

Salah satu kelemahan yang membuat pertahanan Kesultanan Palembang dapat digoyahkan dan akhirnya dapat ditembus Belanda setelah berulang-kali mencobanya adalah adanya intrik-intrik di lingkungan istana terutama dalam kaitan dengan suksesi kekuasaan. Persaingan dan ketidakpuasan yang berkembang di kalangan golongan bangsawan dalam penentuan pewaris tahta tidak jarang terjadi dan benih-benih kekeruhan ini kemudian sering dimanfaatkan dengan lihai oleh bangsa-bangsa Barat baik Inggris maupun Belanda untuk menerapkan politik pecah belah dan kuasai (*divide et impera*). Permainan menuju tahta kekuasaan di kalangan para bangsawan istana yang terlalu jauh tidak jarang menjadi pemicu yang melemahkan pertahanan kesultanan dan mendatangkan pusaran prahara yang menghancurkan keuasaan kesultanan (Hanafiah, 1995:173).

Dalam Perang Palembang tahun 1919 antara Palembang dengan Balanda, misalnya, selain mengandalkan ekspedisi kekuatan militer dalam skala besar, Belanda melakukan adu

domba dengan mendekati Pangeran Husin Dhiauddin (Sultan Ahmad Najamuddin II yang diangkat Inggris pada saat Raffles berkuasa), yang adalah adik Sultan Mahmud Badaruddin II. Belanda membujuk Pangeran Husin Dhiauddin untuk memihak Belanda dengan menjanjikan kedudukan sultan bagi putranya. Demikian pula, sejumlah bangsawan kesultanan didekati Belanda untuk mendapatkan informasi tentang pertahanan Palembang. Hal ini terbukti sangat bermanfaat bagi Jenderal Mayor Hendrik Markus Baron de Kock dan pasukannya dalam mengatasi bombardir meriam-meriam tersembunyi di sepanjang Sungai Musi pada serangan yang dilancarkan yang dalam ekspedisi militer sebelumnya telah banyak menelan korban jiwa dari para serdadu Belanda (Hanafiah, 1989:95-99)

Fungsi Keluarga

Keluarga mempunyai kedudukan penting dalam konteks pertahanan dan keamanan Kesultanan Palembang. Konflik keluarga khususnya di kalangan keluarga istana merupakan ancaman serius bagi pertahanan dan keamanan wilayah kesultanan. Hal ini menjadi persoalan yang banyak menyita perhatian penguasa Palembang. Keberhasilan penguasa untuk mengatasi perpecahan dan konflik internal keluarga menjadi kunci penting bagi terjaganya stabilitas politik dan situasi yang kondusif untuk memajukan Kesultanan Palembang secara ekonomi, sosial dan politik. Hal ini tidak selalu dapat diwujudkan. Perpecahan dalam keluarga istana seringkali membuat Kesultanan Palembang bersikap mendua dalam hubungannya dengan Mataram dan VOC, sebuah dilema antara mempertahankan loyalitas pada Mataram atau menjalin

persahabatan dengan VOC (Hanafiah, 1995:160-161).

Kemampuan dalam mengatasi konflik keluarga dengan baik diilustrasikan Kesultanan Palembang pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I. Sebelum menduduki tahta Kesultanan Palembang, Mahmud Badaruddin I bernama Pangeran Jaya Wikrama. Pergantian tahta dari ayahnya, Sultan Muhammad Manshur kepada adiknya, Pangeran Sri Teruna, menyebabkan terusirnya Pangeran Jaya Wikrama dari Palembang. Dalam perantauannya hingga di Kerajaan Siam, Pangeran Jaya Wikrama berhasil menyusun kekuatan untuk merebut Palembang. Serbuan militer yang dilakukannya berhasil mengalahkan pasukan Palembang dan mengantarkan Pangeran Jaya Wikrama ke tahta kekuasaan kesultanan Palembang pada tahun 1724 dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin I. Saat berkuasa Sultan Mahmud Badaruddin I berusaha menjaga keharmonisan keluarga istana dengan mengangkat sultan sebelumnya, Sri Teruna, pada posisi sebagai penasihat kesultanan. Kedudukannya sebagai sultan juga direstui Pangeran Adipati Mangkubumi, kakak tertuanya yang memutuskan tinggal di Jambi. Kondisi hubungan keluarga yang relatif harmonis memungkinkan Sultan Mahmud Badaruddin I mempunyai kesempatan yang baik untuk menjalankan program modernisasi Kesultanan Palembang Darussalam sehingga wilayah ibukota tampil sebagai sebuah kota modern (Mahmud, 2007:45-47).

Sebaliknya, ketidakmampuan untuk selalu menjaga keharmonisan keluarga juga bisa menjadi pemicu yang mengancam pertahanan dan stabilitas politik kesultanan. Potensi konflik di lingkungan keluarga kesultanan tidak terlepas dari kenyataan bahwa sultan Palembang, sebagaimana para penguasa tradisional pada umumnya, seringkali mempunyai banyak istri dan keturunan. Bibit-bibit persaingan karena ambisi-ambisi pribadi di antara keluarga dan kerabat kesultanan demi tahta kekuasaan tidak selalu dapat dihindarkan. Runtuhnya

Kesultanan Palembang Darussalam tidak terlepas dari adanya konflik kepemimpinan di kalangan keluarga istana, di samping adanya faktor kekuatan eksternal khususnya perkembangan imperialisme Inggris dan Belanda yang bermaksud menguasai Palembang dengan menerapkan politik adu-domba. Keberhasilan kekuatan imperialis dalam menaklukkan Kesultanan Palembang Darussalam dengan jelas memperlihatkan bagaimana keberhasilan itu hanya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu mengoyak peranan keluarga dalam pertahanan Palembang sehingga kemudian menyebabkan terjadinya konflik kepemimpinan antara Sultan Mahmud Badaruddin II (*Sultan Tuo*) dan Sultan Ahmad Najamuddin II (*Sultan Mudo*) yang akhirnya membawa datangnya kehancuran bagi Kesultanan Palembang Darussalam (Farida, 2012b:8-10).

Bab 7

Bangunan Bersejarah



Palembang merupakan kota dengan kondisi geografis yang memberikan peluang bagi masuknya kebudayaan asing, seperti Cina, India, Arab, dan Eropa melalui kegiatan perniagaan dan kolonialisasi. Kebudayaan asing yang datang tersebut memberikan akulturasi, baik dari aspek interior maupun eksterior bangunan yang saling mengisi satu sama lainnya. Proses akulturasi adalah suatu proses interaktif dan berkesinambungan yang berkembang melalui komunikasi para pendatang dengan lingkungan sosio-budaya yang baru. Salah satu bentuk komunikasi dalam sebuah akulturasi budaya dapat dilihat pada hasil peninggalan berupa artefak, baik berupa karya seni rupa maupun seni arsitektur. Palembang merupakan salah satu wilayah yang memiliki berbagai bangunan dengan akulturasi dari beberapa kebudayaan tersebut. Bangunan-bangunan yang khas dengan akulturasi dari berbagai kebudayaan di Palembang, antara lain Masjid Agung Palembang, makam raja-raja Palembang, dan rumah limas.

Masjid

Pada masa Kesultanan Palembang, agama Islam menjadi agama resmi kerajaan. Oleh karena itu, masjid sebagai tempat ibadah umat Islam banyak dibangun pada masa tersebut. Masjid-masjid tersebut antara lain: Masjid Agung Palembang, Masjid Merogan, dan Masjid Suro.

Masjid Agung Palembang

Masjid Agung Palembang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama bin Sultan Muhammad Mansyur Jaya Ing Laga atau dikenal dengan nama Sultan Mahmud Badaruddin I yang memerintah tahun 1724-1750. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 15 September 1738.

Selanjutnya, Masjid Agung Palembang diresmikan pada hari Senin tanggal 26 Mei 1748. Masjid Agung Palembang dikenal dengan nama Masjid Sultan (Arsip YKPD, 2002; Hanafiah, 1988:14; Heritage, TT).

Masjid Agung Palembang, sebenarnya bukanlah masjid pertama di kota Palembang. Hal ini dibuktikan dengan laporan kepala pengusaha (*opper koopman*) VOC di Palembang, Jonathan Claessen tanggal 30 Juni 1663 yang menyatakan bahwa dia tidak mendapatkan kuli untuk membangun Loji Sungai Alur karena penduduk Palembang sedang membangun sebuah masjid. Jika dikaitkan dengan masa pemerintahan Kesultanan Palembang, maka masa ini terjadi pada saat kepemimpinan Sultan Abdurrahman yang bergelar Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam (1659-1706). Masjid ini sekarang menjadi nama sebuah jalan di Kota Palembang, yaitu Jalan Masjid Lama (Hanafiah, 1988: 7).

Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, Masjid Agung Palembang diurus oleh Pangeran Nata Agama atau penghulu yang dalam kedudukan protokoler kekeratonan, ia duduk di sebelah kanan sultan (De Roo de Faille, 1971). Dengan menyandang gelar pangeran, maka penghulu juga mempunyai tugas mengadili hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, mengawasi, dan mengatur semua kegiatan keagamaan. Kekuasaan Pangeran Nata Agama tidak hanya terbatas di pusat kerajaan, tetapi juga di daerah pedalaman yang di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya dimasukkan dalam bab ke-4 di bawah judul “aturan kaum” (Tim Peneliti Hukum Islam, 1993:65).

Pada masa Sultan Ahmad Najamuddin dan Sultan Badaruddin II, kehidupan agama Islam di Palembang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini terjadi karena keduanya merupakan orang-orang yang taat beragama dan selalu memberi contoh dengan menjadi imam sholat di Masjid

Agung Palembang. Para ulama mendapat tempat tersendiri dalam kehidupan sultan dengan selalu mendiskusikan berbagai persoalan keagamaan, bahkan dalam keadaan negara sedang berperang (Tim Peneliti Hukum Islam, 1993:82).

Masjid Agung Palembang berada di sebelah timur laut dari Benteng Kuto Besak dengan jarak sekitar 150 m. Lokasi bangunannya terletak di “pulau” karena dikelilingi sungai, yaitu sebelah selatan Sungai Musi, sebelah barat Sungai Sekanak, sebelah timur Sungai Tengkuruk, dan sebelah utara Sungai Kapuran. Bangunan Masjid Agung Palembang telah mengalami beberapa kali renovasi, dari masa Kesultanan Palembang hingga sekarang.

Pada awal berdirinya Masjid Agung Palembang, tidak terdapat menara masjid. Menara masjid yang terletak di sebelah barat laut (kiri masjid arah selatan Jalan Merdeka) dibangun pada tahun 1758 dengan tinggi 30 meter dan garis tengah 3 meter (Heritage, TT). Masjid Agung Palembang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 meter x 36 meter, dengan dilengkapi mihrab yang berada di dinding sebelah barat. Adapun atap masjid berbentuk tumpang terdiri dua susun. Puncak Masjid Agung berbentuk atap mustaka/kepala. Bentuk mustaka ini terjurai melengkung ke atas pada keempat ujungnya menyerupai bentuk atap pada bangunan Cina. Pintu masuk utama terdapat di sebelah timur, utara, dan selatan masjid. Di dalam ruang utama masjid terdapat empat tiang utama berbentuk persegi delapan dengan ukuran 0,50 meter x 0,50 meter setinggi 7 meter. Di sekeliling tiang utama terdapat tiang penunjang berbentuk segi delapan dengan ukuran 0,35 meter x 0,35 meter, setinggi 5 meter, sebanyak 12 buah. Tiang-tiang tersebut, pada bagian bawahnya sebagian besar telah diganti karena rusak.



SUMBER: CULTUREEL INDIE, 1939 (KOLEKSI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI)
Masjid Agung Palembang Tahun 1893.



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016
Masjid Agung Palembang Sekarang.

Pada tahun 1893, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan penambahan teras yang dilengkapi dengan tiang-tiang bergaya *doric* dan pada ketiga pintunya dibentuk seperti gerbang beratap pelana yang ditunjang dengan tiang-tiang bergaya *doric*. Namun, pada tahun 1916, Pemerintah Kolonial Belanda kembali membongkar ketiga pintu gerbang tersebut. Pada tahun 1938, Pemerintah Kolonial Belanda kembali merenovasi bangunan Masjid Agung Palembang dengan menyatukan atap teras yang mengelilingi bangunan utama dengan atap masjid. Pada masa Pemerintah Republik Indonesia tahun 1952, di bagian teras Masjid Agung Palembang didirikan bangunan bertingkat dua, sehingga menutupi bangunan utama masjid. Di samping itu, dibangun pula pintu masuk utama di sisi timur yang berdenah persegi empat dan berbentuk kubah. Tahun 1970 di sebelah timur laut masjid dibangun menara setinggi 45 meter. Selanjutnya, renovasi terakhir dilakukan pada tahun 2000 dengan membongkar bagian teras masjid dan digantikan dengan sebuah bangunan berlantai tiga yang letaknya dipisah di sebelah timur masjid, tetapi tetap menutupi bangunan utama Masjid Agung Palembang (Jumhari, 2010: 80-81).

Masjid Merogan

Masjid Merogan didirikan pada tahun 1310 Hijriah (1889 Masehi) oleh Masagus H. Abdul Hamid bin Mahmud atau yang dikenal dengan nama Kyai Merogan. Pendirian masjid tersebut, dilakukan Kyai Merogan setelah kepulangannya dari tanah suci Mekah dengan membuat pernyataan tertulis yang disebut Naskah Najar Mujai Lillahi Ta'ala, tertanggal 6 Syawal 1310 Hijriah (Heritage, TT; Kota, TT). Penyebutan Merogan berawal dari nama Muara Ogan, tempat didirikannya Masjid Merogan. Penyebutan Muara Ogan lambat laun menjadi Merogan. Istilah ini kemudian tidak hanya untuk menyebut nama masjid, tetapi



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Masjid Merogan.

juga kyai/ulama yang mengajar di Merogan tersebut.

Lokasi Masjid Merogan terletak di sudut pertemuan Sungai Ogan, kira-kira 3 km dari pusat Kota Palembang. Gaya arsitektur Masjid Merogan mirip dengan arsitektur Masjid Agung Palembang. Luas bangunan Masjid Merogan pada saat didirikan berukuran 18,80 meter x 29,40 meter di atas rawa yang diuruk. Masjid Merogan adalah masjid yang pertama kali dibangun di wilayah Seberang Ulu. Sejak direnovasi pada tahun 1980, luas bangunan Masjid Merogan menjadi 40 meter x 41 meter. Di dalamnya terdapat soko guru berbentuk segi delapan dengan ukuran tinggi 5,5 meter dan lebar 0,30 x 0,27 meter. Di dalam lingkungan Masjid Merogan terdapat makam Masagus H. Abdul Hamid (Kota, TT).

Masjid Suro

Masjid Suro dibangun oleh Ki Haji Abdurrahman Dalamat tahun 1310 Hijriah (1889 M). Masjid Suro terletak di Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Wilayah Suro. Oleh karena itu,



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Masjid Suro.

masjid ini dinamakan Masjid Suro.

Pada tahun 2001 atas kesepakatan pengurus Masjid Suro, namanya diganti menjadi Masjid Al-Mahmudiyah. Masjid Suro sebagian besar bangunannya berbahan kayu. Pada tiap-tiap tiang penyangga masjid terdapat kayu bulat yang tinggi dan lebar (Heritage, TT) Di samping itu, terdapat menara mirip pagoda pada sisi kanan Masjid Suro. Bentuk menara ini mirip dengan menara yang ada di sisi kiri Masjid Agung Palembang. Model bangunan menara yang ada di Masjid Suro menunjukkan terjadinya proses akulturasi budaya antara unsur-unsur kebudayaan Islam Palembang dengan kebudayaan Cina.

Benteng Kuto Besak

Benteng Kuto Besak terletak di tepi Sungai Musi dibangun oleh Sultan Muhammad Bahauddin bin Susuhunan Ahmad

Najammudin Adi Kesumo yang memerintah pada tahun 1776 – 1803 (Supriyanto, 2013: 61). Benteng Kuto Besak adalah keraton keempat dari kesultanan Palembang yang dibangun pada hari Minggu tanggal 15 Jumadil Awal 1193 H atau 1772 M dan diresmikan pada hari Senin tanggal 23 Sakban 1211 H atau tanggal 23 Februari 1790. Secara keseluruhan Benteng Kuto Besak berbentuk persegi panjang dengan ukuran 288,75 m x 183,75 m, dengan tinggi 9,99 meter (30 kaki) dan tebal dinding 1,99 meter (6 kaki) yang menghadap ke arah tenggara dan di tepi Sungai Musi. Di dalam Benteng Kuto Besak terdapat Keraton Kesultanan Palembang Darussalam (Arsip YKPD, 5). Di tiap-tiap sudut benteng terdapat bastion, tiga bastion di sudut utara, timur, dan selatan berbentuk trapesium, sedangkan bastion sudut barat berbentuk persegi lima. Terdapat tiga pintu gerbang pada Benteng Kuto Besak, yaitu: di sisi timur laut, barat laut, serta gerbang utama di sisi tenggara. Pintu masuk Benteng Kuto Besak yang menghadap Sungai Musi disebut Lawang Kuto, sedangkan pintu masuk lainnya disebut Lawang Buritan



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Pintu Depan Benteng Kuto Besak.

(Historical, TT).

Benteng Kuto Besak pernah dibakar oleh Belanda pada bulan Ramadhan tahun 1236 H, sebelum Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (Sultan Mahmud Badaruddin II) diasingkan oleh Belanda ke Ternate Maluku Utara. Sejak tanggal 1 Juli 1821, Benteng Kuto Besak diduduki Belanda di bawah komando Jenderal Mayor Hendrik Markus Baron de Kock (Natodiraja, 1984:4). Selanjutnya, Benteng Kuto Besak dipakai oleh Susuhunan Husin Dhiauddin (Sunan Mudo) bersama-sama dengan Belanda. Saat ini, Lokasi Benteng Kuto Besak difungsikan sebagai pusat pemerintahan, antara lain Kesdam II Sriwijaya, Kantor Pos, Telkom, Pegadaian, Sub Den Pom, dan lain-lain. Secara geografis, Kawasan Benteng Kuto Besak mempunyai batas-atas wilayah berupa sungai-sungai yang mengelilinginya, yaitu Sungai Musi, Sungai Sekanak, Sungai Kapuran, dan Sungai Tengkuruk. Meskipun Sungai Kapuran dan Sungai Tengkuruk saat ini sudah tidak dapat dijumpai, tetapi polanya masih dapat dilihat, di mana Sungai Kapuran menjadi Jalan Kapuran dan Sungai Tengkuruk menjadi Jalan Sudirman (Jumhari, 2010:78-79).

Bentuk dinding pada tembok keliling Benteng Kuto Besak memiliki perbedaan pada masing-masing sisinya, demikian pula dengan tingginya. Dinding tembok sisi timur laut mempunyai ketebalan yang sama dan dihiasi dengan profil. Adapun ketinggian dinding tembok bagian depan adalah 12,39 m dan pada bagian dalam memiliki ketinggian 13,04 m, sehingga bagian atasnya membentuk bidang miring yang landai. Pada dinding sisi tenggara dan dinding sisi timur laut dilengkapi dengan celah intai yang berbentuk persegi dengan bagian atas melengkung. Dinding tembok sisi barat daya mempunyai bentuk yang berbeda. Secara umum, dibagi dua karena pada bagian tengahnya terdapat pintu gerbang. Dinding tembok sisi barat daya bagian selatan mempunyai bentuk yang bagian bawahnya lebih tebal

daripada bagian atas yaitu 1,95 m dan 1,25 m, tetapi pada bagian dalam dan luar dinding memiliki ketinggian yang sama yaitu 2,5 m. Selanjutnya, dinding tembok sisi barat daya bagian utara mempunyai bentuk lebih tebal pada bagian bawah dari pada atasnya, yaitu 2,35 m dan 1,95 m. Ketinggian dinding bagian dalam dan luar adalah 2,5 m. Dinding tembok sisi barat laut memiliki bentuk yang hampir serupa dengan dinding tembok barat daya bagian selatan. Tebal dinding bagian bawah adalah 1,6 m, bagian atas 1,15 m, dengan ketinggian dinding 2,25 m. Adapun gaya arsitektur bangunan di dalam Benteng Kuto Besak adalah arsitektur Indish yang berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20 (Jumhari, 2010:80-81).

Benteng Kuto Gawang

Benteng Kuto Gawang merupakan keraton pertama dari Kesultanan Palembang sekaligus pusat pemerintahan. Kata “gawang” dalam bahasa Jawa Kuno diartikan “terang benderang (Mardiwarsito, 1986). Secara alamiah lokasi Benteng Kuto Gawang cukup strategis dan secara teknis diperkuat dengan dinding tebal dari kayu unglan dan *cecurup* yang membentang antara Plaju hingga Pulau Kemaro, sebuah pulau kecil yang letaknya di tengah Sungai Musi. Benteng Kuto Gawang berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1039 m, baik panjang maupun lebarnya. Adapun bahan bangunan Kuto Gawang terdiri dari kayu besi dan kayu unglan dengan ketebalan 30 x 30 cm perbatang dengan tinggi dinding 24 kaki (7,25 meter) (Seno, dkk, 2009:34).

Pada tahun 1610, Kesultanan Palembang menjalin hubungan dagang dengan VOC. Hubungan ini berlanjut dengan keinginan VOC untuk memegang monopoli



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITIAN, 2016

Bekas Lokasi Benteng Kuto Gawang yang sekarang dijadikan Pabrik Pupuk Sriwijaya.

perdagangan, namun keinginan tersebut ditentang oleh sultan Palembang yang bernama Pangeran Siding Rejek (Pangeran Ratu Mangkurat) bin Pangeran Siding Pesarean. Akibatnya, terjadilah perselisihan, sehingga terjadi penyerbuan ke Benteng Kuto Gawang yang disertai dengan pembumihangusan pasukan VOC dipimpin oleh Joan van Der Laen pada tahun 1659 (Arsip YKPD, 5). Selanjutnya, Pangeran Siding Rejek mengungsi ke Saka Tiga sampai meninggal di sana. Setelah peristiwa itu, pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Abdurrahman Cinde Walang, pusat pemerintahan Kesultanan Palembang dari Benteng Kuto Gawang dipindahkan ke Beringin Janggut (Seno, dkk, 2009: 32) di tepi Sungai Tengkuruk, di sekitar Pasar 16 Ilir Palembang. Lokasi Benteng Kuto Gawang, sekarang telah dijadikan Pabrik Pupuk Sriwijaya. Sejak dialihfungsikan menjadi Pabrik Pupuk Sriwijaya pada tanggal 24 Desember 1958, Kondisi Benteng Kuto Gawang telah hilang karena dipergunakan sebagai perumahan, perkantoran, dan Pabrik

Pupuk Sriwijaya (Arsip YKPD, 5).

Keraton Beringin Janggut

Keraton Beringing Janggut dibangun pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Abdurrahman Cinde Walang setelah Benteng Kuto Gawang tidak dapat dipergunakan lagi karena dibakar oleh VOC pimpinan Joan van Der Laen pada tahun 1659 (Seno, dkk, 2009: 32). Lokasinya sekarang terletak di Jalan Beringin Janggut Palembang dan telah menjadi kompleks pertokoan. Keraton Beringin Janggut dibatasi oleh sungai-sungai yang saling berhubungan yaitu Sungai Musi di selatan, Sungai Tengkuruk di barat, Sungai Penedan di utara, dan Sungai Rendang atau Sungai Karang Waru di timur (Arsip YKPD, 5).

Keraton Kuto Kecil

Keraton Kuto Kecil dipergunakan oleh sultan Palembang sebelum dibangunnya keraton di dalam Benteng Kuto Besak. Keraton Kuto Kecil memakai bahan kayu. Pembangunan Keraton Kuto Kecil dikerjakan oleh pekerja-pekerja tangan dengan sangat teliti dan sempurna. Menurut Laporan Tim Peneliti Hukum Islam Palembang Di Kesultanan Palembang (1993:80) mereka diperkirakan berasal dari penduduk Tanjung Atap atau Tanjung Batu. Hal ini karena penduduk marga ini berasal dari keturunan tukang tersebut. Para pekerja bangunan pada masa ini, telah memperhitungkan sedemikian rupa bangunan keraton, sehingga kekokohan dan detail tiap-tiap bangunan tidak dapat diperbaiki lagi bahkan oleh pekerja



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Rumah Residen Belanda Di Lokasi Keraton Kuto Kecik yang sekarang menjadi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II.

tangan bangsa Eropa sekalipun. Oleh karena itu pada tahun 1823, pemerintah Kolonial Belanda membongkar Keraton Kuto Kecik. Selanjutnya, di lokasi tersebut dibangun rumah Residen Belanda. Bentuk bangunan Keraton Kuto Kecik tidak diketahui lagi (Jumhari, 2010:82). Pada saat ini, bangunan rumah Residen Belanda di lokasi Keraton Kuto Kecik dijadikan Musium Sultan Mahmud Badaruddin II. Lokasinya di antara Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak (Arsip YKPD, 5).

Makam-Makam Sultan Palembang

Bangunan-bangunan kepurbakalaan masa pertumbuhan Islam di Palembang yang nyata dari masa kini telah menjadi khasanah budaya yang ikut menjadi bagian dari kebudayaan nasional. Bangunan tersebut adalah makam para raja Palembang

dan keluarganya, serta makam para ulama dan hulubalang kerajaan. Rancang bangun makam raja-raja Palembang tidak serta merta mengambil teknologi dunia Islam, seperti Arab, Persia, dan Gujarat melainkan mengadaptasikan arsitektur lokal genius yang sudah ada sebelumnya, baik yang bersifat Hindu/Budha ataupun punden berundak-undak. Oleh karena itu, makam Sultan Palembang beserta keluarganya terdapat hiasan ukiran-ukiran berbentuk bunga, sulur-suluran, dan bentuk hiasan lainnya. Bahkan ada hiasan yang membentuk timbangan atau mahkota raja. Hiasan makam tidak terbatas pada jirat atau nisannya, tetapi juga pada cungkupnya, pagar, gapura, dan lain sebagainya. Terdapat hiasan berbentuk kronogram (gambar bermakna penanggalan) dan hiasan lambang keabadian yang dapat dilihat pada kompleks makam Kawah Tengkreup, Geding Suro, Sabe Kingking, Sultan Agung, Lemabang. Adapula hiasan berbentuk gunung yang ditempatkan di belakang nisan kepala atau nisan bagian kaki. Bentuk gunung ini bercampur dengan hiasan floralistik, bentuk sulur-suluran, dan hiasan yang membentuk bunga teratai atau bunga padma/lotus (Seno, dkk, 2009:3-4).

Pada umumnya, bangunan makam raja-raja Palembang berbentuk persegi empat terbuat dari batu, yang tutupnya di atas berbentuk kubah dengan satu jalan masuk menuju ke makam yang diberi pintu dari kayu. Pada tempat kepala dan kaki makam, dihias dengan suatu batu yang dipahat berbentuk persegi panjang tetapi ke bawah menyempit dengan tinggi setengah kaki (Sevenhoven, 1971:23). Ragam hias yang ada pada pahatan batu terlihat sangat indah dan mengandung pralambang/pralampira yang menyiratkan identitas dan eksistensi seseorang yang dimakamkan. Ada banyak kompleks makam raja-raja atau sultan Palembang Darussalam, yang tersebar di Palembang, bahkan di luar Palembang. Makam-makam tersebut, antara lain.



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Makam Gede ing Suro.

Kompleks Makam Gede ing Suro

Di kompleks makam Makam Gede ing Suro terdapat makam Kiai Gede ing Suro Tuo bin Pangeran Siding Lautan (1573-1590) beserta keluarganya, termasuk makam Pualang Cian Cin (Hasan I-Din Sontan) dan Raden Kusumoningrat. Lokasi makam terletak di ujung Jalan Haji Umar, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang. Kompleks makam Ki Gede ing Suro di kelilingi oleh parit, di sebelah selatannya terdapat Sungai Musi. Bangunan yang masih dapat dilihat adalah kompleks makam yang terdiri dari tujuh buah bangunan berbentuk pondasi datar. Tiap-tiap bangunan terdapat makam yang jumlahnya bervariasi. Makam-makam di kompleks Kiai Gede ing Suro tidak terdapat jirat dan nisannya terbuat dari kayu ulin dengan tipe Demak Tralaya, beberapa nisannya memiliki inskripsi dalam Bahasa Arab yang kondisinya telah lapuk, sehingga sulit dibaca (Seno, dkk, 2009:5).

Makam Nyi Geding Pembayun

Di makam Nyi Geding Pembayun dimakamkan Nyi Geding Pembayun bin Kimas Anom yang bersuamikan Pangeran Tumenggung Mancanegara. Dia merupakan ibu dari Pangeran Siding Pesarian Ratu Mangkurat yang menurunkan sultan-sultan Palembang Darussalam. Lokasinya terletak di Jalan Segaran, 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang (Arsip YKPD, 2002:6).

Makam Candi Angsoko

Di makam Candi Angsoko terdapat makam Pangeran Madi Angsoko bin Kimas Anom Adipati Ing Suro Kiai Geding Suro Mudo. Ia memerintah Kesultanan Palembang pada tahun 1003 – 1038 H atau 1595 – 1629 M. Lokasinya terletak di Jalan Candi Angsoko 20 Palembang (Arsip YKPD, 2002:6).

Kompleks Makam Candi Laras

Pada kompleks makam Candi Laras terdapat makam Pangeran Madi Alit (Ketib Abang) bin Kimas Anom Adipati ing Suro Kiai Geding Suro Mudo. Ia memerintah Kesultanan Palembang pada tahun 1038 – 1039 H atau 1629 – 1630 M. Lokasinya terletak di sebelah Rumah Sakit Kristen Kharitas Jalan Sudirman Palembang (Arsip YKPD, 2002: 6).

Kompleks Makam Sabo Kingking

Sabo Kingking adalah makam Pangeran Siding ing Kenayan bin Kimas Adipati yang letaknya tidak jauh dari kompleks pemakaman Ki Gede ing Suro di 3 Ilir Palembang, tepatnya di Sabo Kingking 1 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Pangeran Siding ing Kenayan memperistri cucu Ki Gede Ing Suro bernama Ratu



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITIAN, 2016

Makam Sabo Kingking.

Sinuhun. Pada masa pemerintahannya, ia membuat Undang-Undang Simbur Cahaya yang berlaku di wilayah Sumatra Selatan (Depbudpar Sumatra Selatan, 2004:22).

Di dalam kompleks makam Sabo Kingking, juga terdapat makam Pangeran Siding Pesarean bin Pangeran Kiai Tumenggung Mancanegara, Ratu Sinuhun bin Pangeran Kiai Tumenggung Mancanegara (Arsip YKPD, 2002: 6). Makam Sabo Kingking berbeda dengan makam-makam lainnya. Kompleks makam Sabo Kingking dikelilingi kolam dan berada di sekitar rawa-rawa. Kompleks makam Sabo Kingking juga dikenal dengan nama Telaga Batu karena pernah diketemukan prasasti telaga batu yang berasal dari abad ke-7 masehi dari masa Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan hasil foto udara dapat diketahui bahwa situs ini berada pada sebuah pulau kecil berbentuk persegi empat yang keempat sisinya menghadap arah mata angin (Seno, dkk, 2009:6).

Kompleks Makam Sako Tigo (OKI)

Di kompleks Makam Sako Tigo (Ogan Komering Ilir/ OKI) dimakamkan Pangeran Siding Rejek bin Pangeran Siding Pesarean yang mengungsi ke Sako Tigo karena keratonnya (Kuto Gawang) dibakar pada tahun 1659 oleh Pasukan VOC Belanda. Ia tidak mau kembali memerintah di Palembang sampai wafat di Sako Tigo OKI. Lokasi makam di Sako Tigo Tanjung Raja, Ogan Komering Ilir (Arsip YKPD, 2002:6).

Kompleks Makam Candi Walang

Di dalam kompleks Makam Candi Walang, dimakamkan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam (Kiai Mas Endi, Pangeran Ario Kesumo Abdurrohimi bin Pangeran Siding Pesarean. Ia memerintah Kesultanan Palembang pada tahun 1069 – 1118 H atau 1659 – 1706 M. Lokasinya terletak di Jalan Candi Walang 24 Ilir Kecamatan



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Makam Candi Walang.

Iilir Barat I Palembang, Belakang Pasar Cinde Palembang (Arsip YKPD, 2002:6).

Kompleks Makam Kebon Gede.

Di Makam Kebon Gede Palembang, terdapat makam Sultan Muhammad Mansyur Jaya Ing Laga bin Susuhunan Abdurrahman. Ia memerintah Kesultanan Palembang pada tahun 1118 – 1126 H atau 1706 – 1714 M. Lokasinya terletak di Jalan Sultan Muhammad Mansyur 32 Iilir Kecamatan Iilir Barat II Palembang (Arsip YKPD, 2002:6).

Makam Sultan Agung

Lokasi makam Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno bin Susuhunan Abdurrahman yang memerintah tahun 1126 – 1136 H atau 1714 – 1724 M.terletak di Jalan Sultan Agung Palembang, tepatnya di samping masjid dan Kantor Lurah 1 Iilir Palembang. Saat ini, lokasi makam Sultan Agung banyak diambil untuk sekolah dan Kantor Lurah 1 Iilir Palembang (Arsip YKPD, 2002:6).

Kompleks Makam Kawah Tengkreup

Kawah Tengkreup adalah nama sebuah kompleks makam Sultan Mahmud Badaruddin I, salah seorang dari raja Palembang yang memerintah pada abad ke-18. Nama tengkreup dipakai untuk menyebut kompleks makam ini karena pada atap bangunan yang menaungi makam Sultan Mahmud Badaruddin I terbuat dari beton dan berbentuk kawah yang tertelungkup. Kawah adalah sejenis kuili besar yang digunakan untuk memasak (Dinas Budpar Sumatra Selatan, 2004: 21). Penamaan makam diambil dari bentuk kubah berupa Kawah (Kuili) yang Tengkreup (tertelungkup)

Di dalam kompleks Makam Kawah Tengkreup Lemabang Palembang terdapat beberapa makam Sultan Palembang Darussalam beserta para zuriatnya, antara lain: Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama bin Sultan Muhammad Mansyur Jaya Ing Laga yang memerintah pada tahun 1136 – 1171 H atau 1724 – 1758 M, Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesuma bin Sultan Mamud Badaruddin Jaya Wikrama yang memerintah tahun 1171 – 1190 H atau 1758 – 1776 M, Sultan Muhammad Bahauddin bin Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo yang memerintah tahun 1190 – 1218 H atau 1776 – 1803 M, dan Susuhunan Husin Dhiauddin (Sultan Mudo) bin Sultan Muhammad Bahauddin saudara kandung Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (makamnya pada tanggal 16 Juni 1986 dipindahkan dari Krukut Jakarta ke Kompleks Makam Kawah Tengkreup), Pangeran Adipati Abdurrahman bin Sultan Muhammad Bahauddin. Lokasi makam Kawah Tengkreup



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Makam Kawah Tengkreup.

di Ternate. Di tempat tersebut, dimakamkan Susuhunan Ratu Machmud Badaruddin (Sultan Mahmud Badaruddin II) bin Sultan Muhammad Bahauddin. Ia diangkat menjadi Sultan Palembang Darussalam pada hari Selasa tanggal 22 Dzulhijjah 1218 H atau 1803 M. Pada hari Rabu tanggal 3 Syawal 1236 H atau 3 Juli 1821, ia diasingkan oleh Belanda ke Ternate dan wafat pada hari Jumat, 26 November 1852 di Ternate dalam usia 87 tahun (Arsip YKPD, 2002: 6)

Rumah Limas

Rumah limas adalah rumah tradisional para penguasa Palembang yang muncul sejak zaman Kesultanan Palembang (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2006:39). Sejak tahun 1932, rumah limas dikenal pula dengan nama Rumah Bari, yang artinya rumah lama atau tua. Pemberian nama Bari setelah pemerintah kolonial mengubah fungsi rumah limas milik seorang Kapiten Arab bernama Pangeran Syarif Abdurahman Alhabsi menjadi museum dan diletakkan di Jalan Rumah Bari (Pemprov Sumsel, 2006:17-18).

Adapun kata limas secara morfologis berasal dari dua kata, yaitu lima dan emas. Oleh karena itu, lima emas dalam rumah limas Palembang mengandung maksud sebagai berikut: emas pertama ialah keagungan dan kebesaran, emas kedua ialah rukun damai, emas ketiga ialah rukun damai, emas ketiga ialah adab sopan santun, emas keempat ialah aman subur dan sentausa, serta emas kelima ialah makmur sejahtera. Motif dan lambang dari kelima emas tersebut, terdapat pada: (1) lima tingkatan kekijing yang melambangkan lima kemasyarakatan yang beradat, yaitu tertib dan beraturan, rukun, damai, aman, dan makmur; (2) pada bagian atap rumah yang berbentuk piramida yang agak



SUMBER: MUSEUM BALAPUTRADEWA PALEMBANG, DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016
Rumah Limas.

curam (acap kali melebihi 45 derajat), berikut kelopak-kelopak lembaran bunga dan simbar sebagai rangkaian bunga melati yang melambangkan keagungan dan pengayoman, adab sopan santun (Akib dkk, 1980:19).

Ciri khas rumah limas, yaitu atapnya berbentuk piramida terpenggal dengan kemiringan 45 – 60 derajat. Cucuran atapnya memanjang ke muka dengan bagian belakang lebih pendek (Saragih, dkk, 2015:52). Pada atap tersebut, biasanya ditutup dengan genteng model *belah buluh*. Nama ini diberikan karena bentuk genteng mirip dengan bambu dibelah dua dengan fungsi saling mengkait. Sebagai pengkokoh atap rumah dan sebagai pementas rumah, maka pada bagian bumbungan tiga tanduk kambing terbuat dari beton. Begitu pula di tiap-tiap ujung atap dan pada tempat pertemuannya. Berdasarkan nilai filosofisnya, seni budaya tanduk kambing adalah kelopak bunga melati atau bunga teratai sebagai lambang adab sopan dan santun atau lambang kesucian. Di tengah-tengah bumbungan

rumah terdapat suatu hiasan bernama simbar berupa rangkaian bunga melati yang sedang mekar. Pada kanan kiri simbar diberi ornamen berbentuk tanduk kambing, ada juga yang diletakkan di kiri dan kanan tutup cucuran atap bagian depan dan belakang rumah. Ornamen tersebut, selain sebagai hiasan juga berfungsi untuk menangkal petir. Ornamen tanduk kambing rumah limas mempunyai jumlah tertentu. Jika berjumlah dua menggambarkan Adam dan Hawa; jika berjumlah tiga menggambarkan matahari, bulan, dan bintang; berjumlah empat melambangkan sahabat nabi; dan jika berjumlah lima melambangkan rukun Islam (Akib, dkk, 1980: 26; Saragih, dkk, 2015:52).

Ketika seseorang akan bertamu, ia akan menaiki tangga terlebih dahulu. Tangga ini biasanya berjumlah ganjil. Menurut kepercayaan orang Palembang bahwa jumlah ganjil bermakna membawa keberuntungan bagi yang menempati. Di samping tangga biasanya disediakan gentong atau tempayan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah. Lantai rumah limas dibuat bertingkat-tingkat disebut *bengkilas*. Bentuk seperti ini secara arsitektur mengikuti bentuk atap yang terus menurun pada bagian depan, sehingga lantaipun menyesuaikan dengan tinggi atap. Tingkatan dalam rumah limas dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: (1) *bengkilas*, berfungsi untuk menerima tamu dan hajatan. *Bengkilas* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *bengkilas* bawah, *bengkilas* tengah, dan *bengkilas* atas (*pocok*). Pada setiap *bengkilas* dibatasi dengan papan yang disebut *kekijing*, dengan panjang sesuai dengan lebar rumah dengan tebal kurang lebih 5 cm dan tinggi 30 cm; (2) *pedalon* merupakan inti rumah, biasanya terdapat 1 – 3 kamar; (3) *parwon* yaitu dapur dan letaknya terpisah dari rumah (Saragih, dkk, 2015:53).

Ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah limas, umumnya berbentuk bunga dan daun berwarna kuning emas dan merah. Adapun makna filosofi yang terkandung pada ornamen tersebut adalah: (1) bunga matahari melambangkan

kehidupan; (2) bunga melati melambangkan kesucian; (3) bunga tanjung melambangkan ucapan selamat datang; dan (4) bunga mawar melambangkan penawar sakit dan penawar rindu (Saragih, dkk, 2015:57). Selanjutnya, untuk membangun rumah limas diperlukan bahan kayu. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu unglan, tembesu, dan kayu merawan. Makna unglan adalah tulen yang dalam bahasa Palembang, kata tulen berarti benar/betul. Adapun kayu tembesu, mengandung makna ketemu nafsu, yang disingkat menjadi kata temesu. Kata temesu, akhirnya disebut tembesu. Pilihan jenis kayu tembesu ini karena warna dari kayunya serta dagingnya yang padat dan susunan uratnya sesuai dengan selera nafsu. Kayu temesu sangat mudah dikerjakan untuk membuat bagian-bagian rumah adat limas, misalnya belandar, kuda-kuda, dinding, usuk, reng, dan lain sebagainya. Namun, adakalanya bagian-bagian tersebut, terbuat dari jenis kayu merawan, misalnya pada bagian dinding, pintu, dan jendela. Kata merawan mengandung makna menarik hati atau rupawan (Akib, dkk, 1980: 39-40).

Menurut kedudukannya di dalam masyarakat, maka rumah limas dibagi atas lima tingkatan sesuai dengan golongan penghuninya, yaitu golongan pangeran sampai dengan demang, alim ulama, kepala adat, cendikiawan, dan masyarakat biasa. Kedudukan yang dimiliki seseorang, selanjutnya tercermin dari ukuran rumah induk dari rumah limasnya.

Berikut tabel ukuran rumah limas Palembang.

Ukuran dan Luas Rumah Limas

NO	UKURAN RUMAH LIMAS	LUAS RUMAH INDUK LIMAS
1	Rumah Limas Besar	15 x 28 depa atau 22,5 x 42 meter 13x28 depa atau 19,50 x 42 meter
2	Rumah Limas Menengah	12 x 28 depa atau 18 x 42 meter 12 x 26 depa atau 18 x 39 meter
3	Rumah Limas Sedang	10 x 26 depa atau 15 x 39 meter 10 x 24 depa atau 15 x 36 meter
4	Rumah Limas Kecil	8 x 24 depa atau 12 x 36 meter 8 x 22 depa atau 12 x 33 meter
5	Rumah Limas Biasa	7 x 22 depa atau 10,5 x 33 meter 7 x 20 depa atau 10,5 x 30 meter

(SUMBER: AKIB, DKK, 1980: 24)

Di samping berdasarkan luas bangunan rumah limas, indikasi kebangsawanan nampak pada : (a) tingkatan pada lantai bengkilas yang dalam hal ini menentukan posisi tempat duduk seseorang saat berlangsung upacara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan di bengkilas yang lebih tinggi; (b) ornamen simbar dan tanduk kambing; (c) dekorasi atau ukiran-ukiran serta koleksi lain yang ada di dalam rumah limas tersebut. Biasanya indikasi kebangsawanan ditunjukkan dengan adanya ukiran berbentuk sinar matahari. Pengambilan bentuk sinar matahari ini karena pengaruh hiasan pada makam Islam dan tokoh penguasa abad 15-18 didapati hiasan matahari Majapahit. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan hiasan tersebut, dikaitkan dengan pengakuan dirinya sebagai keturunan Majapahit. Sejalan dengan menguatnya keimanan para bangsawan Palembang, maka hiasan sinar matahari tidak

utuh lagi karena dimasukkan pula unsur kaligrafi beraksara Arab untuk menyebut Nabi Muhammad SAW (Pemprov Sumsel, 2006:35).

Rumah limas dibangun di atas tiang-tiang yang cukup tinggi. Hal ini dimaksudkan demi keamanan dan kesehatan penghuninya. Guna mendukung itu, biasanya di sekitar pekarangan ditanami pepohonan. Pohon-pohon yang menjadi tanaman di dalam pekarangan rumah limas Palembang adalah pohon rawo-rawo dan rau (siro panji) yaitu satu macam pohon yang dapat hidup ratusan tahun, bentuknya tinggi, besar, dan kuat, serta jarang di sambar petir. Tumbuh daun-daunnya mulai sekitar dua meter dari tanah dan daunnya kecil dan rapat. Buahnya serupa mangga agak lonjong. Kegunaan pohon ini, sebagai penahan bahaya angin yang akan menjurus di rumah limas bagian atas, yaitu mulai dari lantai hingga atap. Angin yang menerjang pohon, terpaksa memutar ke bawah setinggi dua meter dari tanah dan berjalan langsung melewati kolong-kolong rumah limas. Hal ini sekaligus membersihkan udara kotor di sekitar rumah limas, terutama di bagian bawah. Dengan demikian, udara di dalam rumah selalu dalam keadaan baik.

Guna mendukung keamanan rumah limas, maka bagian depan rumah terdapat pagar yang biasa disebut dengan pagar tenggalong atau lawang kerang. Dimana dibelakang pagar tersebut, terdapat bengkilas bawah. Pagar tenggalong juga berfungsi sebagai fentilasi dan tempat untuk melihat tamu dari dalam rumah. Selanjutnya, di atas bengkilas bawah terdapat rangkaian papan yang disebut lawang angkatan atau lawang kipas. Pada bagian tengah lawang kipas terdapat pintu yang disebut lawang barotan. Lawang angkatan atau lawang kipas akan selalu tertutup, dan dibuka saat tuan rumah ada hajatan (Saragih, dkk, 2015:53-54). Di belakang rumah limas biasanya berbatasan dengan air. Oleh sebab itu, letak rumah limas dan

sebagain besar rumah tinggal biasa masyarakat Palembang. Pada bagian belakang rumah biasanya terletak di pinggir sungai dimana ditempatkan suatu garasi untuk menyimpan perahu.

Keberadaan rumah limas yang ada di sekitar Benteng Kuto Besak dan Masjid Agung Palembang terancam setelah pemerintah kolonial pada tahun 1821 memerintahkan untuk membongkar dan memindahkan semua rumah limas di lingkungan tersebut. Dengan demikian, rumah limas milik Pangeran Adipati dipindahkan ke kampung Adipatihan, karena itu pula sekarang menjadi Kampong Depaten. Selanjutnya, rumah limas milik Pangeran Mangkubumi dipindahkan ke 16 Ilir menjadi Kampong Kebumen sekarang, rumah limas milik Pangeran Penghulu Nata Agama Moehammad Akil dan Akib dipindahkan ke 18 Ilir menjadi Kampung Pengulon, rumah limas milik Pangeran Martowijaya dipindahkan ke 23 Ilir menjadi Kampung Kemartan sekarang. Berikutnya, rumah limas milik Pangeran Dipokesumo dipindahkan ke 13 Ilir menjadi Kampung Kedipan sekarang, rumah limas Pangeran Purbaya dipindahkan ke 16 Ilir menjadi Kampong Purban sekarang, dan rumah limas milik Pangeran Surio Nendito dipindahkan ke daerah Sungai Sekanak yaitu di belakang Rumah Sakit R.K. Charitas, Jalan Kapten A. Rivai Palembang (Akib, dkk,1980:49). Dewasa ini rumah limas yang ada merupakan bangunan lama, sedangkan bangunan baru jarang didirikan karena biaya pembuatan rumah limas yang mahal dan bahan baku kayu yang sulit didapat.

Bab 8

Seni dan Budaya Palembang



Kota Palembang menyimpan banyak kisah sejarah. Hal ini terbukti dengan banyaknya bangunan tradisional dan peninggalan budaya Kerajaan Palembang. Letak Palembang yang sangat strategis, menjadikannya sebagai pusat perdagangan internasional, sehingga tidak mengherankan jika Palembang pernah menjadi kerajaan besar dan berjaya di bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Di dalam perjalanan sejarah pembentukan kebudayaan Palembang, pada hakekatnya masyarakat Palembang mengalami proses kreatif yang menghadirkan sosok sintesis budaya baru sebagai akibat pertemuannya dengan kebudayaan asing. Dengan demikian, sosok budaya Palembang sekarang ini terbentuk dalam rentang waktu yang panjang dan rumit.

Berdasarkan sumber sejarah Melayu, cerita tutur Palembang, maupun sumber kolonial diketahui bahwa budaya Palembang mempunyai “keunikan”. Lingkaran budaya lokal genius dengan budaya asing (Hindu/Budha dan Islam) tercermin dalam kehidupan di lingkungan keraton dan masyarakat Palembang. Unsur-unsur sosio-budaya tersebut, tersebar di berbagai aspek kehidupan, antara lain: busana/pakaian (*fashion*), makanan (kuliner), bahasa, sastra, seni tari, dan sebagainya.

Busana (Fashion)

Sejak zaman neolithikum, bangsa Indonesia sudah mengenal cara membuat busana/pakaian. Dari alat-alat peninggalan zaman neolithikum tersebut, dapat diketahui bahwa kulit kayu merupakan pakaian manusia pada zaman prasejarah di Indonesia. Alat yang digunakan adalah alat pemukul kulit kayu yang dibuat dari batu. Di samping pakaian dari kulit kayu, dikenal juga bahan pakaian dengan menggunakan kulit binatang yang pada

umumnya dipakai oleh laki-laki sebagai pakaian untuk upacara ataupun pakaian untuk perang. Sejak zaman prasejarah, nenek moyang bangsa Indonesia juga sudah mengenal teknik menenun. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penemuan tembikar dari zaman prasejarah yang di dalamnya terdapat bentuk hiasan yang terbuat dari kain tenun kasar.

Penggalian arkeologis telah membuktikan bahwa pada sekitar abad 8-9 SM, telah dikenal istilah orang-orang yang memperdagangkan kisi, benang (*atukel*), mencelup dengan warna biru dan merah (*mangnila wungkudu*), menjual kapur (*manghupu*) yang banyak dipergunakan dalam campuran warna pembuatan kain (*padwihan*). Informasi tersebut, merupakan aktifitas yang mempunyai nilai ekonomi sosial yang tinggi. Sebab, selain untuk menambah penghasilan juga untuk persembahan kepada orang yang dihormati. Di dalam catatan musyafir Cina tahun 518 M disebutkan bahwa raja dari bagian utara Sumatra sudah memakai pakaian sutera dari Cina. Pada zaman Sriwijaya, di Sumatra dan di Jawa juga telah dikenal adanya kain patola sutera, serta bahan-bahan seperti benang dan sutera yang berasal dari pedagang Cina. Benang sutera kemudian dapat diproduksi sendiri oleh masyarakat Palembang sejak abad ke-15 karena untuk pertama kalinya masyarakat Palembang berhasil menanam pohon murbei dan menjinakkan ulat sutera. Bersamaan dengan itu, muncul pula kain tenun yang terbuat dari benang kapas di Sumatra, Jawa, dan Bali (Rohanah, dkk, 2009: 23-25).

Busana Palembang, berkembang seiring dengan lahirnya industri kerajinan tenun rakyat pada masa Kerajaan Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya yang strategis dan penghasil lada terbesar di Sumatra, menarik minat para pedagang dari Cina dan India. Oleh sebab itu, perkembangan tekstil di Palembang, baik teknologi, ragam hias, maupun corak warnanya sangat dipengaruhi sentuhan kebudayaan Cina dan India. Keadaan ini berlangsung sampai abad ke-15, dimana saat itu pula Islam



SUMBER: KOLEKSI MUSEUM BALAPUTRADEWA, DOKUMENTASI TIM PENULIS, 2016

Alat Tenun

yang dibawa oleh pedagang Arab mulai masuk ke Palembang, sehingga mempengaruhi motif dan ragam hiasnya.

Usaha kerajinan pakaian, selain dilakukan oleh setiap keluarga dan pengrajin dengan ketrampilan khusus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga dilakukan oleh perempuan istana yang disponsori oleh raja dan para pemuka kerajaan (Raouffaer, 1904: 31). Pada masa Kerajaan Sriwijaya, keahlian menenun, menjahit, membordir, dan membatik sangat penting bagi perempuan di lingkungan istana. Begitu pentingnya keahlian menenun bagi seorang perempuan, hingga ada kepercayaan bahwa perempuan yang tidak dapat menenun barang selempang kain, maka arwahnya akan disiksa. Kepercayaan tersebut, secara tidak langsung ikut melestarikan nilai-nilai budaya *fashion* yang khas. Di dalam suatu rumah tangga akan menjadi kebanggaan apabila terdapat seorang perempuan yang mampu menenun. Keahlian menenun menandakan bahwa ia seorang perempuan terhormat dan akan menjadi idaman bagi para pemuda untuk dapat mempersuntingnya.

Salah satu peninggalan busana adiluhung yang hingga kini masih bisa ditemui di Palembang adalah Songket Palembang. Songket Palembang mencapai kejayaan pada masa Kesultanan Palembang. Menurut laporan Batenburg dalam bukunya *Congres Java Instituut* sebagaimana yang dikutip oleh Akib, dkk (1980: 46) sebagai berikut.

“Kerajinan dan kesenian menghasilkan beragam benda yang mengagumkan, misalnya kain tenunan, sulaman renda, songket, peradan, pelangi, batik dan lainnya, termasuk seni ukir, pande emas, kuningan, keris, serta anyaman rotan”.

Keberadaan kain Songket Palembang merupakan salah satu bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yang sekitar abad XI setelah runtuhnya Kerajaan Melayu telah memegang hegemoni perdagangan laut di Selat Malaka. Negara-negara yang mempunyai hubungan dagang Kerajaan Sriwijaya antara lain India, Cina, dan Arab. Keberadaan hegemoni perdagangan ini menunjukkan sebuah kebesaran kerajaan maritim di nusantara pada masa itu. Keadaan geografis yang berada di lalu lintas antara jalur perdagangan Cina dan India membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim dan perdagangan internasional. Oleh sebab itu, perkembangan tekstil di Palembang, baik teknologi maupun corak hiasan, pewarnaan, terdapat sentuhan dari kebudayaan asing. Hasil tenun Palembang sangat disukai oleh para pedagang dari luar, terutama Cina karena hasil tenun Palembang sangat halus.

Kata Songket berasal dari kata tusuk dan cukit yang disingkat menjadi sukkit. Di dalam perkembangannya kata sukkit kemudian banyak dilafalkan sebagai sungkit. Kata sungkit ini lama-lama menjadi songket. Songket merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat

Palembang. Penggunaan kain songket sudah menjadi tradisi secara turun temurun. Di dalam upacara adat, songket menjadi ciri khas dan cermin status bagi pemakainya. Songket dalam keluarga kain tenun tangan disebut sebagai *the Queen of handwoven textile*. Sebutan yang pantas mengingat kerumitan proses pembuatannya, keindahannya, serta kemewahannya (Rohana, dkk, 2009:2-3). Keahlian menenun songket pada masyarakat Palembang diperoleh dari para pedagang dari India (Suarti,1989:5).

Pada masa Kesultanan Palembang, kain songket dikenal dengan sebutan “kain bersulam emas”. Penyebutan ini karena kain songket yang asli menggunakan benang emas empat belas atau dua belas karat, sehingga jika dasar kain sudah lapuk, maka benang emas dapat ditarik dan ditenun kembali. Songket dengan kualitas tinggi ini disebut Songket Emas Jantung. Hal ini sesuai dengan laporan Sevenhoven (1971:39), sebagai berikut.

“Para priyayi pada umumnya hidup di rumah mereka dalam keadaan sangat miskin. Dari tingkat pertama, mereka memiliki beberapa kain seprai yang indah disulam dengan benang emas atau dibias dengan bunga dan gambar-gambar dari emas, beberapa pakaian dibias dengan renda dan terbuat dari bahan-bahan lain yang mahal harganya..., mereka memamerkannya jika mereka melihat tamu atau kalau mereka keluar rumah.”

Pada umumnya, Songket Palembang mempunyai ragam hias tumbuh-tumbuhan, terutama bunga-bunga, geometris, dan campuran. Bagian pinggiran songket disebut tretes, lapis kedua disebut umpak ujung, dan selanjutnya disebut pengapit, sedangkan motif inti songket disebut kembang tengah. Ada kurang lebih 35 motif Songket Palembang yang dikelompokkan berdasar ragam hiasnya yaitu (1) Songket Lepus, seperti Lepus



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENULIS, 2016

Kain Songket

Nago Besaung, Lepus Bintang, Lepus Rakam; (2) Songket Bungo, seperti Bungo Cino, Bungo Inten, Bungo Pacik; (3) Songket Motif Campuran, seperti: Songket Jando Beraes, Limar Tabur Bintang (Abusofyan, 19 Januari 2016).

Bahan baku kain songket adalah benang emas, benang perak, benang sutera, dan benang super. Oleh karena itu, yang menjadi ciri utama Songket Palembang adalah penggunaan warna merah dan emas terang sebagai motif utama. Motif Songket Palembang menunjukkan gambaran akulturasi masyarakatnya. Sebagai contoh songket motif nago besaung (naga bertarung). Pada Songket Nago Besaung gambar dekoratif berupa motif naga sedang bertarung. Hal ini menunjukkan pengaruh Cina secara filosofis dalam budaya Palembang. Pada mitologi Cina, naga digambarkan sebagai ular bertanduk, bersisik keemasan, dan memiliki kaki empat. Naga melambangkan penguasa, sedangkan bola emas melambangkan kejayaan dan kemakmuran (Jumhari, 2010:86). Motif ini menunjukkan nilai kekuatan raja untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan kekuasaannya. Motif naga besaung merupakan motif yang tertinggi dalam

jajaran motif Songket Palembang (Syarofie, 2014:23).

Ketika masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Khalitatul Mukminin Sayidul Iman, ia menerapkan syariat Islam dalam pemerintahannya secara ketat. Oleh karena itu, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap semua sendi-sendi kehidupan dalam Kesultanan Palembang Darussalam, termasuk pola busana. Jika sebelumnya motif naga diyakini berbentuk seperti naga dalam mitologi Cina, maka bentuk naga kemudian mengalami penyesuaian dengan menyamarkan gambar naga tersebut (Syarofie, 2014:15).

Secara umum, pakaian pria maupun perempuan Palembang terdiri atas bermacam corak, warna, dan ragam. Di dalam berpakaian, terdapat tata tertib atau etiket, baik secara resmi maupun sehari-hari. Menurut Akib (2008), model pakaian pria Palembang, terdiri dari dua macam, yaitu pakaian sehari-hari dan pakaian adat upacara kebesaran Kerajaan Palembang. Pakaian pria sehari-hari sangat tergantung pada statusnya di dalam masyarakat. Pakaian seorang tumenggung berbeda dengan pakaian pangeran, pakaian seorang hulubalang berbeda dengan alim ulama, begitu pula pakaian saudagar dengan lainnya, dan seterusnya.

Berikut ini susunan pakaian pria pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Dimulai dari bawah, yaitu bercelana, berkain, berbadong sebagai penutup puset, berkeris, berkutang, berbaju, berpenutup kepala. Adapun corak dan bahannya juga berlainan, disesuaikan menurut kedudukan orang tersebut. Sebagai contoh seorang tumenggung dengan rangga, maka warna dan bahan pakaian berbeda. Adapun tata cara berpakaianya, selisihnya hampir tidak ada. Mereka berdua tidak menggunakan alas kaki, bercelana sutera tenun Palembang, berkain kencong bertenun, berbadong jadam tanpa permata, berkeris, berkutang, berbaju kelamkari landungan dan berikat kepala tanjak batik. Semakin tinggi kedudukan seseorang,



SUMBER: KOLEKSI MUSEUM BADARUDDIN II PALEMBANG, REPRO
DOKUMENTASI TIM PENELITI 2016

Pakaian Khas Palembang Pada Masa Lalu.

maka ia akan menggunakan alas kaki. Mulai dari alas kaki terompah biasa sampai alas kaki terompah permata. Begitu pula celana bersunting puncak rebung, badong, dan keris yang digunakan, mulai dari bertatahkan emas, intan, zamrud, mirah, dan seterusnya. Ada hal yang menarik terkait penggunaan pakaian kain kencong, yaitu tata cara berpakaian antara laki-laki yang sudah berkeluarga dengan laki-laki yang belum menikah.

Penggunaan kain kencong bagi laki-laki yang telah berkeluarga sedikit di bawah lutut, sedangkan lelaki yang belum menikah memakai kainnya di atas lutut (Akib, dkk, 1980: 56).

Adapun pakaian yang dikenakan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II lebih mewah jika dibandingkan dengan kaum kebanyakan. Ia mengenakan tutup kepala (tanjak) dari kain berwarna kehitaman, bajunya ditaburi dengan permata kecil terbuat dari emas yang serasi dengan warna bajunya, memakai sarung sutera warna merah tua yang separuh menutupi celana panjang (balabas) berwarna biru tua (Nato Dirajo, 1984:9). Secara umum, terdapat dua jenis pakaian sultan yaitu: (1) Stelan Kebaya Kelemkari, terdiri dari: tutup kepala (tanjak), tekep dado, baju kelemkari (kebaya ladong/panjang), celano balabas, tajong rumpak, badong (*belt*), keris (*dagger*), dan terompah (*slippers*); (2) Stelan Kebaya Pendek, sama seperti setelan kebaya kelemkari, yang membedakan ukuran lebih pendek (Abusofyan, 19 Januari 2016).

Pemakaian tanjak (tutup kepala) pada masa Kesultanan Palembang, selain taburan permata sebagai petunjuk status kebangsawanan, juga ditandai jumlah lipatan dari bagian bawah menuju puncak segitiga. Di samping itu, lipatan di bagian dasar (tepat dibagian dahi ketika dipakai) juga dinilai sebagai pembeda. Seorang sultan akan mengenakan tanjak berlipat tiga di bagian dasar dan berlipat pada kedua sisi menuju puncaknya. Bahan yang dipakai adalah batik. Sedangkan pembesar istana mengenakan tanjak berlipat tiga di bagian dasar dan berlipat di sebelah sisi menuju puncaknya dengan bahan batik atau songket. Bagi prajurit dan masyarakat biasa, maka tanjak yang dikenakan tidak terdapat lipatan dibagian dasar dan bagian menuju puncak dengan bahan songket. Ketinggian tanjak yang dikenakan sultan dan pembesar istana tidak lebih dari 5 cm. Semakin tinggi tanjaknya, makin rendah jabatannya (Syarofie, 2014:29).

Pada masa Kesultanan Palembang, pakaian berbentuk

songket hanya dikenakan oleh wanita. Seandainya, seorang pria mengenakan pakaian berbentuk songket, maka akan mendapat julukan *nangino* (banci). Berbeda dengan keadaan sekarang, kain songket dikenakan oleh pria dan wanita (Akib, dkk, 1980:55-56). Memang, pada masa Kesultanan Palembang, kain songket menjadi pakaian istimewa yang dipergunakan sebagai busana keluarga Kerajaan Kesultanan Palembang. Namun songket yang dipakai seorang pria, berfungsi sebagai tanjak dan *keradong* (pemakaiannya dilakukan dengan cara diselempangkan di bahu dengan ujungnya menjuntai ke dada). Pemakaian selendang songket sebagai *keradong* sampai saat ini masih dipakai di Palembang terutama pada tradisi masyarakat, misalnya upacara Marhaban (Jumhari, 2010: 85).

Model pakaian yang dikenakan para pria pada masa Kesultanan Palembang dikenal dengan istilah pakaian tuluk belango. Perkataan tuluk artinya cocok, sesuai, pas, sedangkan belango berasal dari kata belang yang artinya corak. Jadi pakaian



SUMBER: REPRO FOTO KOLEKSI PRABU DIRADJA, 2016

Pakaian Kebesaran Kesultanan Palembang Masa Kini.

tuluk belango adalah pakaian yang cocok/sesuai dengan corak pemakainnya. Misalnya, pakaian para hulubalang dinamakan pakan tuluk belango hulubalang, pakaian para santri disebut dengan tuluk belango santri, dan sebagainya. Di dalam perkembangannya, pakaian tuluk belango dewasa ini dipakai untuk menyebut pakaian para *jagok* atau para jagoan (berkelahi, sabung ayam, dan kegiatan negatif lainnya). Karena itu, model pakaiannya juga menyesuaikan pemakainya, yaitu pakaiannya agak longgar tanpa ikat pinggang.

Dewasa ini, *fashion* yang dikenakan oleh masyarakat Palembang telah mengalami modifikasi. Misalnya, pakaian yang dikenakan zuriat Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja mengenakan pakaian adat teluk belango dengan hiasan rebung di sekitar kancing baju. Jumlah rebung pada baju menunjukkan status sosial pemakainnya. Rebung 9 adalah baju kebesaran sultan, rebung 8 adalah baju untuk putra mahkota, rebung 7 adalah baju untuk pangeran, rebung 5 adalah baju untuk tumenggung, dan rebung 3 adalah baju untuk rangga (Prabu Diradja, 20 Januari 2016).

Berbeda dengan pakaian pria Palembang, maka susunan pakaian perempuan, yaitu menggunakan kain yang letak bawahnya dari kain tersebut dua jari dari mata kaki (*buku lalee*), biasanya para perempuan menggunakan gelang kaki dari emas atau tembaga suasa yang berbentuk naga. Model baju yang dikenakan berupa baju kurung dan gelungan berupa sasak yang berisikan tembakau setebek. Sanggul dihiasi dengan bunga-bunga yang terbuat dari emas atau perunggu, berikut cucuk gelungan dan sisir sari. Pakaian perempuan yang dikenakan sehari-hari di rumah sangat sederhana, yaitu kain gantung dari batik dengan baju kurung celupan biru berbentuk pendek. Di kepalanya, selalu ada bunga rampai berpandan dan selendang kecil (Akib, dkk, 1980:56-57).

Pada masa Kesultanan Palembang, pakaian perempuan yang

dikenakan pada saat bepergian tergantung pada tujuannya. Ada dua model pakaian perempuan Palembang. Model pakaian pertama adalah model pakaian perempuan saat melaksanakan aktivitas umum, seperti menghadiri undangan, bertemu keluarga, belanja, dan sebagainya. Model pakaian kedua adalah model pakaian yang dikenakan perempuan saat mengikuti upacara adat. Pakaian perempuan Palembang pada saat menghadiri undangan, berupa kain songket atau peradan dengan hiasan gelang kaki dari emas. Apabila yang mengenakan pakaian tersebut seorang perempuan terhormat dan kaya, maka kain songket yang dikenakannya adalah kain Songket Puncak Rebung. Bajunya berupa baju kurung beludru bertabur emas atau beludru dengan sulaman akinan dengan lengan baju model panjang dilengkapi dengan kancing emas bermatakan intan. Kancing yang dikenakan oleh perempuan Palembang tersebut, juga menunjukkan statusnya dalam masyarakat. Jika kancing baju yang dikenakannya berjumlah tiga, maka ia masih gadis. Adapun jumlah baju dengan kancing lima, maka ia telah menikah. Baju dengan kancing berjumlah tujuh menunjukkan bahwa ia telah menikah dan menjadi teladan, mempunyai pengalaman dalam kehidupannya, mempunyai keluarga besar, dan disegani/ terhormat. Dengan demikian, tidak semua perempuan berhak mengenakan baju dengan kancing berjumlah tujuh. Selanjutnya, pakaian yang dikenakan saat perempuan bepergian, bertemu dengan keluarga, dan keperluan lainnya, maka pakaian yang dikenakannya berupa baju kurung model celupan biru dari kain biasa dan selendang juperi (Akib, dkk, 1980:57-63).

Model pakaian perempuan Palembang saat melakukan upacara adat, berbeda dengan model saat ia melakukan aktivitas umum. Pada model pakaian ini, terdapat tiga macam pakaian yang dikenakan saat seorang perempuan Palembang menghadiri upacara-upacara kebesaran adat, yaitu: (1) *Aesan Gedeh* atau Pakaian Ksatria. Pakaian ini hanya boleh dikenakan oleh para



SUMBER: SYAROFIE, 2014: 29

Pakaian Pengantin Pada Masa Lalu.

putri anak raja dalam upacara kebesaran adat dan dalam tarian-tarian tradisional kerajaan (misalnya, menyambut tamu penting); (2) *Aesan Gandek* atau Pakaian Selendang Manteri. Adapula yang menyebut Sandang Manteri. Pakaian ini khusus dikenakan oleh para putri anak menteri dan pembesar kerajaan saat menghadiri upacara adat; (3) *Aesan Daerah* atau Pakaian *Pesangko/Pesangke*. Pakaian ini dipakai oleh para istri pejabat kerajaan dalam upacara adat dan tarian tradisional daerah, di seluruh wilayah Kedadukan

Kerajaan Sriwijaya, termasuk Siam, Kamboja, dan sebagainya. Model pakaian ini pernah dihadiahkan kepada para raja di Kedatukan Kerajaan Sriwijaya, hingga dijadikan pakaian resmi oleh permaisuri para raja tersebut (Akib, dkk, 1980:57-63).

Berbeda dengan pakaian yang dikenakan oleh kaum bangsawan, cara berpakaian penduduk pedalaman pada masa lampau banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa. Penduduk pedalaman diduga berasal dari Malaka dan banyak bercampur dengan unsur-unsur budaya Jawa, penduduk asli, dan Suku Kubu. Para pria, umumnya berpakaian berupa jas kain berbahan katun bergaris, mengenakan kain sarung dan penutup kepala terutama saat bekerja di ladang. Adapun perempuan pedalaman mengenakan kebaya katun bermotif bunga (Supriyanto, 2013: 41). Untuk mengetahui apakah perempuan tersebut masih lajang atau sudah menikah dapat dilihat dari cara mengenakan selendang. Apabila selendang diletakkan di tangan, maka ia masih lajang, tetapi jika selendang (tudung serdang) diletakkan di bahu berarti ia sudah menikah/berkeluarga (Abusofyan, 19 Januari 2016).

Songket pada masa Kesultanan Palembang, telah menjadi pelengkap busana raja dan menjadi pembentuk “jatidiri baru” masyarakat Palembang. Komposisi warna dan keindahan motif Songket Palembang, tidak sekedar bermakna estetis, namun terdapat nilai filosofis di dalamnya. Warna merah dan emas terang sebagai motif yang menjadi ciri khas songket. Warna merah bermakna berani, sedangkan emas bermakna kekayaan, kejayaan, dan kemakmuran. Pada tiap lembar songket yang dibuat terdapat motif yang mencerminkan sebuah kehendak yang ingin disampaikan. Secara umum, nilai filosofis ketatanegaraan, politik, dan pertahanan tergambar lewat rangkaian motif atau kembang yang terdapat dalam Songket Palembang. Walaupun kini songket sebagai pakaian khas Palembang telah mengalami modifikasi, “kerangka” detail motif itu telah menjadi pakem (Syarofie, 2014:16).

Kuliner Khas Palembang

Makanan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki manusia. Keterkaitan makanan, mulai dari cara pengelolaan bahan mentah menjadi wujud makanan, cara penyajiannya, termasuk cara makan sangat erat dengan tradisi masyarakatnya. Menurut Eugen Pauli (Sunar, 2011:6) memasak makanan sudah dikenal sejak zaman purbakala, ketika manusia purba secara tidak sengaja melemparkan sepotong daging ke dalam api. Aroma sedap yang timbul menarik perhatian mereka untuk mengambil kembali daging tersebut. Ternyata, daging menjadi lebih enak rasanya dan mudah dikunyah.

Pola makan pada masyarakat Palembang umumnya sangat mempertimbangkan cita rasa dan senantiasa mengonsumsi ikan sebagai menu utamanya. Ini karena ikan mudah didapatkan, baik dengan cara memancing maupun membeli di pasar terapung sekitar Sungai Musi. Melimpahnya hasil tangkapan ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah makanan berbahan ikan untuk diawetkan. Jenis makanan yang diawetkan misalnya rusip dan basekam (Yanuar Rozanof, 19 Januari 2016).

Penyajian macam-macam makanan di tiap-tiap rumah sangat bergantung pemilikinya. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka makanan yang disajikanpun semakin beragam. Berdasarkan waktunya, kebiasaan orang Palembang makan sebanyak empat kali sehari, yaitu makan pagi (amper-amper), makan siang, minum sore (perausan), dan makan malam. Waktu makan yang paling penting pada masyarakat Palembang adalah pagi hari dan malam hari (Ratnawati, dkk, 2001: 35). Makanan yang penting bagi masyarakat Palembang, terdiri atas beras, sagu, gandum, daging, ikan, sayur, buah-buahan, dan minuman. Berikut ini kuliner khas Palembang berdasarkan kelompok bahan bakunya.

Kuliner khas Palembang yang terbuat dari beras/tepung beras adalah nasi putih sebagai makanan pokok sehari-hari, nasi kunyit digunakan penganten dalam upaya adat, nasi kuning atau nasi minyak digunakan sebagai hidangan utama dalam selamatan, puntir, gedus berikut udang keringnya dibuat dari tepung beras, talam, cucur, serabi bermacam warna, putu embun, putu mayang, jongkong, kamel, bingko, apem, sagon, kuwe lumpang.

Kuliner khas Palembang yang terbuat dari ketan, antara lain ketan bubuk warna putih dengan kelapa, ketan salak dengan gula merah ditabur dengan kelapa parut, ketan wajik dengan gula merah dan pati kelapa, ketan punar warna kuning dengan sambel lingkung, ketan rendang, lemper, kelepon, enggak, bugis, gomak, dan ulen-ulen.

Kuliner khas Palembang yang terbuat dari gandum, yaitu: roti tawar, roti saudagar, roti tumis sampai roti rendang, martabak, kuwe lapis, kuwe nanas, gegodo udang dengan sambel cuka, gegodo telur, ragit Palembang, enggak gandum, enggak kicut rasa manis, keripik bombay, srikaya, kue 8 jam.

Kuliner khas Palembang yang terbuat dari ikan dan sagu, yaitu: a) Pempek. Pempek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari bahan dasar utama daging ikan dan sagu. Masyarakat Palembang telah berhasil mengembangkan bahan dasar utama tersebut, menjadi beragam jenis pempek, termasuk kerupuk berbahan dasar pempek yang dikenal luas oleh masyarakat, yaitu kerupuk kemplang; b) Tekwan, makanan ini mempunyai penampilan mirip sup ikan. Bahan dasar tekwan adalah ikan dan sagu yang dibentuk kecil-kecil mirip bakso ikan yang kemudian ditambahkan kaldu udang sebagai kuah, serta soun, dan jamur kuping sebagai pelengkap, c) Pindang ikan. Makanan ini berbahan dasar ikan (patin, gabus, belida) yang direbus dengan bumbu rempah ditambah irisan nanas untuk memberi rasa segar, sehingga ketika dimakan dengan nasi putih hangat rasanya gurih, pedas, dan segar, d) Brengkes ikan.



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Kuliner Khas Palembang yang selalu menyertakan bahan Ikan dalam menu makanannya.

Makanan brengkes ikan (patin, gabus, belida) dibuat dengan cara mengukus sambal dan sedikit campuran daging durian. Aroma durian yang ada pada brengkes ikan tidak tercium, namun rasa durian pada brengkes memberi sensasi berbeda dan menambah selera makan;

Kuliner khas Palembang yang terbuat dari daging, yaitu: pindang tulang. Bahan dasar makanan pindang tulang adalah daging sapi yang masih menempel di tulangnya. Pindang tulang direbus dengan bumbu pedas. Sumsu yang masih melekat di dalam tulang sapi, menambah rasa gurih dan aroma segar pada makanan olahan tersebut (Sarifah, 22 Januari 2016; Pemprov Sumsel, 2011: 76-78; Akib, 1980).

Makanan-makanan khas Palembang, pada masa Kesultanan Palembang mempunyai sifat dan kegunaan tertentu di dalam rumah adat. Namun, dalam perkembangannya, wajah kuliner Palembang mendapat banyak pengaruh dari bangsa asing, baik

India, Cina, Arab, dan Belanda. Walaupun riwayat politik, sosial, dan ekonomi bangsa asing tersebut telah berakhir, namun tidak dengan nilai-nilai kebudayaannya yang telah menyatu menjadi kebiasaan kolektif masyarakat Palembang. Hal ini dapat dilihat dari penamaan makanan dan cara pengolahannya, misalnya pempek, kerupuk bombay, aneka sup (misalnya tekwan), dan pindang tulang.

Sebelum Pemerintah Kolonial Belanda membangun pasar umum di Ibukota Palembang, para pedagang menjajakan makanan di atas perahu di sudut-sudut anak-anak sungai dan sungai-sungai kecil. Makanan tersebut, dibawa keliling dan dijajakan bersama-sama dengan sayur dan buah-buahan. Menurut catatan Sevenhoven (1971) bahwa semua jenis sayur dan buah-buahan (termasuk sayur-sayuran Eropa) dapat tumbuh subur di Palembang, bahkan lebih sempurna daripada sayur dan buah yang dihasilkan dari Jawa. Rasa buahnya lebih manis, empuk, dan mengandung banyak air.

Makanan kelesan yang ada di masa Kesultanan Palembang menjadi semakin digemari sejak dikomersialkan oleh pedagang Cina pada tahun 1859 dengan cara membuka kedai-kedai makanan. Sekitar tahun 1916, di Kampung Keraton (sekarang Kampung Masjid Agung dan Masjid Lama) terdapat pedagang makanan yang sangat laris bernama empek. Makanan yang dijual adalah kelesan kerupuk, kelesan lenggang, dan kelesan senggol. Asal nama kelesan karena kuliner ini dikeles (tahan disimpan lama). Para pembeli kelesan biasa memanggil si Empek dengan menyebut Pak Empek. Lambat laun, nama kelesan lebih dikenal dengan nama Pek Empek Palembang (Akib, 1980).

Wajah kuliner Palembang juga dipengaruhi bangsa Belanda. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari jejak kolonialisme bangsa Eropa di Palembang sejak abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Sebagai contoh penggunaan piring, sendok, garpu, dan cara penyajian dengan model prasmanan menjadi hal yang wajar



SUMBER: DOKUMENTASI TIM PENELITI, 2016

Pemek Palembang.

dalam tata kelola penyajian kuliner khas Palembang saat ini. Juga makanan populer macam berkedel dan sup yang sudah biasa terhidang di meja-meja makan, sejatinya diadopsi dari kuliner bangsa Eropa. Pada masa Kesultanan Palembang, cara makan masyarakatnya masih menggunakan tangan telanjang yang sudah dibasuh dengan air, sehingga nasi tidak akan lengket di jari (Rahman, 2011:5).

Adat Menerima Tamu

Adat istiadat Palembang tidak dapat dipisahkan dengan historisitas dan peran integratif yang sangat besar dari raja-raja di masa Kesultanan Palembang, ketika masih menjadi sebuah entitas politik dan kekuasaan. Pada umumnya, kajian mengenai adat istiadat pada masa Kesultanan Palembang, antara lain bersumber dari Kitab Simbur Cahaya sebagai hukum adat tertulis dan berlaku di wilayah Sumatra Selatan (Departemen budparayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatra Selatan, 2004:22). Undang-undang tersebut, dibuat oleh Ratu Sinuhun, istri Raja Palembang VIII Pangeran Siding Ing Kenayan (1639-1650). Kelahiran undang-undang ini, setelah Islam menjadi agama dan hukum negara di Kesultanan Palembang.

Hadirnya Islam menjadi agama dan hukum resmi Kesultanan Palembang, mempengaruhi semua aktivitas kehidupan masyarakat Palembang, baik tata cara berpakaian, berbicara, maupun bertingkah laku dengan senantiasa berpedoman pada ajaran Islam. Hal ini nampak dalam diri Sultan Mahmud Badarrudin II, yang senantiasa memberikan pendidikan tingkah laku yang baik dengan berpedoman pada ajaran Islam. Pendidikan berperilaku, terutama dalam menerima tamu dapat diketahui dari fatwa-fatwa Sultan Mahmud Badaruddin II. Salah satu fatwa tersebut adalah “pelihara akan dirimu dari perbuatan dan perkataan yang menyalahi syariat” (Nato Diradjo, 1984:11). Fatwa sultan tersebut, mengandung pengertian bahwa setiap orang harus berbuat dan berkata baik kepada sesama dengan berpedoman pada ajaran Islam. Dengan demikian, dapat diduga bahwa masa Kesultanan Palembang bersikap ramah dan sopan di dalam menerima tamu, hukumnya wajib sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan Abu Hurairah: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah

dia menghormati tamunya” (H.R.Ahmad).

Memang belum diketahui gambaran secara detail bagaimana tata cara menerima tamu pada masa Kesultanan Palembang karena sumber tertulis mengenai hal tersebut, belum ditemukan. Namun demikian, didasarkan atas fatwa-fatwa Sultan Mahmud Badaruddin II, maka sikap baik dan ramah bisa dilihat dari sifat dan perilaku sultan yang terbuka dalam menerima tamu (para pedagang dari bangsa asing, baik Cina, India, Arab, maupun bangsa Barat) untuk bekerjasama dan berdagang di wilayah kekuasaannya. Tentu, di dalam menerima tamunya, sultan memperlakukan sesuai kemampuan dan batas-batas penghormatan tertentu. Ketika tamu tersebut, mulai bersikap tidak sopan terhadap tuan rumah, maka wajar jika sang tuan rumah meminta tamunya meninggalkan rumahnya. Sebagaimana pepatah “dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung”. Sebagai contoh, pada masa Pangeran Siding Rejek (Pangeran Ratu Mangkurat) bin Pangeran Siding Pesarean, kehadiran para tamu yang berasal dari bangsa asing (Cina, India, Arab, dan Barat) diterima dengan baik. Namun, ketika hubungan baik yang terjalin berlanjut dengan keinginan salah satu tamunya, yaitu VOC (perusahaan dagang Belanda) untuk memonopoli perdagangan di wilayah Kesultanan Palembang tahun 1610, maka keinginan tersebut ditentang oleh Pangeran Siding Rejek. Hal ini karena Pangeran Siding Rejek ingin bersikap adil kepada semua “tamunya” hingga berujung pada perselisihan yang mengakibatkan penyerbuan VOC ke Benteng Kuto Gawang disertai dengan pembumihangusan pasukan VOC dipimpin oleh Joan van Der Laen pada tahun 1659 (Arsip YKPD, 5).

Demikian pula ketika masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II, ia pernah menerima tamu yang diutus oleh Raffles bernama Kapten Mac Donald untuk mengantarkan surat. Isi surat tersebut, berupa bantu perang melawan Belanda.

Bantuan berupa amunisi perang seperti meriam, peluru, senjata, dan sebagainya (Hanafiah, 1989:59). Dengan tangan terbuka, sultan menerima bantuan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II sangat mengormati dan menghargai tamunya, sesuai karakter sultan yang berlandaskan ajaran Islam, walaupun tamu tersebut tidak seiman.

Bahasa dan Sastra

Di Indonesia terdapat sekitar 400-450 bahasa daerah (Arif, dkk, 1981: 38). Bahasa Palembang merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia. Berdasarkan tingkatan bahasa, maka bahasa Palembang terdiri atas dua tingkatan, yaitu *Baso Palembang Alus* atau *Bebaso* (bahasa Palembang halus) dan *Baso Palembang Sari-sari* (bahasa Palembang sehari-hari).

Baso Palembang Alus merupakan bahasa yang digunakan di keraton Palembang. Akar bahasa Palembang halus (*baso Palembang Alus*) berasal dari bahasa *Jarwa Kromo Inggil*. Oleh karena itu, perbendaharaan kata *Baso Palembang Alus* banyak persamaannya dengan perbendaharaan kata dalam bahasa Jawa. Bukti ini dapat diketahui dari ditemukannya koleksi surat-surat resmi (misalnya, Piagam Raja Palembang untuk Pangeran Purba Buana di Pasemah) yang menggunakan huruf Arab Pegon dengan bahasa Jawa (Rahim, 1998: 8). Dari bukti historis tersebut, diketahui bahwa transformasi budaya Palembang pada tahap awal ditandai oleh dominasi unsur-unsur budaya Jawa. Dominasi budaya Jawa, antara lain juga memunculkan orientasi nilai budaya yang bersifat vertikal dan melahirkan pembedaan kelompok sosial yang tegas, terdiri dari sultan (raja), priyayi, dan rakyat jelata (Moertono, 1985: 87)

Baso Palembang Alus hanya dipakai sebagai bahasa tinggi

atau bahasa istana dalam kota. Hal ini masih berlanjut sampai sekarang meski telah mengalami perubahan atau bercampur dengan logat dan kata-kata Palembang (Supriyanto, 2013: 34). Masyarakat biasa menggunakan *Baso Palembang Alus* apabila berbicara dengan orang tua, pemuka masyarakat, atau orang-orang yang dihormati, terutama di dalam upacara-upacara adat, seperti upacara perkawinan, khitanan, kelahiran (Arif, dkk, 1981:4).

Pada masa Kesultanan Palembang, keraton dijadikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Hal ini berbeda dengan kebiasaan di Jawa yang menjadikan pesantren sebagai pusatnya. Saat itu, hubungan antara keraton dengan Masjid Agung Palembang sangat baik, sehingga mungkin ada semacam pembagian fokus perhatian/kajian antara keraton dengan Masjid Agung Palembang. Keraton Palembang lebih memperhatikan aspek sastra keagamaan dan tasawuf, sedangkan Masjid Agung pada aspek peribadatan dan fikih. Hubungan keraton dan Masjid Agung yang harmonis bisa dimaklumi karena para Pangeran Penghulu Nata Agama dan khatib imam, serta khatib-khatib lainnya diangkat oleh sultan.

Perhatian sultan yang besar terhadap karya sastra telah menjadikan Keraton Palembang sebagai perpustakaan. Koleksi perpustakaan Keraton Palembang diketahui lengkap dan rapi dari laporan Van Sevenhoven ketika mengirim kitab dan naskah sastra hasil rampasan ke Batavia (dalam Rahim, 1998) sebagai berikut.

“55 tulisan yang bagus sekali, diikat rapi dan dalam keadaan baik yang berisi naskah Melayu dan Arab. Sungguh suatu yang menakjubkan menyaksikan salah satu dari harta milik mantan Sultan Palembang Mahmud Badarrudin”.

Koleksi Perpustakaan Keraton Palembang yang baik dan

lengkap tersebut, dirampas oleh pasukan Inggris di bawah pimpinan Kolonel Gillespie ketika menduduki Keraton Palembang pada tahun 1812 (setelah Sultan Mahmud Badaruddin II dikalahkan dan menyingkir ke daerah uluan) dan hanya sebagian kecil yang berhasil diselamatkan. Koleksi sastra yang dirampas oleh pasukan Inggris, saat ini tinggal sebagian kecil saja yang masih ditemukan di British Library London. Koleksi tersebut, terdaftar dalam kode naskah Raffles dan Marsden (10 naskah). Peristiwa kedua yang menguras habis seluruh naskah sastra koleksi Keraton Palembang adalah ketika Sultan Mahmud Badaruddin II dikalahkan Belanda. Menurut catatan Drewes dan Iskandar, masih ada 100 judul buku koleksi Keraton Palembang yang tersebar di berbagai perpustakaan dan museum di beberapa negara, antara lain Inggris, Belanda, Perancis, Rusia, dan Indonesia. Buku-buku tersebut berupa karya sastra Melayu dan Jawa, serta buku agama Islam.

Naskah Sastra Melayu yang tersebar di berbagai negara berisi masalah dan tuntunan beragama, serta membangkitkan semangat beragama. Salah satu syair yang terkenal adalah Syair Perang Menteng (Perang Palembang) yang menceritakan tentang perang antara Muntinghe (dipanggil Menteng) dari pihak Belanda dengan pihak Kesultanan Palembang pada tahun 1819. Isi syair ini menggambarkan perang jihad melawan kafir/kolonial Belanda. Sedangkan naskah sastra Jawa, umumnya mengenai cerita yang berkaitan dengan wayang (Rahim, 1998:98-99). Koleksi naskah sastra Jawa yang dimiliki oleh Keraton Palembang menunjukkan pengaruh budaya Jawa, sebagaimana bahasa Keraton Palembang yang mirip dengan bahasa *Jawa Kromo Inggil*.

Bahasa yang dipergunakan masyarakat Palembang sehari-hari adalah bahasa Melayu. Bahasa ini biasa disebut oleh masyarakat Palembang dengan istilah *Baso Palembang Sari-sari*.. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Palembang sehari-

hari, di samping diketahui dari penutur bahasa, juga dapat dilihat pada karya sastra Melayu berupa hikayat, syair, dan pantun. Bahasa Palembang sehari-hari digunakan oleh seseorang yang sederajat, seumur, atau lebih muda dari penutur.

Dewasa ini, di dalam praktiknya sehari-hari, orang Palembang biasanya mencampurkan bahasa Palembang sehari-hari dengan bahasa Indonesia yang pemilihan katanya berdasarkan kondisi dan koherensi, sehingga penggunaan bahasa Palembang menjadi suatu seni tersendiri. Di dalam pergaulan masyarakat Palembang sehari-hari, sebuah percakapan dapat terjadi secara formal maupun nonformal. Percakapan dapat pula terjadi antara orang dari satu suku bangsa (intraetnis), orang yang berlainan suku bangsa (antaretnis), serta percakapan beberapa orang penutur asli bahasa Palembang dengan seseorang atau lebih dari suku lain (intra-antaretnis).

Seni Tari

Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan akan berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan itu sendiri. Di masa Kesultanan Palembang, tumbuh dan berkembangnya kesenian sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Pengaruh Islam tersebut, dapat dilihat dari seni sastra, seni rupa, kerajinan lak, seni suara dan musik, wayang Palembang, serta seni arsitektur. Dari sekian kesenian yang tumbuh pada masa Kesultanan Palembang, tidak diketahui secara pasti bagaimana kesenian tari pada masa itu. Hal ini dapat dipahami karena pertunjukan tari pada umumnya dilakukan oleh perempuan. Mempertontonkan tubuh perempuan di muka umum, melalui tari-tarian dianggap tabu oleh masyarakat Palembang yang memegang kuat ajaran Islam (Prabu Diradja, 20 Januari 2016).

Seorang perempuan pada masa Kesultanan Palembang sangat dilarang untuk bertemu secara bebas dengan seorang pria. Hal ini sesuai dengan laporan Sevenhoven (1971:53), sebagai berikut.

“Sultan Mahmud Badarrudin mengadakan peraturan bahwa seoraang wanita dengan siapa ia telah mengadakan hubungan, tidak boleh untuk selama-lamanya melihat laki-laki lain.”

Akibat keberadaan perempuan pada masa lalu tersebut di atas, maka dapat diduga bahwa hal itu akan mempengaruhi kekosongan seni pertunjukan, khususnya seni tari. Munculnya tari-tarian di Palembang, terjadi setelah Kesultanan Palembang dalam pendudukan kolonial Belanda. Hal ini diketahui dari tiga sumber gambar hitam putih berangka tahun 1875, tahun 1900, dan tahun 1935 (Syarofie, 2014: 30-31). Di bawah gambar tahun 1875 hanya memuat kalimat “menari”.



SUMBER: SYAROFIE, 2014: 30

Tari Penyambutan Tahun 1875.



SUMBER: SYAROFIE, 2014: 31

Tari Penyambutan Tahun 1900.



DOKUMEN: SYAROFIE, 2014: 31

Tari Penyambutan Tahun 1935.

Dari ketiga gambar di atas, dapat diketahui bahwa tari-tarian pada masa tersebut, telah memasukkan unsur-unsur yang bernafaskan Islam. Tarian dharmia yang hidup pada masa pra Islam, telah digubah oleh para seniman tari dengan tari-tarian tradisional yang memasukkan unsur cerita baru, yaitu tari untuk

menyambut tamu. Akulturasi antara budaya asli, budaya Hindu/Budha, serta budaya Islam juga nampak pada busana para penarinya.

Gambar hitam putih yang berangka tahun 1875 menggambarkan sekelompok penari untuk menyambut tamu dengan mengenakan busana tradisional Palembang berupa songket, mulai dari selendang penutup dada sampai kainnya. Pola pemakaiannya, serupa dengan dodot yang dikenal oleh masyarakat Palembang saat ini. Adapun gambar lain yang berangka tahun 1900 juga menunjukkan tari penyambutan tamu, tetapi pakaian yang dikenakan penarinya berbeda dengan gambar sebelumnya, yaitu ada dua mode pakaian. Sebagian penari mengenakan baju dodot dan sebagian lainnya mengenakan baju kurung. Dari kedua gambar yang berangkat tahun 1875 dan 1900, lokasi berlangsungnya tari penyambutan tamu tersebut sulit diketahui. Berbeda dengan gambar terakhir yang berangkat tahun 1935, maka lokasi berlangsungnya tari penyambutan tamu dilakukan di depan halaman rumah Residen Palembang (sekarang menjadi Musium Sultan Mahmud Badaruddin II). Kedua penari mengenakan baju kurung. Para penari dari ketiga gambar tersebut, merupakan putri pangeran atau pemimpin kaum di Palembang atau sekitar wilayah Sumatera Selatan. Mereka menari pada setiap peringatan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina atau hari-hari besar Kerajaan Belanda (Syarofie, 2014: 30-31)

Di pertengahan abad ke-20, muncul beberapa tarian tradisional Palembang, antara lain Tari Gending Sriwijaya dan Tari Tanggai. Pada umumnya, masyarakat Palembang beranggapan bahwa kedua tarian tradisional tersebut, telah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dapat dipahami karena informasi sejarah yang diterima masyarakat Palembang sangat minim, sehingga muncul pandangan yang salah tentang historisitas tarian tersebut. Pelarangan untuk mementaskan

Tari Gending Sriwijaya di masa Pemerintahan Orde Baru karena bercitra PKI, juga semakin menghapus memori ingatan masyarakat Palembang mengenai sejarah Tari Gending Sriwijaya.

Kelahiran Tari Gending Sriwijaya bertujuan untuk menyambut tamu agung yang berkunjung ke Palembang, seperti kepala negara, kepala pemerintahan/negara sahabat, duta besar, atau yang setara dengan jabatan tersebut. Tari Gending Sriwijaya diciptakan pada tahun 1942 oleh Nung Cik AR. Namun, sebelum gerak tari diciptakan, terlebih dahulu dibuat musik dan syairnya oleh seorang komponis bernama Dahlan Muhibat. Tari Gending Sriwijaya mulai ditampilkan pada tahun 1945 saat kedatangan pejabat dari Jakarta bernama Syafii dengan beberapa orang Jepang di halaman Masjid Agung Palembang. Penarinya merupakan anak-anak pejabat Palembang (Ali Hanafiah, 19 Januari 2016).

Tari Gending Sriwijaya mengambil inspirasi masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Akan tetapi, irama, gerak, lagu, dan busana pada Tari Gending Sriwijaya merupakan kombinasi pengaruh Hindu, Budha, dan Islam. Tarian ini mencerminkan sikap tuan rumah yang ramah, gembira, bahagia, tulus, dan terbuka menerima kedatangan tamu istimewa (Dinas Budpar Sumsel, 2004: 12). Penari tarian Gending Sriwijaya berjumlah ganjil, yaitu 13 gadis. Menurut kepercayaan orang Palembang, jumlah ganjil membawa makna keberuntungan. Ke-13 penari tersebut, terdiri dari: 1 orang penari utama pembawa tepak (tepak kapur sirih), 2 orang penari pembawa paridon (perlengkapan tepak), 6 orang penari pendamping (tiga di kanan dan tiga di kiri), 1 orang pembawa payung kebesaran (dibawa oleh pria), 1 orang penyanyi Gending Sriwijaya, dan 2 orang pembawa tombak (dibawa oleh pria) (Palembang Art, TT).

Pada tahun 1965 terjadi pemberontakan PKI dan pencipta Tari Gending Sriwijaya, yakni Nung Cik AR disinyalir anggota

Lekra yang merupakan sebuah organisasi kesenian di bawah binaan PKI, sehingga ia ditangkap dan Tari Gending Sriwijaya pada saat itu tidak boleh ditampilkan. Pelarangan Tari Gending Sriwijaya oleh Gubernur Sumatra Selatan pada saat itu, menimbulkan masalah. Saat kedatangan tamu, Palembang tidak mempunyai tari penyambutan. Oleh karena itu, diciptakanlah tari tradisional baru bernama Tari Tanggai. Tari Tanggai adalah tari tradisional Palembang yang fungsinya sama dengan Tari Gending Sriwijaya, yaitu untuk menyambut tamu penting kenegaraan (Ali Hanafiah, 19 Januari 2016). Penari Tari Tanggai berjumlah 5 orang gadis yang memakai pakaian khas Palembang, seperti songket, dodot, pending, kalung, sanggul malang, kembang urai atau rampai, tajuk cempako, kembang goyang, dan tanggai yang berbentuk kuku dan terbuat dari lempengan tembaga. Gerak lentur yang dibawakan oleh para penari melambangkan sikap ramah tuan rumah dalam menyambut para tamu (Palembang Art, TT).

Pada tanggal 17 Juni 1967, Brigjen TNI Ishak Duarsa dilantik menjadi Pangdam II Sriwijaya menggantikan Letkol Inf. Makmun Murod (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/komando-daerah-militer-II/Sriwijaya>, 2 Pebruari 2016). Dalam rangka menyambut tugas baru Brigjen TNI Ishak Duarsa, maka diciptakan lagi tari tradisional Palembang, yaitu Tari Tepak Keraton oleh Ana Kumari. Walaupun namanya Tari Tepak Keraton, tetapi tarian ini tidak ada hubungannya dengan masa Kerajaan Sriwijaya maupun Kesultanan Palembang. Tari Tepak Keraton mirip dengan Tari Tanggai. Irama dan gerakan para penarinya hampir sama dengan Tari Tanggai hanya ditambah syair. Jumlah penarinya ganjil, minimal 3 orang dan yang terbanyak sampai 13 orang. Khusus Tari Tepak Keraton, ada seorang wanita berpakaian pria. Ciri penting yang membedakan Tari Tepak Keraton dengan Tari Tanggai adalah baju para penarinya. Kalau Tari Tanggai menggunakan baju Aesan Gede,

maka Tari Tepak Keraton mengenakan baju Kurung Angkinan. Tari Tepak Keraton diiringi dengan iringan musik, antara lain: ketipung, biola, dan akordion, yang biasa disebut dengan musik melayu (Ali Hanafiah, 19 Januari 2016).

Perkembangan seni tari tradisional pada sekitar tahun 60-an di Palembang, ternyata diikuti munculnya sanggar seni tari modern yang menarikan Tari Bedana. Salah satu sanggar seni tari modern tersebut, adalah Perkumpulan Seni Tari Bedana Cik Yuyu. Tari Bedana adalah tarian yang bawakan oleh para gadis yang saling berpasangan (biasanya 3 pasang) untuk menghibur pengantin dan keluarganya dengan iringan musik gambus. Gerak Tari Bedana sangat dinamis, lincah, dan bertumpu pada kaki. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan Tari Gending Sriwijaya ataupun tari tradisional Palembang lainnya yang lembut dan gemulai, maka Tari Bedana terkesan lebih kasar. Demikian pula dengan pakaian yang dikenakan, Tari Bedana tidak mengenakan pakaian khas Palembang. Para penari Tari Bedana hanya mengenakan seragam perkumpulan yang sederhana dengan lambang perkumpulan di dada, mengenakan rok, dan tidak mengenakan alas kaki. Pertunjukan Tari Bedana dilakukan pada malam hari setelah sholat Isya di dalam rumah pengantin dan hanya boleh dilihat oleh kaum perempuan (Halimah, 22 Januari 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip, Buku, Artikel, Brosur dan Bahan Tercetak
Arsip YKPD (Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam).
- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Akib, dkk, *Sejarah dan Kebudayaan Palembang Jilid I*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
- Arif, dkk, *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Palembang* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1981).
- Coedes, George. *Sriwijaya: History, religion & language of an early Malay polity: collected studies*. London: Monograph of the Malaysian Branch, Royal Asiatic Society, 1992.
- Cortesao, Armando (ed.). *Suma Oriental Karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Court, M.H. *An Exposition of Relations of the British Gouvernement with the Sultan and State of Palembang and the Design of the Netherlands Gouvernement upon the Country*. London: Parbury and Allen, 1821.
- Data dan Informasi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan*. Jakarta: Direktorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial RI, 1987.
- De Roo de Faille, F. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Djakarta: Bhratara, 1971.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dinas Budpar. "Kota Wisata Sungai: Masjid Ki Marogan", *Buku*

Saku. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang, TT.

Dokumen Kesultanan Palembang Darussalam, *Peninggalan-Peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang; 27 Oktober 2002.

Farida. "Perekonomian Kesultanan Palembang", *Jurnal Sejarah Lontar*, Volume 6 No.1 (Januari-Juni) 2009, hlm. 12-20.

Farida, "Perang Palembang dan Benteng-Benteng Pertahanannya 1819-1812", Makalah pada Seminar Nasional Palembang Masa Lalu, Kini dan Masa Depan. 2012a.

Farida, "Konflik Kepemimpinan di Kesultanan Palembang", *Makalah*, pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Indepemda Sumatera Selatan, di RRI Sumsel, 22 Oktober 2012b.

Furnivall, J.S. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1967.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.

Hanafiah, Djohan dan Nanag S. Soetadji, "Jipang, Tempat Asal Pendiri Kesultanan Palembang-Sebuah Laporan perjalanan", dalam Djohan Hanafiah (ed). *Perang Palembang Melawan VOC*. Palembang: Pemerintah Daerah Kotamadya Palembang, 1996.

Hanafiah, Djohan, "The Chinese Occupation in Palembang", Bambang Budi Utomo (ed), *Cheng Ho: His Cultural Diplomacy in Palembang*. Palembang: Government of South Sumatera Province, 2008.

Hanafiah, Djohan. "Kesultanan Palembang Darusalam dalam Perspektip Sumatera Selatan, dalam Djohan Hanafiah (ed.), *Perang Palembang Melawan VOC*. Palembang:

- Pemerintah Kotamadya Palembang, 1996.
- Hanafiah, Djohan. *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.
- Hanafiah, Djohan. *Kuto Gawang: Pergolakan dan Permainan Politik Dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang: Parawisata Jasa Utama, 1987.
- Hanafiah, Djohan. *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hanafiah, Djohan. *Perang Palembang Melawan VOC*. Palembang: Pemerintah Daerah Kotamadya Palembang, 1996.
- Hanafiah, Johan. dkk. *Direktori Sumatera Selatan*. (ed.) Rachman Zeth. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2006.
- Hanafiah, Johan. *Masjid Agung Palembang: Sejarah dan Masa Depan*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.
- Hanafiah, Djohan. *Perang Palembang 1819-1821*. Palembang: Parawisata Jasa Utama, 1986.
- Harun, Yahya. *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI-XVII*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995.
- Heritage. "Heritage of Mosque: Masjid-Masjid Tua". *Brosur*. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang, TT.
- Historical Building. "Historical Building: Bangunan-Bangunan Bersejarah". *Brosur*. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang, TT.
- Houben, Vincent J.H. *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Jumhari, *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab, dan Cina Di Palembang: Dari Masa Kesultanan Palembang Hingga*

- Reformasi*. Padang: BPSNT Padang Press, 2010.
- Larson, George D. *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Mahmud, Kiagus Imran. *Sejarah Palembang*. Palembang: Penerbit Anggrek, 2008.
- Mardiwarsito, L. *Kamus Jawa Kuno – Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1986.
- Marsden, William. *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962.
- Moertono, Soemarsaid. *Negara dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau*. Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- Muljana, Slamet. *Kuntala, Sriwijaya, dan Suwarnabhumi*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
- Nato Dirajo, Husin. “Riwayat Hidup Sultan Mahmud Badarrudin II”. Palembang: 1984.
- Nawiyanto, Eko Crys Endrayadi, dan Siti Sumardiati, *Melacak Jejak Pejuang: Biografi R.H. Noerdhin Soetawidjaja*. Yogyakarta: Galang Press, 2015.
- “Palembang Arts and Culture”. *Brosur*. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang, TT.
- Pemprov Sumsel. *City Guide: South Sumatera Highlight*. Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2011.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Gelar Kebangsaan Kaitannya dengan Rumah Limas Palembang*. Palembang: TP, 2006.

- Peters, W.J. dan L.F. Neuenschwander, *Slash and Burn: Farming in the Third World Forest. Idaho: University of Idaho Press*, 1988.
- Poesponegoro, MarwatiDjoened dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rahim, Husni. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial Palembang*. Jakarta: Logos, 1998.
- Rahman, Fadly. *Rijsttafel: Budaya Kuliner Di Indonesia Masa Kolonial 1870 – 1942*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ricklefs, M.C. *Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi 1749–1792: Sejarah Pembagian Jawa*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Rouffaer, G.P. *De Voornaamstee Industrieen Der Inlandsche bevolking van Java en Madoera, 1904*.
- Ratnawati, dkk. *Makanan: Wujud Variasi dan Fungsinya, serta Cara Penyajiannya Pada Orang Palembang, Sumatera Selatan*. Jakarta: PT. Yasperindo Selarah, 2001.
- Rohana, Siti, dan Refisrul. *Kerajinan Songket Palembang: Tinjauan Sejarah dan Prospek 1980–1997*. Padang: BPSNT Padang Press, 2009.
- Saragih, dkk. *Buku Panduan Musium Negeri Sumatera Selatan*. Palembang: Musium Negeri Sumatera Selatan, 2015.
- Seno, dkk., *Makna Lambang Pada Bangunan dan Lukisan Makam Raja-Raja Islam Palembang*. Padang: BPSNT Padang Press, 2009.
- Slamet Muljana, R.B. *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah*

- Kerajaan Majapahit*. Yogyakarta: LKIS, 2011.
- Soeratman, Darsiti. *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Taman Siswa, 1989.
- Soetadji, Nanang S. “Kesultanan Palembang”, dalam Djohan Hanafiah (ed.), *Perang Palembang Melawan VOC*. Palembang: Pemerintah Kotamadya Palembang, 1996.
- Suarti, Kariwa. *Kain Songket Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Sunar. “Gastronomi Indonesia dan Pariwisata: Meningkatkan Harkat Gastronomi Indonesia Di Kancah Global sebagai Identitas Budaya dalam Pariwisata. *Makalah Seminar dalam Rangka Dies Natalis Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali XXXIII*. Denpasar, 2011.
- Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Syarofie, Yudhy. *Songket Palembang: Nilai Filosofis, Jejak Sejarah, dan Tradisi*. Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2014.
- Tim Peneliti, “Hukum Islam di Kesultanan Palembang” *Laporan Penelitian* (Palembang: Balai Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang, 1993)
- Van Leur, J.C. *Indonesian Trade and Society*. Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- Van Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*. Jakarta: Bhratara, 1971.
- Vlekke, Bernard H.M. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Woelders, M.O. “Syair Perang Menteng: Kajian Naskah Sastra”, dalam Djohan Hanafiah (ed.), *Perang Palembang Melawan VOC*. Palembang: Pemerintah Daerah Palembang dan Kotamadya Palembang, 1996.

- Yass, Marzuki Ab. “Kerusuhan-kerusuhan di Daerah Pedalaman Kesultanan Palembang pada Abad ke 19”, *Makalah*, Seminar Sejarah *Lokal* di Medan tanggal 17-20 September 1984.
- YKPD (Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam). “Peninggalan-peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam”, 2002.
- Zed, Mestika. *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES, 2003.

Wawancara

- Ali Hanafiah (Kepala Museum Sultan Mahmud Badarrudin II Palembang), Palembang, 19 Januari 2016
- Abusofyan (Pegawai Museum Sultan Mahmud Badarrudin II Palembang), Palembang, 19 Januari 2016.
- Yanuar Rozanof, RM., (Wartawan Koran Sumatra Selatan) Palembang, 19 Januari 2016.
- Prabu Diradja (Sultan Palembang dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja), Palembang, 20 Januari 2016
- Halimah, Mantan Penari Bedana Pimpin Cut Ayu, Palembang, 22 Januari 2016
- Sarifah, Palembang, 22 Januari 2016

GLOSARIUM

Adat	: Tradisi dan kebudayaan lokal
Aesan gandek	: Pakaian selendang menteri
Aesan gedeh	Pakaian ksatria
Alingan	: Pembantu miji dalam melaksanakan tanggung-jawab yang diserahkan kepadanya
ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
Bebaso	: Bahasa Palembang halus, yang dibedakan dengan bahasa Palembang sari-sari (sehari-hari)
Depati	: Raja-raja kecil di pedalaman atau kepala-kepala rakyat yang bebas
Dusun	: Desa, unit organisasi sosial/pemerintahan tingkat paling bawah zaman kesultanan
Heuristik	: Pengumpulan sumber sejarah
Historiografi	: Penulisan sejarah
Iilir	: Bagian hilir sungai atau daerah dataran rendah
Jenang	: Pejabat pemerintahan pusat yang diberi hak penguasaan atas dusun atau marga
Kepungutan	: Daerah kekuasaan Kesultanan Palembang
Krio	: Kepala dusun di Palembang
Ladang	: Tanah pertanian
Lela	: Meriam ukuran kecil
Marga	: Unit pemerintahan supralokal di Palembang, terdiri dari 2-15 dusun
Matagawe	: Orang kebanyakan pada masa Kesultanan Palembang
Merogan	: Muara Ogan
Miji	: Sekelompok orang yang disertai tanggung-jawab melakukan berbagai pekerjaan tangan untuk sultan dan para priyayi

Pancalang lima	: Lembaga pemerintahan di Palembang yang terdiri dari lima pembesar tinggi kerajaan/kesultanan
Paseban	: Balai tempat menghadap sultan/raja
Pasirah	: Kepala marga, sering pula disebut Depati
Pencalang	: Perahu kecil terbuat dari papan
Pengalasan	: Prajurit atau hulu balang sultan
Penghulu	: Pejabat agama zaman Kesultanan Palembang
Perpat	: Penunjuk jalan
Pikul	: Ukuran berat, 1 pikul = 62,5 kilogram
PNRI	: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Priyayi	: Orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan sultan
Proatin	: Kepala-kepala dusun dan para pembantunya yang dibawahkan oleh depati
Raban	: Pejabat pemerintahan pusat yang diberi hak penguasaan atas dusun atau marga
Raden	: Gelar bangsawan Palembang
Rumah limas	: Rumah tradisional para pejmbesar Kesultanan Palembang, belakangan juga disebut
Sikap	: Kelompok dusun yang mendapatkan tugas-tugas khusus dari kesultanan
Simbur Cahaya	: Undang-Undang Kesultanan Palembang yang disusun oleh Ratu Sinuhun, yang dikompilasi dan dikodifikasi pada masa kolonial Belanda
Sindang	: Daerah otonom zaman kesultanan Palembang
tiban tukon	: Barang-barang yang dikirim ke pedalaman
Uluan	: Daerah hulu sungai atau daerah dataran tinggi
YKPD	: Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam

INDEKS

A

Abdurrahman, Sultan, 35-36, 38, 101, 112, 147
Adat, x, 51, 53, 57-58, 135, 145, 147, 151-153, 156-157, 160, 163
Aesan: - Gandek; - Gede, 152-153, 170
Akib, 44, 133-136, 138, 144, 147, 149-152, 154, 157-158
Alingan, 58
Anom, Sultan Ahmad Najamuddin Prabu, 43, 126
Arab, 6, 16, 37, 50, 55, 62, 70-71, 78, 88, 111, 124-125, 132, 137, 143-144, 158, 161-163

B

Badaruddin II, Sultan Mahmud, xiii, 5, 10, 32, 39-45, 61-66, 89-90, 93, 98-99, 102, 105, 107, 112, 119, 123, 131-132, 148-149, 151, 160-162, 164, 168
Bahasa, x, 20-21, 27, 120, 125, 135, 141, 162-165
- Jawa, 27, 120, 162, 164
- Melayu, 20, 164
- Palembang, 135, 162, 164-165
Bahauddin, Sultan Muhammad, 37, 39, 80, 96, 117, 130, 132
Bangka, 15, 17, 36, 39, 49, 70, 75, 80, 82, 87, 89-90
Batanghari Sembilan, 49, 75
Batavia, 33, 83, 163
Bebaso, 162
Belanda, 4-8, 10, 33-36, 40, 42-46, 63-64, 66, 73, 81-83, 89-90, 92, 95, 97-100, 103-105, 107, 115,

119, 123, 128, 132, 158, 161, 164, 166, 168

Benteng, x, 10, 23, 34, 39, 42-43, 63, 92-100, 113, 117-123, 138, 161
- Beringin Janggut; x, 35, 121-122
- Kuto Besak, 10, 38-39, 50, 94, 96-97, 100, 113, 117-120, 122-123, 138
- Kuto Gawang, 32-33, 120-122, 128, 161
- Manguntama, 43, 92, 100
Bukit Siguntang, 20
Busana, 11, 141-142, 144, 147, 150, 154, 168-169

C

Cina, 16-23, 32, 50, 70-71, 78-79, 82, 84, 88, 90, 111, 113, 117, 142, 144, 146-147, 158, 161
Cinde Walang, 121-122

D

Damar, Ario, 29
De la Faille, Roo, 78
Demak, 3, 23, 29-30, 65, 125
Demang, 46, 60, 81, 95, 135
- Lebar Daun, 60
Depati, 52-53

H

Hanafiah, Johan, 5
Hindia Belanda, 44, 73, 83
Hindu, 124, 141, 168-169
Hulubalang, 51, 101, 124, 147, 151

I

Iliran, 49, 52

India, 18-19, 21, 111, 142, 144-145, 158, 161
Indonesia, xii, xiii, 3-7, 10, 20, 37, 42, 44, 90, 115, 120, 141-142, 162, 164-165
Inggris, 5, 27, 36, 38, 41-42, 64, 66, 73-74, 78, 82, 84, 89-90, 97, 104-105, 107, 164
I-Tsing, 16

J

Jawa, 3, 16, 18, 21-23, 27-29, 36, 65, 70, 73, 76, 79, 90, 120, 142, 154, 158, 162-164
Jenang, 51-52

K

Kafir, 63-64, 164
Kembaro, 2, 34, 94-95, 99-100
Kepungutan, 49, 52
Kerajaan Sriwijaya, 3, 7, 11, 15-21, 28, 70, 127, 142-144, 154, 168-170
Keraton, 4, 32-35, 37-38, 43, 49-50, 63, 65, 72, 103, 118, 120, 122-123, 141, 158, 162-164, 170-171
Kesultanan, v, vii, viii, ix, xii, xiii, xiv, 4-11, 15, 25, 28-30, 34-39, 42, 44-45, 49-50, 54-55, 57-59, 61-66, 69-83, 87-91, 93-94, 98-99, 101-107, 111-113, 118, 120-122, 126, 128-129, 132, 144-145, 147, 149-151, 154, 157-161, 163-166, 170
- Demak, 29, 65
- Palembang, v, vii, viii, ix, xii, xiii, xiv, 4-11, 15, 25, 28, 30, 34-39, 42, 44-45, 49-50, 54-55, 57, 59, 61-66, 69-83, 87-91, 93-94, 98, 101-107, 111-113, 118, 120-122,

126, 128-129, 132, 144-145, 147, 149-151, 154, 157-161, 163-166, 170

Ki Gede ing Suro, 30, 125-126
Kolonial Belanda, 4-7, 42, 44-45, 66, 103, 115, 123, 158, 164, 166
Komerling, 46, 49, 70, 74, 88, 94, 128
Kubu, 23, 154
Kuliner, 11, 141, 155-159

M

MacDonald, Kapten, 90
Mahmud Jayo Wikramo, Sultan, 38
Majapahit, 3, 22-23, 29-30, 55, 136
Makam, 10, 38, 111, 116, 123-131, 136
Malaka, 16-19, 22, 30, 36, 39, 59, 66, 70, 90, 144, 154
Masjid, 38, 111-117, 129, 138, 158, 163, 169
Matagawe, 57-58
Mataram, 3-4, 31-32, 35-36, 55, 65-66, 105
Melayu, 6, 17, 19-20, 37, 39, 54, 141, 144, 163-165
Mesuji, 45, 70
Miji, 58
Muhammad Bahaiddin, Sultan, 37, 39, 96, 117, 130, 132
Musi, 19, 28, 33-34, 49-50, 52, 71, 74-76, 78, 89, 94-96, 100, 105, 113, 117-120, 122, 125, 155

P

Pakaian, 36, 75, 102, 141-143, 145, 147-154, 168, 170-171
Palembang, xii, xiii, xiv, 3-11, 13, 15-19, 21-23, 25, 27-32, 34-40, 42-46, 49-50, 52-57, 59, 61-66, 69-84, 87-96, 98-107, 111-118,

- 120-126, 128-139, 141-152, 154-166, 168-171
- Pangeran, 0-32, 34-35, 38-39, 43-45, 50-51, 55-57, 63, 65, 71, 88, 95, 99-100, 102-103, 105-106, 112, 121, 125-128, 130, 132, 135, 138, 147, 151, 160-163, 168
- Nata Agama, 50, 112, 138, 163
 - Ratu, 39, 57, 99-100, 121, 161
 - Siding Kenayan, 126, 160
- Pasemah, 15, 52, 71, 103-104, 162
- Pasirah, 52, 65
- Perang Menteng, 41, 63, 92, 164
- Perdagangan, 11, 15, 17-19, 22-23, 30, 36, 38-39, 52, 59, 64-65, 69, 71, 76-84, 87, 89-90, 121, 141, 144, 161
- lada, 38, 64, 78, 82-83, 89
 - timah, 80-81
- Peristiwa Sungai Aur
- Pulau Kembaro, 32, 34, 94-95, 99
- R**
- Raban, 51-52
- Raden Fatah, 29
- Raffles, Thomas Stamford, 161
- Ratu Sinuhun, 30, 55, 126-127, 160
- Residen Palembang, 168
- Rumah, 28, 50, 56, 58, 60, 77, 111, 123, 126, 132-138, 143, 145, 151, 155, 157, 161, 168-171
- Limas, 111, 132-138
 - Rakit, 28
- S**
- Sakatiga, 34
- Seberang: Ilir; Ulu, 43, 46, 116, 121, 125-126, 128-129, 131, 138
- Selat Malaka, 17-19, 22, 39, 90, 144
- Senan, 58, 87
- Sevenhoven, J.L. van, 10, 27, 45, 50-51, 54-59, 71, 73, 76, 78, 80, 124, 145, 158, 163, 166
- Sikap, 5, 35, 44, 49, 61, 87-88, 161, 169-170
- Simbur Cahaya, 55, 112, 127, 160
- Sindang, 49, 52-54, 103
- Sistem Pertahanan, 8, 11, 87-90
- Songket, 44-147, 149-150, 152, 154, 168, 170
- Sriwijaya, xiii, 3, 7, 10-11, 15-21, 28, 70, 119, 121-122, 127, 142-144, 154, 168-171
- Sultan Muhammad Bahaudin, 81
- Sumatra Selatan, 10, 127, 129, 160, 170
- Sungai, 17, 19, 21, 27-28, 33-35, 45, 49-50, 52, 66, 70-71, 74-76, 78, 80-81, 87-89, 94-96, 98-100, 105, 112-113, 116-122, 125, 138, 155, 158
- Komerling, 49, 70, 74, 88, 94
 - Musi, 19, 28, 33-34, 49-50, 52, 74-76, 78, 89, 94-96, 100, 105, 113, 117-120, 122, 125, 155
 - Ogan, 49, 70, 74, 94, 96, 116
 - Rawas, 88
- Sura, Ki Gede ing
- Syair Perang Menteng, 41, 63, 92, 164, 178, 185
- T**
- Talang Aur
- Tanah, 27, 34, 36, 51, 55, 58, 60, 74, 91, 95-96, 115, 137
- Jawa, 36
 - Suci, 115

Tanjak, 147, 149-150

Tari, 11, 141, 165-171

- Bedana, 171

- Gending Sriwijaya, 168-171

- Tanggai, 168, 170

- Tepak Keraton, 170-171

Ternate, 41, 43-44, 119, 132

Tome Pires, 10, 30

U

Uluan, 49, 52, 75, 164

Undang-Undang, 53-55, 112, 127,
160, 181

- Ratu Sinuhun, 30, 55, 126-

127, 160

- Simbur Cahaya, 55, 112,

127, 160

V

Van der Laen, Mayor Joan, 33, 95,
121-122, 161

Van Sevenhoven, 10, 27, 45, 50-51,
54-59, 71, 73, 76, 80, 163

VOC, 32-33, 36, 38-39, 75, 81-84,
94-96, 105-106, 112, 120-122,
128, 161

BIODATA



Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.,

Lahir di Klaten pada tahun 1966. Saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (1990), MA dari Faculty of Asian Studies, The Australian National University (2000), doktor sejarah dari Division of Pacific and Asian History, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), The Australian National University (2007). Beberapa buku yang dihasilkan di antaranya: *Melacak Jejak Pejuang: Biografi R.H. Noerdhin Soetawidjaja* (Yogyakarta: Galang Press, 2015). *Pangan, Makan dan Ketahanan Pangan: Konsepsi Etnis Jawa dan Madura* (Yogyakarta: Galang Press, 2011), *The Rising Sun and the Bamboo Curtain: Japanese and Chinese Trade Competition in Java during the 1930s and the 1990s Crises* (Jember: Jember University Press, 2010), *Matahari Terbit dan Tirai Bambu: Persaingan Dagang Jepang –Cina di Jawa Pada Masa Krisis 1930-an dan 1990-an* (Yogyakarta: Ombak, 2010), *The Development of Plantations in Jember during the Late Colonial Period* (Bantul: Lembah Manah, 2008), *Agricultural Development in a Frontier Region of Java: Besuki, 1870 – Early 1990s, second edition.* (Yogyakarta: Galangpress, 2006), *The Rising Sun in a Javanese Rice Granary: Change and Impact of Japanese Occupation on the Agricultural Economy of Besuki, 1942-1945* (Yogyakarta: Galangpress, 2005).



Dr. Eko Crys Endrayadi, M. Hum,

lahir di Lamongan, 25 Agustus 1971. Alumnus S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana tahun 1997, S2 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada tahun 2003, dan S3 Program Studi Kajian Budaya Pascasarjana Universitas Udayana tahun 2013. Menjadi Dosen di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember sejak 1 Maret 1999 dan menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah FIB

Universitas Jember sejak 2014 sampai dengan sekarang. Beberapa penelitian dan buku yang pernah ditulis, antara lain: *Dinamika Frontir Perikanan Laut Di Karesidenan Besuki Sejak Era Kolonial Hingga Orde Baru*, Dikti, 2010; “Masjid Cheng Hoo: Industri Pariwisata Budaya Etnis Cina Muslim Di Surabaya; *Jurnal Historia*, Juni 2011, Vol. 6 No. 1; “*The Struggle of the Community of Sedulur Sikep its Identity in Pati Regency, Central Java*”, *Jurnal Cultur Studies Unud*, 2013; *Melacak Jejak Pejuang: Biografi R.H.Noerdhin Soetawidjaja*, Galang Press, 2015.





KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

Sejarah dan Warisan Budayanya

Buku ini merupakan upaya ke arah penyusunan gambaran sejarah yang lebih utuh mengenai Kesultanan Palembang Darussalam dan warisan sejarahnya. Tulisan-tulisan yang sudah ada mengenai Kesultanan Palembang masih bersifat fragmentaris, serta menonjolkan aspek-aspek tertentu secara terpisah.

Gambaran yang lebih utuh dipandang akan mampu memberi pemahaman yang lebih baik tentang keberadaan dan peranan yang dimainkan Kesultanan Palembang Darussalam pada masa lalu dan warisan yang ditinggalkannya. Penghapusan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1824 oleh Pemerintah kolonial Belanda membuat keberadaan Kesultanan Palembang sebagai entitas politik yang otonom berakhir.

Akan tetapi, sebagai sebuah satuan sosio-kultural, eksistensi Palembang tidak berakhir, melainkan terus berlangsung karena melekat dengan keberadaan masyarakat dan budaya Palembang sendiri. Identitas budaya dan karakter masyarakat Palembang yang masih tampak hingga sekarang ini merupakan produk dari proses sejarah yang panjang.

Jember University Press
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
Telp. 0331-330224, voip 0319
e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

